

- WORLD POLITICS  
- AUSTRALIA FOREIGN RELATIONS

ABDUL PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**B**

# AUSTRALIA DAN PEMBENTUKAN *EAST ASIAN COMMUNITY* (EAC)

**SKRIPSI**

Fis HI 07/07

Wul  
a



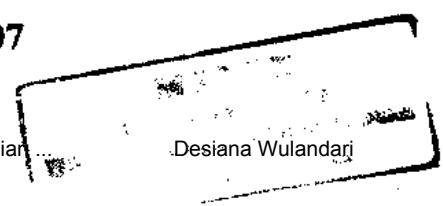
Oleh :

**DESIANA WULANDARI**

**070216752**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**Semester Gasal 2006/2007**



# **AUSTRALIA DAN PEMBENTUKAN *EAST ASIAN COMMUNITY* (EAC)**

## **SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menyelesaikan Studi S-I Pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Airlangga**



**Oleh :**

**DESIANA WULANDARI**

**070216752**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**Semester Gasal 2006/2007**

**Skripsi berjudul**

**AUSTRALIA DAN  
PEMBENTUKAN *EAST ASIAN COMMUNITY* (EAC)**

**telah disetujui untuk diujikan di hadapan Komisi Penguji**

**Surabaya, 20 Desember 2006**

**Dosen Pembimbing**



**Dra. Hj. Liliik Salamah, MSi**  
**(NIP 131569360)**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**



**Drs. I. Basis Susilo, MA**  
**(NIP 130937977)**

**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Komisi Penguji  
pada hari Kamis, 11 Januari 2007  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga**

**Komisi Penguji**

**Ketua,**



**Dra. BLS Wahyu Wardhani, MA, Ph.D**  
**(NIP 131801409)**

**Anggota,**



**Drs. Djoko Sulistyo, MS**  
**(NIP 131453807)**

**Anggota,**



**Drs. Ajar Triharso, MS**  
**(NIP 130289504)**

*Kupersembahkan karya ini  
kepada tiga orang paling berarti  
dalam hidupku  
Ayah, Ibu dan Kakakku*



*Surabaya,*

**LEMBAR PERNYATAAN**

**SKRIPSI**

**AUSTRALIA DAN  
PEMBENTUKAN *EAST ASIAN COMMUNITY* (EAC)**

**Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat**

Bagian atau keseluruhan isi skripsi ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan atau universitas lain dan tidak pernah di publikasikan atau ditulis oleh individu selain penulis kecuali dituliskan dengan format kutipan dalam isi skripsi.

Surabaya, 11 Januari 2007  
Penulis,

Desiana Wulandari

*m o t t o*

**KETIKA MERASA SENDIRIAN DI DUNIA INI,**

**MAKA**

**KATAKANLAH**

**CUKUPLAH ALLAH BAGIKU**





## PENGANTAR

Keinginan untuk memberi kebanggaan kepada orang tua serta seluruh yang menyayangiku menjadi sumber motivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan akhirnya atas izin dan kehendak Allah, penulis berhasil menyelesaikannya. Penyelesaian penulisan skripsi ini bukan tanpa halangan, namun dengan usaha dan semangat yang selalu “menyala” dalam diri penulis membuat penulis mampu mengatasi hambatan-hambatan yang ada.

Tidak bisa di pungkiri ketersediaan bahan yang kurang memadai menjadi kendala terbesar dalam penulisan skripsi ini yang mengambil tema Perubahan Sikap Australia terhadap organisasi regional di wilayah Asia Timur. Selain itu menulis skripsi di program studi Hubungan Internasional (HI) sangat berbeda dengan penulisan skripsi di jurusan lain. Hal ini dikarenakan penulisan skripsi ini melatih mahasiswa HI untuk menjadi seorang peneliti atau pengamat terhadap fenomena yang terjadi di lingkungan internasional. Hal ini menunjukkan adanya lingkup kajian penelitian yang luas sehingga membutuhkan banyak referensi dari tokoh-tokoh yang kompeten untuk mendukung analisis. Ditambah lagi untuk dapat bersentuhan langsung dengan obyek penelitian merupakan hal yang sulit dilakukan karena fenomena yang terjadi bukanlah fenomena “biasa” yang bisa dengan mudah ditemukan di lingkungan sekitar.

Meskipun obyek penelitian “terkesan jauh” namun dengan perkembangan teknologi dan informasi memberikan jembatan untuk menyediakan data dan fakta yang diperlukan guna keperluan analisis terhadap obyek tersebut. Buku, jurnal, artikel, berita-berita dalam surat kabar maupun majalah serta internet memberi akses terhadap penemuan data dan fakta yang penulis inginkan. Data-data dari internet merupakan data-data yang paling banyak penulis gunakan dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan, internet merupakan alat informasi yang tercepat sehingga mampu menyediakan informasi yang *up to date* selain juga mudah untuk didapatkan. Oleh karena itu penulis mohon dimaklumi. Penyediaan data dari buku dan sumber-sumber lainnya juga penting untuk melengkapi



penelitian ini namun tidak banyak karena sulit menemukan buku yang relevan dengan tema penulisan skripsi ini.

Setelah melalui berbagai kesulitan dalam menulis skripsi ini, akhirnya segenap rasa syukur yang tinggi penulis persembahkan pada Allah swt, yang memiliki segala yang hidup dan yang mati. Dengan rahmat, taufik dan hidayah Nya, penulis mampu menyelesaikan salah satu tanggung jawab besar sebagai seorang mahasiswi. Terima kasih juga karena Allah telah mengirimkan orang-orang yang begitu berjasa membantu penulis menyelesaikan tugas ini. Dan karena Allah juga penulis mengucapkan rasa terima kasih pada mereka.

Dengan tanpa ragu-ragu penulis menghaturkan limpahan terima kasih kepada Bu Lilik, dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini. Demi untuk menyelesaikan penulisan skripsi dan untuk meraih gelar Strata 1, ketersediaan bahan tentu tidak akan cukup digunakan dengan optimal tanpa arahan dari dosen pembimbing. Selama menulis skripsi ini Bu Lilik telah dengan rela menyediakan waktunya untuk mengoreksi tulisan penulis ditengah banyaknya agenda aktifitas sebagai dosen dan tentunya sebagai ibu rumah tangga. Dengan dedikasi yang tinggi dan profesionalisme kerja sebagai seorang dosen, Bu Lilik tetap menjalankan apa yang telah diamanahkan kepada beliau. Kritikan-kritikan dari Bu Lilik selalu menjadi "cambuk" bagi penulis untuk jangan pernah terbuai akan kemalasan dan terus menulis meskipun banyak revisi.

Ucapan terima kasih juga pantas penulis haturkan pada segenap jajaran dosen program studi Hubungan Internasional. Mas Joko yang telah membuka wawasan penulis tentang pemilihan tema skripsi serta ajarannya di ruang kuliah maupun obrolan-obrolan santai, sangat berarti bagi penulis. Pak Djoko yang selalu konsisten dengan *style* nya yang sangat *low profile*, menginspirasi penulis untuk tidak berlaku sombong, serta diskusi-diskusi tentang kehidupan yang sangat menyentuh membuat penulis selalu berpikir. Kepada Bu Irma yang telah menunjukkan perilaku wanita muslimah yang anggun, Pak Basis yang selalu kalem tapi penuh wibawa, Mas Yunus yang mengatakan bahwa menulis skripsi itu mudah, Mas Wahyu yang selalu menjawab dengan lugas jika ada yang

bertanya, serta Pak Ajar dan Bu Tatie yang telah membekali penulis dengan ilmu yang berharga. Selain itu kepada dosen-dosen yang baru pulang dari tugas belajarnya, Bu Ani dan Pak Dugis, selamat datang kembali di kampus tercinta.

Terima kasih yang tak terhingga juga saya ucapkan pada teman-teman HI khususnya HI'ers 02. Selama penulis berada diangkatan ini, telah banyak tawa dan tidak jarang diwarnai adu pendapat. Buat Nita, Nana, iNoy (sahabat dalam diskusi mata kuliah), Ivon (sahabat seperjuangan dari awal masuk HI dengan berada dalam satu kelompok "Iraq" sampai menulis skripsi dengan dosen pembimbing yang sama), Lia (akhirnya bisa lulus bareng), Wina (sahabat yang selalu tersenyum), Dewi (sahabat yang unik), Icha (suaramu merdu), Indah (sahabat yang pintar), Novi (perhatianmu pada teman sangat besar), Pipit (ayo berjuang bersama), Teri ( HI'ers 02 yang pertama kali penulis kenal), dan Fian (tekadmu sangat luar biasa, salut).

Kemudian buat Widi (akhirnya penulis sadar kamu memang pantas jadi Komting 02), Bagus (sukses selalu), Faisal (hebat! 4 tahun cukup buat jadi Sarjana), Arif (kalau diskusi jangan dari satu sisi saja), Haris (kamu selalu banyak tertawa), Billy (hidup Man Yoo), Irvan, Bani, Setyo, Rizki, Ruli, Yudi, Afrizal, dan Eko (ayo semangat terus).

Untuk HI'ers yang laen, Mas Ginanjar, Mas Juned (tukang memperbaiki komputer), Mas Rois, Mas Repsi, Mbak Anggun, Mbak Wiwit, Mbak Hani, Mbak Fani, dan Mbak Yeni (kakak kelas yang menyenangkan). Kemudian adek-adek kelasku Resa, Septi, Rista, Nisa, Zahra, Ari, Armin, Jembon, Cimenk, Yosi, dan semua HI'ers ayo "Jaya selalu HI".

Tempat tinggalku, Kos Jelita di Karmen, Nana, Devi, Annisa, dek Ajenk, dek Titin, duo dewi, erwin, mbak reny, mbak yeni, amel, nuning, mila, dan ceebee (ayo bikin kos-kosan rame terus)

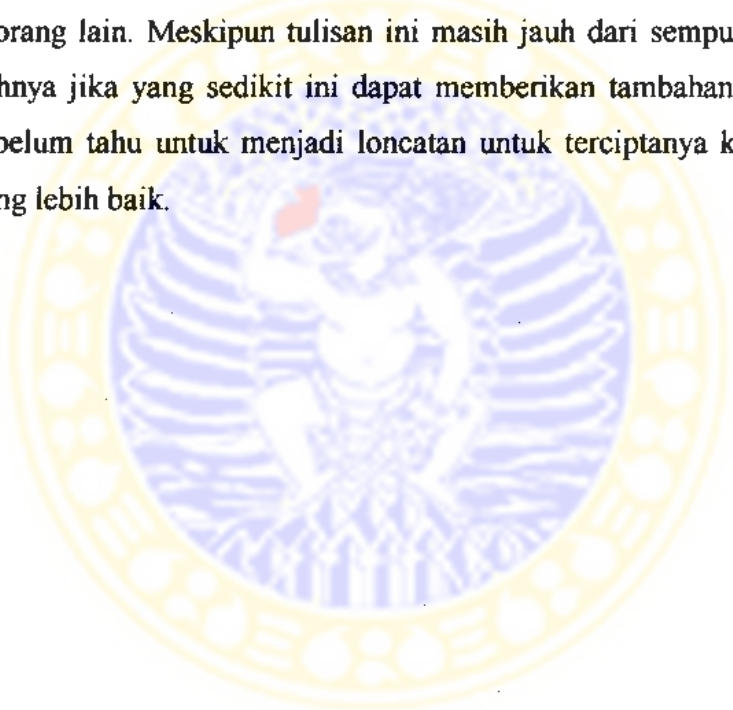
Kepada organisasi yang membuatku peka terhadap sekitar, HMI, Mas Yusli, Mas Feri (terimakasih ilmunya), Mas Ali, Mas Afif, Mas Ervan, Antok, Wahyu, semuanya kejar mimpi bersama HMI.

Buat sahabat-sahabatku yang lain, Widiana, Nesia, Atik, Ratih, Rumilasari, Fria, Heppi, (kalian yang terbaik) dan Wirawan (terima kasih selalu

ada dikala semua pergi). Terakhir buat keluarga, ayah (sosokmu yang bijak akan selalu membuatku bangga, Ayah), ibu (kasihmu selalu menemani kesendirianku sehingga ku tak lagi merasa sepi) dan Mas Indra (kau sungguh kakak yang sempurna buatku). Terima kasih Ya Allah telah menjadikan mereka sebagai anugerah terindah yang Kau berikan.

Sungguh sangat banyak orang yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, sampai penulis tak mampu menyebutkan secara rinci. Namun dukungan kalian baik secara langsung maupun hanya dari untaian doa, itu semua sangat berarti.

Apalah yang penulis harapkan dari skripsi ini selain dapat memberi manfaat bagi orang lain. Meskipun tulisan ini masih jauh dari sempurna namun alangkah indahnya jika yang sedikit ini dapat memberikan tambahan ilmu bagi mereka yang belum tahu untuk menjadi loncatan untuk terciptanya karya-karya selanjutnya yang lebih baik.



Surabaya,

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR SKEMA, GAMBAR, TABEL, DIAGRAM, GRAFIK</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
I.1. Latar Belakang Masalah .....	1
I.2. Rumusan Masalah .....	9
I.3. Tujuan Penelitian .....	9
I.4. Kerangka Pemikiran .....	10
I.4.1. Peringkat Analisis .....	10
I.4.2. Konsep dan Teori .....	14
I.4.2.1. Regionalisme Baru .....	14
I.4.2.2. Teori <i>Region Building</i> .....	16
I.4.2.3. Konsep Kepentingan Nasional .....	22
I.4.2.4. <i>Security Community</i> .....	28
I.5. Hipotesis .....	30
I.6. Metodologi Penelitian .....	30
I.6.1. Definisi Konseptual .....	30
I.6.1.1. Asia Timur .....	30
I.6.1.2. Kepentingan Ekonomi .....	31
I.6.1.3. Kepentingan Politik Keamanan .....	32
I.6.2. Definisi Operasional .....	32
I.6.2.1. Asia Timur .....	32
I.6.2.2. Kepentingan Ekonomi .....	33
I.6.2.3. Kepentingan Politik Keamanan .....	33
I.6.3. Tipe Penelitian .....	34
I.6.4. Jangkauan Penelitian .....	34
I.6.5. Teknik Pengumpulan Data .....	35
I.6.6. Teknik Analisis Data .....	35
I.6.7. Sistematika Penulisan .....	35
<b>BAB II EAST ASIAN COMMUNITY (EAC) DAN PERKEMBANGANNYA</b> .....	37
II.1. Ide dan Konsep <i>East Asian Community</i> (EAC) .....	38
II.2. Perkembangan <i>East Asian Community</i> (EAC) .....	55
II.2.1. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) I Asia Timur dan Anggota KTT I Asia Timur .....	55

II.2.2. Hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 1 Asia Timur ..	62
<b>BAB III KEPENTINGAN AUSTRALIA DALAM <i>EAST ASIAN</i></b>	
<b><i>COMMUNITY (EAC)</i></b> .....	66
III.1. Australia di Asia Timur .....	67
III.2. Ekonomi .....	76
III.3. Politik Keamanan .....	97
<b>BAB IV KESIMPULAN</b> .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	118
<b>LAMPIRAN</b> .....	xiv
Lampiran 1. Laporan EAVG .....	xv





**DAFTAR SKEMA, GAMBAR, TABEL, DIAGRAM DAN GRAFIK****SKEMA**

Skema 1.1	<i>Region Building</i> .....	18
-----------	------------------------------	----

**GAMBAR**

Gambar 3.1	<i>East Asian Hemisphere</i> .....	71
------------	------------------------------------	----

**TABEL**

Tabel 3.1.	GDP Negara-negara peserta KTT 1 Asia Timur .....	75
------------	--	----

**DIAGRAM**

Diagram 3.1	Wilayah Tujuan Wekspor tahun 2004 .....	97
-------------	---	----

**GRAFIK**

Grafik 2.1	Asia-5 Real Effective Exchange Rates, 1990-99.....	46
Grafik 3.2.	Perdagangan Australia – ASEAN 1993-1998.....	78
Grafik 3.3.	Perdagangan Australia – Jepang 1993-1998.....	87
Grafik 3.4.	Perdagangan Australia – Jepang 2001-2005.....	87
Grafik 3.5	Perdagangan Australia – Cina 2001-2005.....	89
Grafik 3.6	Perdagangan Australia – Taiwan 2001-2005.....	90
Grafik 3.7	Perdagangan Australia – Korea Selatan 2001-2005.....	92
Grafik 3.8	Perdagangan Australia – Selandia Baru 1996-2002.....	93
Grafik 3.9	Perdagangan Australia – India 1991-2001.....	94
Grafik 3.10	Perdagangan Australia – India 200-2006.....	96
Grafik 3.11	Ekspor Australia 1980-2000.....	97
Grafik 3.12	Anggaran Pertahanan Australia 1994-2005.....	108

## ABSTRAK

Salah satu fenomena menarik pasca Perang Dingin adalah kesungguhan Australia untuk menguatkan hubungan dengan negara-negara di wilayah Asia. Sikap ini terlihat dari inisiatif pembentukan APEC. Kemudian pada tahun 2005 Australia ikut serta dalam pembentukan *East Asian Community* (EAC) meskipun secara geografi Australia tidak termasuk dalam wilayah itu. Australia semula menolak keras terhadap ide pembentukan organisasi regional di wilayah Asia Timur, tapi kemudian berubah sikap yang ditunjukkan dengan mengikuti pertemuan KTT 1 Asia Timur pada tanggal 14 Desember 2005 di Malaysia.

Penelitian studi pustaka ini berusaha menjelaskan mengapa Australia terlibat dalam pembentukan EAC. Melalui tipe penelitian eksplanatif dengan berdasar peringkat analisis kelompok negara bangsa sebagai unit eksplanasi, kemudian unit analisis negara bangsa serta menggunakan konsep kepentingan nasional, teori *region building*, regionalisme baru, dan *security community* ditemukan bukti bahwa keterlibatan Australia dalam pembentukan EAC adalah untuk mencapai dua kepentingan nasionalnya, yaitu kepentingan ekonomi dan kepentingan politik keamanan. Kepentingan ekonomi ini diarahkan untuk mencapai kemakmuran warga Australia melalui perdagangan bebas. Sementara kepentingan politik keamanan diarahkan untuk menciptakan keamanan negara bangsa Australia dan keamanan wilayah dalam rangka menjaga keberlangsungan hubungan antar negara di wilayah Asia Timur dan sebagai bagian dari komunitas internasional.

*kata kunci:* *East Asian Community* (EAC), Australia, Kepentingan Nasional



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Tahun 1990 Perdana Menteri Malaysia, Dr. Mahathir Muhammad melakukan pertemuan dengan Presiden Jiang Zemin dan Menteri Luar Negeri Qian Chi Chen di Cina<sup>1</sup>. Dalam pertemuan ini, Dr. Mahathir Muhammad menyampaikan ide tentang pembentukan organisasi regional di Asia Timur<sup>2</sup> yang tidak melibatkan negara-negara di luar Asia Timur. Organisasi regional yang dimaksud adalah *East Asian Economic Group* (EAEG). Menurut Dr. Mahathir Muhammad, negara-negara di Asia Timur harus bekerja sama untuk membantu negara-negara dengan ekonomi lemah di kawasan ini<sup>3</sup>.

Usulan Dr. Mahathir Muhammad mengenai EAEG mendapat reaksi cepat dari *Association of South East Asia Nations* (ASEAN)<sup>4</sup> dan *Asia Pacific*

<sup>1</sup> Phar Kim Beng, "Divining East Asian Integration: From Divide to Divident," dalam [www.waseda-coe-cas.jpg/symposium/pdf0412/phar0412.pdf](http://www.waseda-coe-cas.jpg/symposium/pdf0412/phar0412.pdf), diakses tanggal 28 April 2006. Hal ini juga ditemukan dalam I Made Dwi Putra Sanjaya, "Kebijakan Luar Negeri Malaysia 1990: Tentang Usulan Pembentukan *East Asian Economic Grouping* (EAEG)" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga Surabaya, 1995), hal. 1

<sup>2</sup> Anthony Bergin menyebutkan bahwa Asia Timur meliputi dengan ras dan budaya yang sama yang membentang dari Asia Timur Laut yang terdiri dari Cina, Korea, Jepang sampai Asia Tenggara. Anthony Bergin, "Defining the Asia Pacific Region," dalam Hadi Soesastro dan Anthony Bergin (ed.), *The Role Of Security And Aconomic Cooperation Structures In The Asia Pacific Region*, (Jakarta, 1996), hal. 13

<sup>3</sup> Phar Kim Beng, *Loc.Cit.*

<sup>4</sup> ASEAN dibentuk di Bangkok berdasarkan Bangkok Declaration yang ditandatangani pada 8 Agustus 1967 oleh lima negara di Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand. Pada tahun 1984 Brunei Darussalam bergabung dalam keanggotaan ASEAN, disusul Vietnam pada tahun 1995, Burma (Myanmar) dan Laos pada tahun 1997 serta Kamboja pada tahun 1999. "China And The Idea Of An East Asia Community," dalam [http://www.csis.or.id/events\\_upcoming\\_view.asp](http://www.csis.or.id/events_upcoming_view.asp), diakses tanggal 23 April 2006

*Economic Cooperation (APEC)*<sup>5</sup> sebagai organisasi regional yang telah ada. Pada *Asean Ministerial Meeting (AMM)* ke 23, Oktober tahun 1991 di Malaysia, dicapai kesepakatan mengenai pembentukan *East Asia Economic Caucus (EAEC)* sebagai evolusi EAEG.<sup>6</sup> Akhirnya Sekjen ASEAN Dato Ajit Singh dari Malaysia menyerahkan proposal EAEC pada AMM ke 26, Juli 1993 di Singapura dan memutuskan bahwa EAEC merupakan *caucus within APEC*.<sup>7</sup>

Berubahnya nama dari EAEG menjadi EAEC oleh Dr. Mahathir Muhammad diharapkan mampu menjadi sebuah forum yang lebih luwes sehingga dapat berperan dalam forum yang lebih besar.<sup>8</sup> Mahathir merasa cocok dengan EAEG atau EAEC yang tidak melibatkan negara-negara di luar kawasan Asia Timur seperti Amerika dan Australia.<sup>9</sup> Dalam pidatonya Mahathir berkata: "We

<sup>5</sup> ASEAN bekerjasama dengan Australia untuk mendirikan *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)* pada tahun 1989 dan menempatkan Sekretariat APEC di Singapura tahun 1993. APEC yang meliputi Asia-Pasifik memiliki 21 anggota ekonomi. Dalam APEC tidak digunakan istilah negara untuk menyebut anggota APEC. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari usaha-usaha politik di dalamnya, sehingga untuk menetralsisir hal tersebut maka untuk menyebut anggota APEC digunakan istilah ekonomi. Ekonomi APEC terdiri dari tujuh ekonomi dari ASEAN yaitu Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Singapura, Philipina, Brunei Darussalam, lima ekonomi Asia Timur Laut yaitu Korea Selatan, Jepang, Republik Rakyat Cina, Cina Taipei, Hong Kong) dan sembilan negara bukan Asia yaitu Amerika Serikat, Kanada, Chile, Australia, Peru, New Zealand, Mexico, Rusia, Papua New Guinea. Termsak Chalermpanupap, "Towards An East Asian Community: The Journey Has Begun," dalam <http://www.aseansec.org/13202.htm>, diakses tanggal 23 April 2006

<sup>6</sup> *Ibid*. Perubahan EAEG menjadi EAEC juga ditemukan pada, "Komunitas Asia Timur," *Koran Tempo*, (2 Juni 2005) dalam [http://www.csis.or.id/scholars\\_opinion\\_view.asp?op\\_id=346&id=41&tab=1](http://www.csis.or.id/scholars_opinion_view.asp?op_id=346&id=41&tab=1) diakses tanggal 16 Juni 2006

<sup>7</sup> Termsak Chalermpanupap, *Loc. Cit*

<sup>8</sup> "Mengapa ASEAN+3 dan bukan ASEAN+5," dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0405/24/sorotan/1038955.htm>, diakses tanggal 16 Juni 2006

<sup>9</sup> Linda Sieg, "East Asian Community: An Idea Whose Come?," dalam <http://www.asianews.yahoo.com/051214/kyodo/html>, diakses tanggal 23 April 2006. Hal yang sama juga ditemukan pada Philip Bowring, "Australia Knocks On The Door And Southeast Asia Hears" dalam <http://www.iht.com/articles/1996/01/16/edbow.t0.php> diakses tanggal 16 Juni 2006

must not allow our economies to be influenced and dictated to by others who only seek material gain at the expense livelihood of the people”<sup>10</sup>.

Sementara itu, dalam menyikapi usulan Dr. Mahathir Muhammad tentang organisasi regional di Asia Timur, negara di luar Asia Timur seperti Amerika dan Australia menyatakan menolak terhadap organisasi tersebut dengan alasan terlalu *exclusive*<sup>11</sup>. Hal ini yang membuat usaha pembentukan organisasi regional ini terhambat. Ditambah lagi Jepang tidak ”berani” meninggalkan Amerika<sup>12</sup>. Hal ini diperkuat dengan pendapat Toshihiko Kinoshita<sup>13</sup> “Japan could not go against Washington.”<sup>14</sup>

Setelah penolakan dari Amerika, Australia dan Jepang, ide EAEC seakan hilang. Namun keadaan berubah pada tahun 1997-1998 yaitu saat terjadinya krisis ekonomi di Asia. Krisis ekonomi tersebut berdampak pada APEC. APEC yang seharusnya menjadi organisasi regional yang dapat membantu dalam penyelesaian krisis, ternyata APEC tidak memberikan peran yang signifikan. Sejumlah negara merasa sangat kecewa karena APEC hampir tidak berdaya ketika beberapa negara anggotanya terkena bencana krisis<sup>15</sup>.

Sementara kenyataan lain menunjukkan bahwa negara-negara di Asia Timur Laut yang meliputi Cina, Jepang, dan Korea Selatan memberikan simpati

<sup>10</sup> P.S Suryanarayana, “A Vision For Asia,” dalam <http://www.hinduonet.com/fline/f12201/stories/htm>, diakses tanggal 23 April 2006

<sup>11</sup> Termsak Chalermphanupap, *Loc.Cit*. Penolakan oleh Amerika dan Australia juga dapat ditemukan pada, Abdul Rahman Sulaiman, ”Meniti Arus: Hala Tuju EAS makin jelas, mantap,” dalam <http://www.neac.gov.my/index.php?ch=62&pg=145&ac=1610> diakses tanggal 16 Juni 2006

<sup>12</sup> “Tantangan KTT Asia Timur”, *Riau Pos*, (15 Desember 2005), dalam <http://www.riaupos.com/web/content/view/3898/7>, diakses tanggal 28 April 2006

<sup>13</sup> Seorang profesor di Universitas Waseda Tokyo dengan spesialisasi Ekonomi Asia

<sup>14</sup> Linda Sieg, *Loc.Cit*

<sup>15</sup> Hadi Soesastro, “APEC Mau Dibawa Kemana,” dalam M. Estella Anwar Bey dan Herry Sudrajat (ed.), *APEC 2010/2020*, 2006, hal. 19-21

dan kepedulian terhadap krisis yang dialami Asia dengan mengikuti pertemuan puncak informal kedua ASEAN pada Desember tahun 1997<sup>16</sup>. Tercapainya *Miyazawa Initiative* (MI) pada tahun 1998 menjadi salah satu bentuk kepedulian negara-negara Asia Timur Laut dalam membantu negara-negara Asia Timur lainnya yang terkena krisis<sup>17</sup>. Kemudian pada tahun 1999 kerjasama Cina, Jepang dan Korea Selatan dengan ASEAN tersebut diinstitusionalisasikan dalam kerangka *ASEAN Plus Three* (APT)<sup>18</sup>. Dan setahun berikutnya, tahun 2000, dicapai kesepakatan tentang kerjasama di bidang keuangan yaitu dengan adanya *Chiang Mai Initiative* (CMI) yang merupakan alat untuk saling membantu bila timbul krisis finansial di masa yang akan datang.<sup>19</sup>

Dibentuknya APT juga memberi sinyal bahwa kerjasama ini berpotensi menjadi organisasi regional yang dominan di Asia Timur sebagai salah satu kawasan perdagangan dunia.<sup>20</sup> Hal ini nampak dari semakin meningkatnya ketergantungan antar negara-negara di kawasan Asia Timur pasca krisis Asia. Perdagangan intra-regional mengalami peningkatan dari US\$ 66,5 milyar pada pertengahan pertama tahun 1999 menjadi US\$ 91,9 milyar pada pertengahan

<sup>16</sup> Xu Mingqi, "East Asian Economic Integration: China Perspective And Policy," dalam <http://www.apseg.amu.au/pdf>, diakses tanggal 28 April 2006

<sup>17</sup> Richard Stubbs, "ASEAN Plus Three, Emerging East Asian Regionalism?," dalam *Asian Survey*, Volume 42, Nomor 3, Agustus 2002, hal. 449

<sup>18</sup> Xu Mingqi, *Loc. Cit.*

<sup>19</sup> Jusuf Wanandi, "Perkembangan Strategis di kawasan Asia Timur," dalam [http://www.csis.or.id/scholars\\_opinion\\_view.asp](http://www.csis.or.id/scholars_opinion_view.asp), diakses tanggal 23 April 2006. Hal ini juga diungkapkan oleh Hadi Soesastro, *Op. Cit.*, hal. 20

<sup>20</sup> Syeda Naushin Parnini, "New Dynamics of Regionalization in East Asia: Evolving ASEAN Plus Three and The Challenges for Bangladesh", dalam, [http://www.hri.ca/tribune/onlineissue/25\\_05\\_2005/Erik%20Friberg%202020article.html](http://www.hri.ca/tribune/onlineissue/25_05_2005/Erik%20Friberg%202020article.html), diakses tanggal 23 April 2006



pertama tahun 2000<sup>21</sup>. Secara keseluruhan perdagangan intra kawasan Asia Timur meningkat dari 33.6% menjadi 53.3% pada tahun 2003<sup>22</sup>.

Menyikapi hal ini negara-negara di kawasan Asia Timur menyadari pentingnya kerjasama perdagangan intra regional. Tidak hanya itu, negara-negara Asia Timur juga bersepakat bahwa mereka memerlukan kerjasama intra regional dalam hal politik, keamanan, sosial dan budaya untuk menciptakan sebuah komunitas kawasan<sup>23</sup>. Artinya organisasi regional di wilayah Asia Timur diarahkan untuk kerjasama tidak hanya dalam bidang ekonomi akan tetapi juga kerjasama politik keamanan dan sosial budaya. Ditegaskan pula oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirajuda bahwa tidak ada yang membantah atas perlunya kerjasama Asia Timur<sup>24</sup>. Para pemimpin negara-negara di Asia Timur akan meningkatkan rasa saling percaya diantara mereka sebagai modal utama pembentukan regionalisme<sup>25</sup>.

Untuk menindaklanjuti keinginan tersebut, maka pada Desember tahun 1998 dibentuk *East Asian Vision Group* (EAVG) yang merupakan usul dari Presiden Korea Selatan, Kim Dae Jung.<sup>26</sup> Akhirnya pada Januari 2002, Perdana Menteri Koizumi memberikan pidatonya di Singapura tentang pembentukan *East*

<sup>21</sup> Richard Stubbs, *Op.Cit.*, hal 445

<sup>22</sup> Yamada Takio, "First East Asia Summit and the Prospect of an East Asian Community", dalam <http://www.rieti.go.jp/en/events/bb/06011201.html>, diakses tanggal 23 April 2006. Yamada Takio adalah Direktur Divisi Kebijakan Regional, Kantor Asia dan Oceania, Menteri Luar Negeri

<sup>23</sup> Charles Harvie and Hyun-Hoon Lee, "New Regionalism In East Asia How does It Relate To the East Asian Model?", dalam *ASEAN Economic Bulletin*, Volume 19, Nomor 2, Agustus 2002, hal. 138

<sup>24</sup> "Soal KTT Asia Timur, ASEAN Belum Capai Konsensus", *Kompas Cyber Media* (15 Desember 2005) dalam <http://www.kompas.news>, diakses tanggal 10 April 2006

<sup>25</sup> Hal ini diungkapkan oleh Perdana Menteri Malaysia YAB Dato' Seri Abdullah Hj Ahmad Badawi pada The Second East Asia Forum tanggal 6 Desember 2005 di Kuala Lumpur. Ahmad Badawi, "Towards An Integrated East Asia Community," dalam <http://www.pmo.gov.my/WebNotesApp/PMMain.nsf>, diakses tanggal 17 Mei 2006

<sup>26</sup> Phar Kim Beng, *Loc.Cit*

*Asian Community* (EAC) atau dalam ucapannya "the creation of a community that acts together and advances together"<sup>27</sup>. Pembentukan EAC bukan merupakan suatu ancaman bagi ASEAN sebagai organisasi regional yang telah ada sejak tahun 1967. Hal ini terungkap dari pernyataan PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi bahwa EAC dibentuk bukan untuk bersaing dengan organisasi lain dan tidak akan menyisihkan ASEAN karena ASEAN akan kekal sebagai ASEAN.<sup>28</sup> Ditambahkan olehnya "ASEAN's in the driver's seat"<sup>29</sup>. Sejalan dengan Abdullah Ahmad Badawi, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan "ASEAN the driving force of this East Asia Process"<sup>30</sup>.

Tindakan-tindakan menuju terwujudnya EAC semakin terlihat dengan diselenggarakannya *First East Asia Summit* (KTT 1 Asia Timur) pada tanggal 14 Desember 2005 di Malaysia. Pelaksanaan KTT 1 Asia Timur ini bertempat di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC) dan dipimpin langsung oleh Ketua KTT 1 Asia Timur, PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi<sup>31</sup>. KTT Asia Timur memiliki arti lebih daripada hanya sekedar simbol politik, namun sebagai proses pembentukan EAC.<sup>32</sup>

<sup>27</sup> Osamu Watanabe, "Integration of East Asian Economies: A Role For The United States and Japan," dalam <http://www.jetro.go.jp/en/jetro/profile/speeches/2005/dec14.pdf>, diakses tanggal 17 mei 2006. Osamu Watanabe adalah Kepala dan CEO JETRO di Central of Strategic and International Studies (CSIS). Pidato ini disampaikan di Washington D.C, Amerika Serikat pada 14 Desember 2005

<sup>28</sup> Abdullah, "Tujuh Perkara Bagi Pembentukan Masyarakat Asia Timur", dalam <http://www.pmo.gov.my/website/webdb.nsf/040612>, diakses tanggal 23 April 2006

<sup>29</sup> Dana Dillon, "Watching the east Asia Summit", dalam <http://www.heritage.org/Press/Commentary/ed081080a.cfm>, diakses tanggal 23 April 2006. Dana Dillon adalah seorang Senior Policy Analyst pada Asian Studies Center at The Heritage Foundation.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Kristanto Hadi, "KTT XI ASEAN dan Integrasi Masyarakat Asia Timur", dalam <http://www.balipost.com>, diakses tanggal 5 April 2006

<sup>32</sup> Termsak Chalernpalanupap, *Loc.Cit.*

Terdapat hal yang menarik dalam penyelenggaraan KTT 1 Asia Timur di Malaysia. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa Australia menolak pembentukan organisasi regional yang hanya melibatkan negara-negara di kawasan Asia Timur (pada saat itu bersama Amerika, Australia menolak pembentukan EAEC). Namun ternyata pada KTT 1 Asia Timur yang merupakan langkah menuju terwujudnya EAC, Australia terlihat sebagai peserta KTT. India dan Selandia Baru juga hadir sebagai peserta KTT, padahal secara geografis baik Australia, India dan Selandia Baru tidak termasuk dalam wilayah Asia Timur. Bahkan Australia demi keinginannya untuk dapat terlibat dalam KTT 1 Asia Timur bersedia menandatangani TAC pada tanggal 10 Desember 2005.<sup>33</sup> Bersedianya Australia menyetujui konsep TAC menandakan Australia menaruh perhatian besar terhadap penciptaan keamanan di wilayah Asia Timur.

Kalau kembali lagi pada ide awal pembentukan komunitas Asia Timur, fokus keanggotaan dalam upaya pembentukan EAC menjadi hal yang penting. Ide EAC merupakan turunan dari EAEC yang dikemukakan oleh Dr. Mahathir Muhammad<sup>34</sup> agar Asia Timur memiliki organisasi regional sendiri, terlepas dari pengaruh barat<sup>35</sup>. Selain itu dalam pidato yang disampaikan oleh PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi menjelaskan bahwa “the East Asian Community must

<sup>33</sup> After 15 years, Australia is in, dalam <http://www.orientexpat.com/forum/index.php> diakses tanggal 12 November 2005

<sup>34</sup> Dr. Axel Berkofsky, “Regional Integration in Asia and the East Asian Community – A European Perspective,” dalam [http://www.soc.nit.ac.jp/eusa-japan/download/eusa\\_ap/paper\\_AxelBerkofsky.pdf](http://www.soc.nit.ac.jp/eusa-japan/download/eusa_ap/paper_AxelBerkofsky.pdf), diakses tanggal 17 mei 2006. Dr. Axel Berkofsky adalah seorang Senior Policy Analyst European Policy Centre (EPC)

<sup>35</sup> Hyun Seok-Yu, “Explaining The Emergence Of New East Asian Regionalism: Beyond Power And Interest-Based Approaches,” dalam *Asian Perspective*, Volume 27, Nomor 1, 2003, hal. 278



comprised East Asians, and it must be built by East Asians”<sup>36</sup>. Namun kenyataannya dalam penyelenggaraan KTT 1 Asia Timur selain dihadiri anggota dari negara-negara di Asia Timur juga dihadiri pemimpin dari negara-negara di luar Asia Timur yaitu India, Australia dan Selandia Baru.<sup>37</sup>

Ada dua hal yang menjadi masalah dalam pembentukan EAC. Pertama, seperti yang telah disebutkan diatas yaitu kerancuan anggota EAC. Kedua, kekhawatiran terhadap dominasi Cina maupun Jepang. Hal ini cukup masuk akal mengingat dua negara tersebut merupakan negara maju. Akan tetapi hal ini dibantah oleh Prof. Yu Xintian<sup>38</sup> Cina tidak akan mendominasi dalam kerjasama regional ini karena tentu saja negara-negara lain akan menentangnya. Selain itu dalam menjalankan pembangunan dan modernisasi, Cina memegang konsep *peaceful rise*<sup>39</sup> yang diartikan Cina tidak akan menjadi kekuatan hegemon, jadi Cina bukanlah sebuah “wajah yang menakutkan” dalam pembangunan Asia<sup>40</sup>.

<sup>36</sup> Abdullah Ahmad Badawi, “Challenges On The Way To An East Asian Community,” dalam [http://www.nni.nikkei.co.jp/FR/NIKKEI/inasia/future/2006/2006\\_speechabdullah.html](http://www.nni.nikkei.co.jp/FR/NIKKEI/inasia/future/2006/2006_speechabdullah.html) diakses tanggal 16 Juni 2006

<sup>37</sup> Hyun Seok-Yu, *Loc. Cit*

<sup>38</sup> Profesor Yu Xintian adalah seorang Kepala Shanghai Institute of International Studies (SIIS) yang menyatakan pendapat ini dalam seminar publik CSIS pada 18 Januari 2005

<sup>39</sup> “An East Asia Community and The United States”, dalam [http://www.siiaonline.org/an\\_east\\_asia\\_community\\_and\\_the\\_united\\_states](http://www.siiaonline.org/an_east_asia_community_and_the_united_states), diakses tanggal 23 April 2006. *Peaceful Rise* merupakan Kebijakan Luar Negeri Cina yang diperkenalkan oleh Presiden Hu Jin Tao pada saat berkunjung ke Asia Tenggara pada Oktober 2003. Kebijakan ini merupakan bagian dari solusi Cina mengenai pertumbuhan ekonomi Cina yang terdiri dari ekonomi domestik Cina dan pasar internasional. Dan secara eksplisit konsep ini mencakup perdamaian dan jauh dari pencarian hegemoni. Cina sekarang ini merupakan bagian dari proses pembangunan dan stabilitas Asia secara keseluruhan. Robert W. Radtke, “China’s ‘Peaceful Rise’ Overshadowing US Influence In Asia?”, dalam <http://www.csmonitor.com/2003/1208/p09s01/-coop.html>, diakses tanggal 5 Mei 2006. Robert W. Radtke adalah seorang Wakil Kepala Asia Society

<sup>40</sup> *Ibid.*

Sementara Jepang merupakan aliansi<sup>41</sup> Amerika dan dalam regionalisme baru di Asia Timur peran Amerika berusaha di pinggirkan.

Meskipun terdapat beberapa keunikan dalam usaha mewujudkan EAC, perlu diakui bahwa langkah-langkah menuju terwujudnya EAC terus dilakukan sampai sekarang. Hal ini menyiratkan adanya keseriusan negara-negara di Asia Timur untuk menciptakan organisasi regional yang mandiri. Demi kepentingan penelitian ini maka penulis hanya menitikberatkan masalah pada kerancuan anggota peserta KTT 1 Asia Timur yang merupakan langkah untuk mewujudkan EAC, ternyata juga melibatkan negara-negara di luar wilayah Asia Timur seperti Australia, India dan Selandia Baru. Khususnya pada keikutsertaan Australia sebagai peserta dalam KTT tersebut, padahal pada awalnya Australia menunjukkan sikap yang menentang pembentukan organisasi regional di wilayah Asia Timur.

## **L2 RUMUSAN MASALAH**

Melihat fenomena yang telah disajikan pada latar belakang masalah diatas, maka keikutsertaan India, Australia dan Selandia Baru sebagai peserta dalam KTT 1 Asia Timur sebagai langkah untuk mewujudkan *East Asian Community* (EAC) menarik untuk diteliti. Namun dalam penulisan skripsi ini hanya fokus pada satu negara. Hal ini didasari dengan adanya sikap Australia yang pada awalnya menolak pembentukan organisasi regional di Asia Timur tiba-

---

<sup>41</sup> Shiraishi Takeshi, "The East Asian Community and Japan-U.S Relations," dalam <http://www.rieti.go.jp/en/events/bb1/05111501.html>, diakses tanggal 23 April 2006. Shiraishi Takeshi adalah seorang Wakil Presiden dan Profesor di National Graduate Institute for Policy Studies.

tiba berubah sikap dan ikut serta dalam pembentukan EAC yang ditunjukkan dengan menjadi peserta dalam KTT 1 Asia Timur di Malaysia pada tanggal 14 Desember 2005.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini fokus pada pertanyaan: Mengapa Australia terlibat dalam pembentukan *East Asian Community* (EAC)?

### **L3 TUJUAN PENELITIAN**

1. mengetahui perkembangan *East Asian Community* (EAC) mulai kemunculan ide pembentukan sampai diselenggarakannya KTT 1 Asia Timur pada tanggal 14 Desember 2005 di Malaysia
2. mengetahui alasan yang mendasari perubahan sikap Australia yang pada awalnya menolak pembentukan organisasi regional Asia Timur menjadi terlibat dalam pembentukan *East Asian Community* (EAC)

### **L4 KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **L4.1 Peringkat Analisis**

Peringkat analisis merupakan alat yang dibutuhkan untuk membantu menjawab suatu permasalahan. Setiap peringkat analisis memberikan kerangka kerja untuk menggambarkan fenomena yang diteliti dan juga membantu untuk mengetahui sebab akibat dari suatu peristiwa.<sup>42</sup> Menurut Mohtar Mas'ood, peringkat analisis digunakan untuk mempermudah penjelasan suatu peristiwa internasional dan membantu memilah faktor mana yang paling banyak

---

<sup>42</sup> Barry Buzan dan Richard Little, *International Systems In World History, Remaking The Study Of International Relations*, (New York: Oxford University Press, 2000), hal.70

ditekankan, serta dampak dari faktor-faktor tersebut maupun kumpulan faktor lain terhadap suatu fenomena.<sup>43</sup>

Dalam hal memilih peringkat analisis, ditetapkan unit analisis dan unit eksplanasi. Unit analisis adalah unit yang perilakunya dideskripsikan, dijelaskan dan diramalkan. Unit analisis disebut juga "variabel dependen". Sedangkan unit eksplanasi adalah unit yang pengaruhnya terhadap unit analisis dijelaskan. Unit eksplanasi disebut juga dengan "variabel independen".<sup>44</sup> Jadi unit eksplanasi merupakan faktor yang mempengaruhi unit analisis.

Menurut Patrick L. Morgan terdapat lima peringkat analisis, yaitu individu, negara bangsa, kelompok negara bangsa dan sistem internasional.<sup>45</sup>

#### 1. Individu

Tingkat individu ini menjelaskan bahwa fenomena hubungan internasional merupakan akibat dari perilaku individu-individu yang saling berinteraksi. Jadi dalam memahami hubungan internasional diharuskan menelaah dari sikap dan perilaku tokoh-tokoh utama pembuat keputusan, seperti kepala pemerintahan, menteri luar negeri, dan penasihat keamanan

#### 2. Kelompok Individu

Dalam tingkat analisis ini, ilmuwan berasumsi bahwa individu pada umumnya melakukan tindakan internasional dalam suatu kelompok. Hal ini disebabkan oleh hubungan internasional yang merupakan

---

<sup>43</sup> Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, edisi revisi (Jakarta: LP3ES, 1990), hal.36-39

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal.35

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal 45-48

hubungan antar kelompok kecil di berbagai negara. Jadi peristiwa internasional ditentukan oleh kelompok kecil seperti kabinet dan dewan penasihat keamanan, bukan ditentukan oleh individu. Karena itu untuk memahami hubungan internasional harus mempelajari perilaku dari kelompok-kelompok kecil dan organisasi yang terlibat

### 3. Negara Bangsa

Tingkat analisis ini menekankan bahwa semua pembuat keputusan dimanapun berada, pada dasarnya berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama. Analisis negara bangsa seharusnya diarahkan pada perilaku unit negara bangsa karena hubungan internasional didominasi oleh perilaku negara bangsa. Dengan kata lain mempelajari proses pembuatan keputusan tentang hubungan internasional, yaitu politik luar negeri oleh suatu negara sebagai unit yang utuh

### 4. Kelompok Negara Bangsa

Analisis kelompok negara bangsa beranggapan bahwa seringkali negara-negara tidak bertindak secara sendiri-sendiri tetapi sebagai suatu kelompok. Hubungan internasional merupakan interaksi yang membentuk pola dan pengelompokan. Jadi unit analisis yang ditelaah adalah pengelompokan negara-negara seperti pengelompokan regional, aliansi, persekutuan ekonomi dan perdagangan





## 5. Sistem Internasional

Sistem internasional ini berpendapat bahwa negara bangsa di dunia ini dan interaksi diantara mereka merupakan suatu sistem. Sistem sebagai lingkungan telah menentukan perilaku negara bangsa. Sistem internasional dianggap sebagai penyebab terjadinya perilaku negara bangsa, maka ditekankan untuk mempelajari sistem. Pengetahuan tentang dinamika sistem yang beranggotakan berbagai negara bangsa bisa dipakai untuk menjelaskan perilaku aktor-aktor hubungan internasional

Berdasarkan uraian Patrick L. Morgan tersebut maka penelitian ini unit eksplanasinya (variabel independen) adalah Australia sebagai negara bangsa, karena penelitian ini berusaha untuk menjawab alasan apa yang mendasari Australia terlibat dalam pembentukan *East Asian Community* (EAC). Dalam unit analisis negara bangsa, negara memiliki kebebasan untuk menerapkan suatu kebijakan. Hal ini didasari pandangan bahwa apa yang terjadi pada sistem internasional merupakan aksi-reaksi aktor-aktor negara. Analisis negara bangsa melihat suatu reaksi yang dilakukan suatu negara bergantung pada faktor-faktor internal negara tersebut.<sup>46</sup>

Sedangkan unit analisis (variabel dependen) dalam penelitian ini adalah EAC sebagai kelompok negara bangsa yang mempengaruhi sikap Australia. Kelompok negara bangsa merupakan kelompok unit yang terdapat di dalam sistem internasional dan dapat dibedakan dari sistem secara keseluruhan dengan

---

<sup>45</sup> John T. Rourke dan Mark A. Bayer, *World Politics, International Politics On The World Stage Brief*, 2<sup>nd</sup> Edition (USA: Dushkin/McGraw-Hill, 1998), hal. 60-61

melihat intensitas interaksi maupun ketergantungan antara satu dengan yang lain baik yang berdasarkan wilayah maupun yang bukan berdasar wilayah.<sup>47</sup>

## 1.4.2 Konsep Dan Teori

Dalam usaha untuk menjawab pertanyaan serta memenuhi tujuan penelitian yang telah disebutkan diatas maka penulis menggunakan beberapa teori dan konsep sebagai berikut:

### 1.4.2.1 Regionalisme Baru

Regionalisme baru<sup>48</sup> terbentuk pada sistem internasional yang multipolar (setelah tahun 1990an), lebih komprehensif dan melalui proses multidimensional.<sup>49</sup> Selain itu jika pada regionalisme lama lebih difokuskan pada satu tujuan tertentu maka seiring dengan arus globalisasi maka pada regionalisme baru meliputi beberapa tujuan. Suatu contoh, organisasi regional yang hanya didirikan untuk bertahan dari serangan pihak asing, maka organisasi ini bekerjasama dalam hal pertahanan dan keamanan.

Hal ini secara eksplisit tertuang dari pendapat Björn Hettne “the new regionalism [...] is a multidimensional form of integration which includes economic, political, social, and cultural aspects and thus goes far beyond the goal

---

<sup>47</sup> Barry Buzan dan Richard Little, *Op.Cit.*, hal. 69. Mereka membagi level analisis menjadi lima bagian, yaitu pertama sistem internasional yang merupakan sistem level paling luas, tidak ada sistem level diatasnya. Kedua, subsistem internasional yaitu kelompok unit baik berdasarkan seperti ASEAN dan OAU maupun yang bukan seperti OPEC. Ketiga, unit merupakan entitas yang membentuk organisasi, komunitas seperti para pembuat kebijakan. Keempat, subunit, merupakan kelompk organisasi yang mempengaruhi unit seperti birokrat maupun kaum lobi. Kelima, individu yang merupakan tingkatan paling bawah dalam analisis ilmu sosial.

<sup>48</sup> Istilah Regionalisme Baru pertama kali diungkapkan oleh Norman Palmer tahun 1991

<sup>49</sup> “Regionalism in International Relations Theory” dalam [http://www.publications.fabriziotassinari.net/downloads/Chapter\\_One.pdf](http://www.publications.fabriziotassinari.net/downloads/Chapter_One.pdf), hal.17 diakses tanggal 6 Agustus 2006



of creating region-based free trade regimes or security alliances".<sup>50</sup> Bahkan, regionalisme lama didirikan untuk menghadapi ancaman eksternal sementara perkembangan regionalisme baru, bahwa organisasi regional didirikan berdasarkan komitmen bersama untuk menyebarkan hak asasi manusia, demokrasi, lingkungan dan keadilan sosial.<sup>51</sup>

Allan Wallis juga mengungkapkan pendapatnya mengenai regionalisme baru yang digunakan penulis untuk melengkapai pendapat sebelumnya. Menurutnya regionalisme baru dalam memandang batas-batas lebih terbuka artinya bersifat tidak kaku.<sup>52</sup> Dengan kata lain regionalisme sekarang ini *less sovereignty bound*. Hal ini akan semakin memudahkan untuk menciptakan kerjasama lintas negara. Implikasi lain dari batas yang elastis ini adalah terdapat beberapa negara yang menjadi anggota lebih dari satu organisasi regional. Kerjasama yang terjalin pun tidak terbatas pada antar negara-negara yang memiliki kekuatan seimbang akan tetapi bisa terjadi antara negara berkembang dengan negara maju.<sup>53</sup>

Dari penjelasan tersebut, maka yang dijadikan kerangka dalam regionalisme baru adalah dinamika perekonomian termasuk perdagangan. Jenis perdagangannya juga mengalami perluasan. Jika pada regionalisme lama hanya

<sup>50</sup> Rodrigo Tavares, United Nations University-Comparative Regional Integration Student e-Working Papers, "The State of The Art of Regionalism, The Past, Present and Future of Discipline", dalam <http://www.cris.unu.edu/admin/documents/WProdigo%20tavares.pdf> , hal 10 diakses tanggal 6 Agustus 2006

<sup>51</sup> Amitav Acharya, Regionalism and The Emerging World Order: Sovereignty, Autonomy, Identity pada CSGR (Centre For The Study of Globalisation and Regionalisation) 3<sup>rd</sup> Annual Conference After The Global Crises: What Next For Regionalism? dalam [http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/activitiesnews/conferences/1999\\_conferences/3rdannualconference/papers/Acharya.pdf](http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/activitiesnews/conferences/1999_conferences/3rdannualconference/papers/Acharya.pdf), hal 13-14, diakses tanggal 28 Agustus 2006

<sup>52</sup> Allan Wallis, "The New Regionalism", dalam [http://www.munimall.net/eos/2002/wallis\\_regionalism.ncl](http://www.munimall.net/eos/2002/wallis_regionalism.ncl) diakses tanggal 26 Agustus 2006

<sup>53</sup> [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/region\\_e/region\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm) diakses tanggal 24 Juli 2006

terbatas pada komoditas perdagangan barang, maka pada regionalisme baru juga terdapat aliran investasi asing yang disertai adanya transfer teknologi dan ilmu pengetahuan.<sup>54</sup> Pada intinya perdagangan yang terjadi merupakan bentuk perdagangan bebas. Untuk mendukung kerjasama tersebut dan untuk memfasilitasi proses regionalisme maka diusahakan didirikan suatu organisasi regional.

Konsep regionalisme baru ini dijadikan "payung" untuk menganalisis fenomena kemunculan organisasi regional di Asia Timur. Artinya seluruh analisis dalam penelitian ini terangkum dalam kerangka konsep regionalisme baru. Berkaitan dengan *East Asian Community* (EAC) maka penggunaan konsep ini oleh penulis dirasa cukup signifikan untuk menjelaskan jenis organisasi regional di Asia Timur. Selain itu, bisa menjelaskan peran negara-negara yang terlibat dalam pembentukan organisasi regional. Bagaimana suatu negara yang berada di luar dapat ikut bergabung dalam organisasi regional tersebut menjadi suatu hal yang menarik untuk ditinjau lebih dalam.

#### 1.4.2.2 Teori *Region-Building*

Setelah sistem bipolar mengalami kemunduran dengan berakhirnya Perang Dingin, situasi sistem internasional mengalami perubahan. Hal ini mengakibatkan kekuatan dunia tidak hanya bertumpu pada dua blok yang saling bersaing, yaitu antara Amerika Serikat dan Uni Soviet akan tetapi menjadi multipolar. Selain itu, pada masa Perang Dingin hanya negara, bahkan negara dengan kekuatan besar

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

yang dapat mempengaruhi kondisi internasional yang diakui sebagai aktor internasional. Sementara negara-negara lemah terpinggirkan.

Namun hal tersebut berubah. Seiring perkembangan teknologi dan perekonomian, arus globalisasi semakin meluas maka negara-negara lemah tidak lagi diabaikan. Ketika mereka bergabung untuk membentuk kelompok dalam wilayah tertentu, saat itulah posisi mereka tidak mudah untuk diabaikan. Dengan kata lain wilayah juga merupakan subyek internasional.

Keberadaan suatu wilayah bisa dibangun dan bisa dirubah. Hal ini sesuai pendapat Joseph Nye yang menyatakan bahwa batasan merefleksikan kekuatan, norma dan kepentingan dari para pemimpin politik.<sup>55</sup> Ditambahkan olehnya bahwa "regions are what politician and people want it to be."<sup>56</sup>

Sementara itu dalam kaitannya terhadap pembentukan suatu wilayah John Gerard Ruggie menyatakan:

The building blocks of international reality are ideational as well as material; that ideational factors have normative as well as instrumental dimensions; that they express not only individual but also collective intentionality; and that the meaning and significance of ideational factors are not independent of time and place<sup>57</sup>

Pernyataan tersebut mendasari teori pembentukan wilayah ini. Neumann menyebutkan, bahwa budaya, ekonomi, geografi dan sejarah merupakan hal-hal yang dibutuhkan untuk membentuk suatu wilayah. Dalam pemahaman para ilmuwan Hubungan Internasional, proses pembentukan wilayah (*region-building*) terdiri dari tiga tahap yaitu:

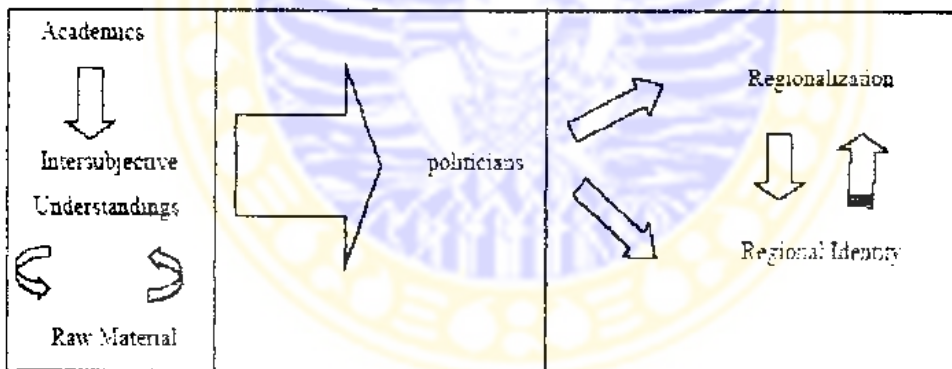
<sup>55</sup> Peter J. Katzenstein, "Regionalism in Comparative Perspective", dalam <http://www.arena.uio.no/publications/wp96.1.htm> diakses tanggal 14 Agustus 2006

<sup>56</sup> Hilde Dominique Engelen, "Construction of Region in The Baltic Sea" dalam <http://www.sgir.org/conference2004/papers/Engelen>, hal 8 diakses tanggal 16 Agustus 2006 8

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 7

- Pertama *epistemic communities*, yang meliputi komponen ide dan materi (ekonomi, geografi dan sejarah).
- Kedua, *regional vision*, artinya menyatukan komponen-komponen tersebut yang dilakukan oleh para politisi
- Ketiga merupakan *social magic*, yaitu para pengambil keputusan politik yang bersepakat mengenai pembentukan wilayah. Para politisi dipercaya sebagai aktor pokok dalam mengkomunikasikan ide wilayah karena mereka memiliki *power* (kekuasaan) untuk mewujudkan ide tersebut. Alur *region-building* tersaji dalam skema 1 berikut:

Skema 1.1

Skema *Region-Building*

Sumber: <http://www.sgjr.org/conference2004/papers/Engelen> diakses tanggal 16 Agustus 2006

Dari skema tersebut, pada kotak paling kiri merupakan tahap pertama pembentukan wilayah. Tahap pertama tersebut merupakan tahap pemahaman yang dilakukan oleh para akademisi terhadap ide dan materi yang merupakan dua faktor penting untuk membentuk suatu wilayah. Kemudian kotak yang di tengah menunjukkan peran para politisi maupun para pembuat kebijakan dalam

mengkomunikasikan pemahaman dari kaum akademisi untuk dicapai kesepakatan bersama. Sementara pada kotak paling kanan menunjukkan proses regional untuk mencapai identitas wilayah.

Finn Anssi Paasi mengungkapkan bahwa wilayah merupakan suatu struktur yang terbentuk berdasarkan batas teritorial, simbol dan pembentukan organisasi. Ditambahkan pula terdapat empat tahap sosial untuk membentuk suatu *region*, yaitu asumsi bentuk teritorial, pembentukan konseptual (simbol) , format organisasi regional, dan pembentukan sebagai satu entitas dan kesadaran sosial dalam masyarakat.<sup>58</sup> Kesadaran sosial menjadi tahap yang perlu diperhatikan karena dalam regionalisme baru tidak lagi *state centric* akan tetapi terdapat praktek-praktek sosial yang diarahkan pada penguatan masyarakat sosial (*civil society*).

Berdasarkan hal tersebut maka tidak hanya sekedar subsistem yang dibatasi oleh geografi. Menurut Peter J. Katzenstein tidak ada yang sifatnya *given* atau *natural* artinya tidak ada yang tiba-tiba ada. Terdapat tiga cara dalam membentuk wilayah yaitu<sup>59</sup>:

1. *Shared characteristics*

Suatu wilayah diidentifikasi oleh karakteristik bersama yang bisa dilihat dari bahasa maupun budaya seperti, bentuk pemerintahan, maupun daerah-daerah yang dialiri lembah sungai

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 8

<sup>59</sup> Barry Buzan, *Op.Cit.*, hal 70-73



## 2. *Patterned interaction*

Wilayah diidentifikasi oleh interaksi antar komponen yang terdiri dari :

- jenis interaksi

suatu wilayah dibentuk berdasarkan jenis interaksi apakah interaksi militer, interaksi ekonomi, perdagangan, investasi, teknologi, interaksi budaya, maupun percampuran antara ekonomi, politik dan militer

- aspek interaksi

merupakan sikap dari interaksi tersebut, apakah interaksi yang terjadi dalam kondisi netral, bersahabat dan *co-operative* (kerjasama), kompetitif, bermusuhan bahkan konfliktual. Jadi wilayah bisa dibentuk dalam keadaan konflik maupun mengalami perasaan tidak aman (terancam)

- intensitas interaksi

yaitu seberapa *intens* (sering) interaksi yang terjadi. Semakin tinggi tingkat intensitas maka semakin memiliki kekuatan untuk disebut sebagai wilayah

- Isi dari wilayah

Artinya negara apa saja yang tergabung dalam wilayah tersebut yang dibentuk berdasarkan interaksi yang terjadi. Pada dasarnya suatu wilayah akan *exist* dengan batas-batas

yang sengaja dibentuk dan dengan jelas membedakannya dengan wilayah lain dalam sistem internasional

### 3. *Shared perception*

Merupakan kondisi yang diperlukan agar suatu wilayah tetap *exist*. Jika orang berpikir bahwa suatu wilayah itu ada dan kemudian membicarakannya sebagai suatu hal yang nyata maka wilayah itu memang ada. Selain itu, tidak hanya wilayah yang berdasar interaksi kerjasama dan integrasi yang mampu bertahan akan tetapi wilayah yang dibentuk berdasar konflik seperti *balance of power* dapat tetap *exist* tanpa ada pernyataan untuk membentuk suatu wilayah

Dari penjelasan diatas maka wilayah dipahamai sebagai sesuatu yang *non given*, artinya kemunculan suatu merupakan hasil konstruksi sosial. Implikasi dari pemahaman mengenai inilah yang memberi legalitas satu negara untuk menjadi anggota lebih dari satu organisasi regional.<sup>60</sup> Keterlibatan satu negara dalam beberapa organisasi regional menunjukkan negara berhak memilih berada di wilayah mana negara tersebut tinggal berdasarkan perhitungan negara yang bersangkutan. Teori ini juga bermanfaat untuk menganalisis apakah dalam usaha pembentukan EAC juga terdapat usaha untuk membangun suatu wilayah baru. Artinya keikutsertaan Australia dalam organisasi Asia Timur merupakan usaha Australia untuk menjadi bagian dari wilayah Asia Timur.

<sup>60</sup> Shaun Breslin, Richard Higgot, Ben Rosamond, "Region In Comparative Perspective", dalam <http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/research/workingpapers/2002/wp10702.pdf> diakses tanggal 28 Agustus 2006

### L4.2.3 Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan tujuan serta faktor yang paling menentukan yang mengarahkan para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri.<sup>61</sup> Dalam ungkapan yang lebih sederhana, Hans J. Morgenthau menyatakan bahwa tujuan-tujuan kebijakan luar negeri harus didefinisikan dalam kerangka kepentingan nasional.<sup>62</sup> Atau dengan kata lain, kepentingan nasional adalah hal yang mendasari kebijakan luar negeri suatu bangsa.

Kepentingan nasional merupakan konsep umum, namun tetap merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi suatu negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi. Konsep kepentingan nasional juga menjadi hal penting dalam menggambarkan, dan menjelaskan perilaku suatu negara dalam sistem internasional. Ini dikarenakan kepentingan nasional dijadikan pertimbangan atas perilaku suatu negara.<sup>63</sup> Dalam pembuatan kepentingan nasional harus disesuaikan dengan potensi negara tersebut. Secara implisit dinyatakan oleh Michael G Roskin "If you don't have the power, don't declared something distant to be your interest".<sup>64</sup>

Kepentingan nasional merupakan kepentingan masyarakat suatu negara yang kemudian diformulasikan oleh para pembuat keputusan pada tingkat

<sup>61</sup> Graham Evans dan Jeffrey Newnham, *The Penguin Dictionary of International Relations* (London: Penguin Group, 1998), hal. 344-345.

<sup>62</sup> Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, edisi revisi ke 4 (New York: Alfred A. Knopf, 1978), hal. 553.

<sup>63</sup> Bruce Russett dan Harvey Starr, *World Politics The Menu For Choice*, Edisi Kedua (New York: W.H. Freeman and Company, 1985), hal. 205

<sup>64</sup> Michael G. Roskin, "National Interest: From Abstraction to Strategy", hal. 5 dalam <http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub356.pdf> diakses tanggal 11 September 2006

tertinggi di suatu negara.<sup>65</sup> Kepentingan tersebut biasanya berwujud pada ketahanan fisik, kesejahteraan ekonomi, kedaulatan politik, militer maupun budaya.<sup>66</sup> Namun kepentingan nasional yang telah dirumuskan oleh para pembuat keputusan tidaklah merupakan hal yang statis, akan tetapi komponen dari kepentingan tersebut bisa berubah sesuai dengan situasi politik yang terjadi di dalam negeri maupun pada lingkup internasional. Jadi kepentingan nasional merupakan hal yang fluktuatif.<sup>67</sup>

Sementara itu Hans J. Morgenthau menyamakan kepentingan nasional dengan pengejaran kekuasaan suatu negara yang akan mengarah pada kontrol suatu negara terhadap negara lain. Artinya untuk dapat melakukan kontrol terhadap negara lain, suatu negara harus memiliki potensi yang melebihi potensi negara lain. Kontrol negara ini bisa diwujudkan melalui cara-cara kekerasan maupun kerjasama.<sup>68</sup> Ditambahkan olehnya bahwa kepentingan dan kekuasaan merupakan hal yang abstrak sehingga tidak bisa dan seharusnya tidak dikuantifikasikan.<sup>69</sup> Oleh karena itu kepentingan nasional tidak murni suatu formulasi ilmiah atau bisa diterjemahkan dalam matematika akan tetapi muncul dari ambisi, motivasi, kebutuhan dan permintaan demi memperoleh keuntungan bagi negara.

<sup>65</sup> Martin Griffiths dan Terry O'Callaghan, *International Relations: The Key Concepts*, (London: Routledge, 2002), hal. 203

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Thomas W. Robinson, "National Interest", dalam James N. Rosenau (ed.), *International Politics And Foreign Policy a reader in research and theory*, Edisi Revisi (New York: The Free Press, 1969), hal. 184

<sup>68</sup> Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfe, "National Interest and Other Interest," dalam Theodore A. Coulombis *et al.*, *Introduction to International Relations Power and Justice* (New Delhi: Prentice Hall of India Private Limited, 1981), hal. 74-75

<sup>69</sup> *Ibid*

Agar lebih memahami kepentingan nasional suatu negara maka Robinson dengan rujukan dari Hans Morgenthau membagi kepentingan nasional menjadi enam kategori. Kategori tersebut adalah.<sup>70</sup>

- **Kepentingan Utama (*primary interests*)**  
Yaitu kepentingan yang melibatkan perlindungan terhadap kondisi fisik, politik, dan identitas budaya suatu negara
- **Kepentingan Kedua (*secondary interests*)**  
Yaitu kepentingan yang berada di luar kepentingan utama namun memberi kontribusi bagi tercapainya kepentingan utama
- **Kepentingan Tetap (*permanent interests*)**  
Yaitu kepentingan yang tetap, berlaku untuk waktu yang relatif lama
- **Kepentingan Variabel (*variable interests*)**  
Yaitu kepentingan yang diberikan suatu negara pada waktu tertentu untuk memberikan sikap terhadap suatu peristiwa
- **Kepentingan Umum (*general interests*)**  
Yaitu kepentingan yang dilakukan suatu negara untuk memperluas area geografi, maupun terhadap hal-hal seperti peningkatan ekonomi, perdagangan, diplomasi dan hukum internasional
- **Kepentingan Khusus (*specific interests*)**  
Yaitu kepentingan yang berlaku pada suatu waktu sebagai bentuk perkembangan kepentingan umum

---

<sup>70</sup> *Ibid.* hal. 184-185



Sesuai dengan penjelasan diatas maka penyusunan kepentingan nasional bagi suatu negara disesuaikan dengan kebutuhan negara tersebut. Pada intinya kepentingan tersebut dilakukan dalam upaya untuk mensejahterakan kehidupan bangsa. Jika suatu waktu kondisi bangsa menginginkan adanya peningkatan ekonomi sementara perekonomian dalam negeri belum mampu mencukupinya maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengusahakan pencapaian hal tersebut melalui hubungan dengan negara luar. Kondisi yang sama juga terjadi pada bidang-bidang yang lain.

Senada dengan Robinson, menurut Nuechterlein agar dapat mendefinisikan kepentingan tersebut masih dibutuhkan definisi-definisi tambahan tentang kepentingan dasar dari negara-bangsa, yaitu kebutuhan-kebutuhan nasional yang menjadi dasar dari kebijakan-kebijakan nasional. Berikut ini empat kepentingan fundamental yang dimaksud :<sup>71</sup>

1. **Kepentingan Pertahanan (*Defense interest*)**

Yaitu kepentingan untuk melindungi negara-bangsa dan rakyatnya dari ancaman kekerasan fisik yang dilakukan oleh negara lain ataupun suatu ancaman yang berasal dari luar terhadap sistem politik nasional.

2. **Kepentingan Ekonomi (*Economic Interest*)**

Merupakan kepentingan untuk meningkatkan ekonomi suatu negara bangsa dalam berhubungan dengan negara lain

---

<sup>71</sup> Donald E. Nuechterlein, "The Concept of National Interest: A Time for New Approaches", dalam *Orbis: A Journal of World Affairs*, Vol. 23, No. 1, Musim Semi, 1979, hal. 76.

3. *World-order interest*

Adalah kepentingan untuk memelihara suatu sistem politik dan ekonomi internasional di mana di dalamnya negara-bangsa dan rakyatnya dapat merasa aman serta perdagangan dapat beroperasi secara aman di luar batas nya.

4. *Kepentingan Ideologi (Ideological interest)*

Yaitu kepentingan untuk melindungi dan memajukan seperangkat nilai yang dianut oleh masyarakat suatu negara-bangsa yang percaya akan kebenarannya secara universal.

Terdapat beberapa penjelasan berkaitan dengan hubungan di antara keempat macam kepentingan di atas. Pertama, urutan tersebut tidak menunjukkan prioritas antara satu dengan yang lain. Kedua, keempat macam kepentingan tersebut tidak bersifat saling terpisah dan para pembuat keputusan harus bisa melakukan pertukaran dari masing-masing kepentingan sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung.

Ketiga, ideologi suatu bangsa membantu suatu bagian penting dari kepentingan nasionalnya yang meski mungkin tidak sekuat ketiga kepentingan dasar yang lain, akan tetapi tetap penting dalam menentukan bagaimana pemerintah bereaksi terhadap isu-isu internasional.

Pembahasan mengenai kepentingan nasional menjadi relevan dalam penelitian ini karena dalam lingkungan kebijakan domestik dan internasional, Australia dan negara-negara lain anggota *East Asian Community* sebagai aktor akan bersinggungan dengan berbagai kepentingan, terutama kepentingan

ekonomi, politik dan keamanan. Jadi Konsep Kepentingan Nasional bermanfaat dalam menjawab permasalahan penelitian ini adalah untuk mengkategorisasikan atau menunjukkan kepentingan Australia dalam pembentukan EAC.

Dalam hal ekonomi, perdagangan menjadi hal penting sebagai sarana untuk memasuki pasar bebas. Hal ini dengan tegas di sampaikan oleh Mark Veile, “we must work hard and creatively to increase market access for our exporters”.<sup>72</sup> Dengan mendukung pembentukan *East Asian Community*, kerjasama dengan negara-negara lain di Asia Timur yang belum menyepakati tentang FTA, bisa diakomodasi melalui organisasi regional ini. Hal ini yang menjadi celah bagi tercapainya kepentingan Australia.

Keikutsertaan Australia terhadap pembentukan EAC juga diarahkan untuk pencapaian kepentingan politik dan keamanan. Kekhawatiran Australia terhadap bahaya terorisme dan ancaman senjata nuklir menjadi pemicu terhadap keterlibatan Australia dalam pembentukan EAC. Dengan ikut terlibat dalam pembentukan EAC, maka Australia dapat bekerjasama dengan negara-negara lain di Asia Timur meskipun menganut sistem politik yang berbeda untuk menangani hal ini secara lebih mendalam dan untuk menciptakan iklim hubungan yang harmonis antar negara untuk mencapai kesejahteraan bagi *Australia and Australian*.<sup>73</sup>

<sup>72</sup> “Trade-Securing Our Future” dalam [www.trademinister.gov.au/speeches/2005/050413\\_trade2005.html](http://www.trademinister.gov.au/speeches/2005/050413_trade2005.html) diakses tanggal 29 September 2006. Pidato ini disampaikan oleh Deputy Utama, Menteri Perdagangan Australia, Mark Vaile

<sup>73</sup> “The Australian-Japan Partnership – Growing Stronger Together” dalam [http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2005/50322\\_jipa.html](http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2005/50322_jipa.html) diakses tanggal 1 Oktober 2006. Pidato ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer

#### 1.4.2.4 *Security Community*

Konsep *Security Community* berawal dari pendapat Karl Deutsch pada tahun 1957 yang menyatakan bahwa untuk mengakhiri keadaan yang timpang dalam sistem internasional yang anarki, suatu negara harus mentransformasikan sistem yang anarki tersebut dengan membangun suatu norma-norma yang tegas sebagai panduan berkompetisi secara damai.<sup>74</sup> Namun konsep tersebut oleh Emanuel Adler dan Michael Barnett dianggap kurang jelas dan sulit untuk dipahami. Oleh karena itu pada tahun 1998, mereka menyempurnakan pendapat Deutsch, bahwa “anarchy is transformed as a security community is formed through the development of a common identity generated by increased transaction, the development of institutions, and mutual trust”.<sup>75</sup> Artinya, suatu *security community* diwujudkan dalam pembangunan suatu institusi yang didalamnya memuat proses transaksi yang saling menguntungkan.

Selain itu dalam *security community* memuat makna konstruksi sosial, dalam hal ini adalah *community*. Menurut Adler dan Barnett, *community* memiliki tiga karakter yaitu pembagian identitas dan nilai-nilai bersama, terdapat hubungan langsung, serta menunjukkan adanya kepentingan dalam jangka panjang.<sup>76</sup> Jadi dalam *security community* terdapat dua hal penting yaitu institusi dan proses sosial yang kedua hal ini mampu memberikan kontribusi dalam menciptakan

<sup>74</sup> Comelia Beyer, “ A Presentation of Emanuel Adler’s Concepts of Integration”, *Alternatives: Turkish Journal of International Relation*, Volume 4, Nomor 3, Musim Gugur 2005 dalam <http://www.alternativesjournal.net/volume4/number3/beyer.pdf> diakses tanggal 22 Januari 2006

<sup>75</sup> Veronica M. Kitchen, “ Identity Change in the Atlantic Security Community,” dalam <http://www.iir.ubc.ca/Papers/Kitchen%20CIR%2030%20Nov.pdf> diakses tanggal 22 Januari 2006

<sup>76</sup> <http://www.alternativesjournal.net/volume4/number3/beyer.pdf>, *Loc.Cit*



perdamaian yang stabil. Dengan kata lain adanya hubungan yang harmonis antar negara anggota suatu wilayah akan mempermudah terciptanya perdamaian.<sup>77</sup>

Tujuan utama dari *security community* adalah mencegah terjadinya kekerasan maupun perang antar negara. Dalam kondisi sistem internasional yang anarki setiap negara berusaha untuk mempertahankan dan mencapai kepentingannya sendiri, namun dalam kerangka *security community* kepentingan keamanan ini akan dikerjasamakan atau setidaknya akan dikoordinasikan dengan negara lain.<sup>78</sup> Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *security community* diharapkan mampu meningkatkan interaksi antar negara sehingga meningkatkan ketergantungan yang pada akhirnya menuju pada tahap integrasi.

Konsep *security community* dalam penelitian ini digunakan untuk menelaah kepentingan Australia dalam hal keamanan. Seperti telah di sebutkan sebelumnya, EAC merupakan organisasi yang terdiri dari kumpulan negara-negara di wilayah Asia Timur. Hal ini berarti dengan terlibat dalam pembentukan EAC, Australia menjadi bagian dari komunitas Asia Timur dan memiliki peran dalam menciptakan perdamaian dan keamanan wilayah. Kondisi ini tentunya sangat mendukung proses interaksi Australia dengan negara-negara lain di wilayah Asia Timur. Dengan adanya lingkungan yang aman dan damai maka akan semakin memudahkan pencapaian kepentingan Australia di bidang yang lain, karena pada dasarnya kondisi yang aman menjadi pijakan untuk meneruskan kepentingan nasional suatu negara.

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> Veronica M. Kitchen., *Loc.Cit.*



## 1.5 HIPOTESIS

Dengan memahami kerangka pemikiran yang telah dijelaskan di atas maka ketertarikan Australia pada EAC didasari oleh keinginannya untuk mewujudkan regionalisme baru dan menjadi bagian dari wilayah Asia Timur. Keterlibatan Australia, sekalipun masih dalam tahap *epistemic community* diharapkan menjadi ajang perluasan kepentingan perdagangan dan investasi.

Selain itu, untuk mendukung proses perdagangan dan investasi yang baik tersebut, maka diperlukan lingkungan yang kondusif. Hal ini dapat dicapai dengan terciptanya rasa aman dalam melakukan transaksi. Keterlibatan Australia dalam pembentukan EAC didasarkan pada kepentingan untuk menciptakan *security community* yang berorientasi pada pencegahan kekerasan dan perang antar negara. Dengan demikian keterlibatan Australia dalam EAC didasarkan pada pencapaian kepentingan kemakmuran dan keamanan.

## 1.6 METODOLOGI

### 1.6.1 Definisi Konseptual

#### 1.6.1.1 Asia Timur

Memberikan definisi Asia Timur yang tegas sangat sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan tidak ada konsensus yang telah dicapai dalam memberi batasan dan definisi Asia Timur.<sup>79</sup> Bahkan dalam istilah sehari-hari Asia bisa di bagi dari barat daya Asia termasuk India dan Pakistan dan membentang vertikal dari Siberia di utara dan Oceania di selatan.

<sup>79</sup> Youngmin Kwon, *Regional Community-Building in East Asia*, (Yonsei: Yonsei University Press, 2002). Hal. 19-20

### 1.6.1.3 Kepentingan Politik Keamanan

Kepentingan politik, sebagai salah satu elemen kepentingan nasional, memiliki posisi yang vital. Tujuan-tujuan kepentingan nasional yang merujuk pada isu-isu politik dan keamanan atau isu-isu strategis dikenal sebagai isu-isu “*high politics*”.<sup>85</sup> John Spanier mendefinisikan kepentingan politik secara sederhana sebagai kepentingan suatu negara untuk bebas dari kemungkinan ancaman militer eksternal.

### 1.6.2 Definisi Operasional

#### 1.6.2.1 Asia Timur

Berdasarkan definisi Asia Timur yang telah dijelaskan diatas, demi kepentingan penelitian maka Asia Timur meliputi Asia Timur Laut dan Asia Tenggara. Negara-negara yang tergabung dalam *region* Asia Timur terdiri dari:

- Asia Tenggara: Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam, Philipina, Indonesia, Laos, Kamboja dan Myanmar
- Asia Timur Laut: Korea Selatan, Korea Utara, China, Jepang dan Taiwan

---

<sup>85</sup> John Spanier, *Loc.Cit.*

### **1.6.2.2 Kepentingan Ekonomi**

Berdasarkan definisi konseptual kepentingan ekonomi maka dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis menetapkan indikator-indikator kepentingan ekonomi Australia sebagai berikut:

- Bebas ancaman ekonomi dari negara lain
- Lingkungan bisnis yang kondusif
- Peningkatan nilai ekspor perdagangan
- Terintegrasinya suatu pasar bersama
- Peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran melalui pertumbuhan hasil produksi dalam negeri

### **1.6.2.3 Kepentingan Politik Keamanan**

Untuk melakukan pengukuran terhadap politik dan keamanan secara terpisah sulit dilakukan maka dalam penelitian ini kedua hal tersebut merupakan satu usaha untuk mewujudkan satu kepentingan, yaitu terciptanya keamanan. Kepentingan politik keamanan Australia bisa diukur melalui indikator sebagai berikut:

- Keterjagaan integritas nasional
- Keamanan dalam melakukan interaksi dengan negara lain
- Peningkatan peran dalam usaha penciptaan keamanan internasional sebagai bagian dari komunitas internasional

### 1.6.3 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah eksplanatif, yaitu menganalisis dan menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel yang ada melalui pengujian hipotesis.<sup>86</sup> Variabel-variabel yang dimaksud ialah sikap Australia terhadap *East Asian Community* (EAC). Dalam penelitian ini tipe eksplanatif digunakan dalam upayanya menjelaskan alasan-alasan yang melatarbelakangi perubahan sikap Australia terhadap organisasi regional *East Asian Community* (EAC).

### 1.6.4 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada kurun waktu tahun 2000-2005. Kurun waktu enam tahun, penulis rasa merupakan jangkauan yang cukup untuk menganalisa perubahan sikap Australia terhadap *East Asian Community*. Tahun 2000 dijadikan awal penelitian karena tahun ini mulai terlihat jelas usaha-usaha untuk menciptakan organisasi regional pasca terjadinya krisis Asia. Sementara tahun 2005 dijadikan sebagai akhir penelitian merujuk pada alasan bahwa pada tahun ini diselenggarakan KTT 1 Asia Timur di Malaysia. KTT 1 Asia Timur merupakan kemajuan menuju tercapainya *East Asian Community* (EAC).

Meskipun penelitian ini memfokuskan pada kurun waktu 2000-2005 tidak menutup kemungkinan adanya pengungkapan peristiwa-peristiwa sebelum tahun 2000 untuk memperkuat data.

---

<sup>86</sup> Masri Singarimbun, "Metode dalam Proses Penelitian," dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, Edisi Revisi (Jakarta: LP3ES, 1989), hal. 5.

### 1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Terdapat berbagai cara untuk mendapatkan data, informasi, dan untuk menguji temuan-temuan tersebut. Cara-cara tersebut diantaranya mengadakan wawancara, angket, observasi, penelitian lapangan dan studi kepustakaan.<sup>87</sup> Karena berbagai keterbatasan maka dalam penelitian ini data dan informasi didapat menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data-data sekunder dari berbagai bahan, seperti: buku teks, terbitan berkala, jurnal, majalah, surat kabar, dokumen, makalah dan bahan-bahan lainnya.<sup>88</sup>

### 1.6.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data yang berupa informasi atau uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru atau menguatkan suatu gambaran yang telah ada dan sebaliknya.<sup>89</sup>

### 1.6.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab dengan garis besar rincian sebagai berikut:

<sup>87</sup> Gorys Keraf, *Komposisi* (Ende: Nusa Indah, 2001), hal. 160

<sup>88</sup> *Ibid.*, hal. 165

<sup>89</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hal. 106.



- Bab I adalah bab pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran dan metodologi penelitian
- Bab II membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan *East Asian Community*. Hal-hal tersebut meliputi sejarah, konsep, keanggotaan *East Asian Community* dan perkembangan apa saja yang telah dicapai *East Asian Community*
- Bab III berisi tentang alasan-alasan Australia ikut terlibat dalam EAC yang disertai dengan bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan Australia dengan negara-negara Asia Timur yang meliputi kerjasama ekonomi dan politik keamanan
- Bab IV merupakan kesimpulan dari penelitian

## BAB II

### ***EAST ASIAN COMMUNITY (EAC) DAN PERKEMBANGANNYA***

Kecenderungan regionalisme baru berawal dari berakhirnya Perang Dingin yaitu sekitar tahun 1990an. Hampir seluruh negara di dunia menjadi anggota dari organisasi regional. Kata-kata seluruh negara digunakan untuk menunjukkan bahwa yang menjadi anggota suatu organisasi regional tidak hanya negara-negara besar melainkan negara-negara dengan kekuatan kecil bisa ikut bergabung. Negara-negara berkekuatan kecil yang pada awalnya kurang memiliki peran dalam percaturan politik internasional karena kecilnya posisi tawar yang mereka miliki, maka dengan adanya regionalisme kedudukan mereka tidak akan mudah untuk diabaikan.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi maka regionalisme juga mengalami perkembangan. Organisasi-organisasi regional yang telah berdiri mulai menyesuaikan dengan isu-isu yang sedang terjadi bahkan organisasi yang pada awalnya hanya bekerjasama dalam satu bidang tertentu, sekarang mulai menambah kajian kerjasamanya. Hal ini seperti yang dialami APEC. APEC pada awalnya hanya bergerak dalam hal ekonomi namun dengan adanya isu terorisme maka saat ini mulai dibahas mengenai perluasan agenda forum yang juga mencakup bidang keamanan. Tidak jarang juga bermunculan organisasi-organisasi baru dengan pemahaman baru tentang regionalisme.

Fenomena-fenomena tersebut juga terjadi di wilayah Asia Timur. Asia Timur merupakan salah satu wilayah di dunia yang menaruh perhatian terhadap

organisasi regional. ASEAN merupakan organisasi regional yang bisa dikatakan sukses karena telah berhasil memperluas jumlah keanggotaan.<sup>1</sup> Keberhasilan ASEAN ini memicu didirikannya organisasi regional yang lain. Saat ini Asia Timur berada dalam tahap pembentukan *East Asian Community* (EAC). Dalam bab II ini diulas mengenai perkembangan EAC mulai dari ide awal sampai diselenggarakannya KTT 1 Asia Timur di Malaysia pada tanggal 14 Desember 2005 yang merupakan langkah maju untuk mewujudkan organisasi regional tersebut.

### II.1 Ide dan Konsep *East Asian Community* (EAC)

Ide pembentukan EAC berawal pada Desember tahun 1990 yaitu saat Perdana Menteri Malaysia Dr. Mahathir Muhammad mengusulkan pembentukan *East Asian Economic Group* (EAEG).<sup>2</sup> Organisasi regional ini hanya beranggotakan negara-negara di wilayah Asia Timur, seperti ASEAN yang saat itu masih terdiri dari enam negara anggota yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, Philipina, dan Thailand. Ditambah negara-negara di wilayah IndoCina yaitu Kamboja, Laos dan Vietnam, serta lima entitas ekonomi di wilayah Asia Timur Laut yaitu Cina, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. EAEG merupakan sebuah forum konsultatif untuk mendiskusikan masalah-masalah ekonomi dan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi yang diarahkan pada perdagangan bebas, pertumbuhan perekonomian dan memberi kontribusi

<sup>1</sup> Sophie Boisseau du Rocher, "ASEAN and Northeast Asia: stakes and implications for the European Union - ASEAN partnership," dalam Jenny dan Zareen Tia Siew Keng (ed.), *Asia Europe Journal*, Volume 4, Nomor 2, Juni 2006, hal. 230.

<sup>2</sup> <http://www.mfa.gov.my/english/foreignaffair/foreignpolicy/eaec.htm> diakses tanggal 26 September 2006

terhadap sistem perdagangan multilateral. Selain itu dengan adanya organisasi ini Asia Timur mampu "berbicara" dalam forum yang lebih besar.

Usulan ini ditentang kuat oleh Kanada, Australia dan Selandia Baru yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Negara-negara tersebut merasa dipinggirkan dalam format organisasi regional usulan Mahathir tersebut. Alasan lain yang mendasari penolakan usulan tersebut adalah keyakinan Mahathir bahwa "*Asia for the Asians*" dan adanya kecurigaan bahwa dengan organisasi baru tersebut wilayah Asia Timur akan terpisah dari wilayah Pasifik.<sup>3</sup> Atau dengan kata lain wilayah Pasifik akan terbagi dua.<sup>4</sup> Usulan ini juga mendapat reaksi negatif dari internal wilayah Asia Timur atas ketidakterlibatan negara-negara barat.<sup>5</sup>

Mendapatkan penolakan kuat baik dari dalam maupun luar wilayah Asia Timur, membuat Malaysia merubah terminologi *Group* dalam EAEG menjadi *Caucus (East Asian Economic Caucus)* pada Februari 1991. Dengan berubah menjadi *caucus* maka diharapkan organisasi yang akan terbentuk merupakan pelengkap dari organisasi-organisasi regional yang telah ada seperti GATT, ASEAN dan APEC. Tujuan dari EAEC tidak jauh berbeda dengan EAEG, yaitu tetap sebagai forum konsultasi untuk menuju pada perdagangan bebas.

Perubahan nama organisasi dari EAEG menjadi EAEC disampaikan Malaysia pada *ASEAN Economic Minister (AEM)* yang diselenggarakan pada tanggal 7-8 Oktober tahun 1991 di Malaysia dan mereka menyepakati bahwa

<sup>3</sup> Youngmin Kwon, *Regional Community-Building in East Asia* (Yonsei: Yonsei University Press, 2002), hal. 186.

<sup>4</sup> Mohd Hafiah Piei, "The East Asian Free Trade Agreement-An ASEAN Perspective," dalam Karl-Peter Schönfisch dan Bernhard Seliger (ed.), *Asean Plus Three (Cina, Jepang, Korea)-Towards an Economic Union in East Asia?* (Seoul: Hanns Siedel Shiftung, 2004), hal. 197.

<sup>5</sup> *Ibid.*

EAEC merupakan inisiatif ASEAN. Selain itu dalam pertemuan tersebut juga dicapai dua persetujuan tentang *caucus*, yaitu memperluas kerjasama intra kawasan yang akan meningkatkan perekonomian kawasan dan mendukung perdagangan bebas serta tidak ditujukan untuk membentuk sebuah blok perdagangan.<sup>6</sup> EAEC didisain untuk beraksi dan berkompetisi dengan organisasi-organisasi lain seperti *North America Free Trade Agreement* (NAFTA) dan *European Union* (EU). Hal ini terungkap dari perkataan Mahathir “ We think the EAEC will prevent domination of world trade by anyone bloc, enhance East Asian prosperity and contribute to regional stability and peace”<sup>7</sup>

Proposal EAEC secara implisit menunjukkan istilah *Asian-only* yang artinya melarang anggota di luar Asia. Organisasi ini dijadikan sebagai alternatif dari APEC. Menurutnya anggota APEC terlalu besar untuk menjadikan organisasi ini efektif. Selain itu peran menonjol oleh Amerika dan Australia menunjukkan bahwa APEC tetap merupakan organisasi yang didominasi orang kulit putih (*White-dominated club*) dan oleh karenanya negara-negara barat tetap sebagai golongan atas (*gang up*) untuk melawan negara-negara di Asia.<sup>8</sup> Sejalan dengan Mahathir, menteri Singapura, Lee Kuan Yew mengatakan bahwa APEC telah kehilangan fokusnya.<sup>9</sup>

Dari hal tersebut, maka regionalisme di Asia berada di bawah bayang-bayang Amerika sebagai kekuatan superior. Kondisi ini semakin menguatkan

<sup>6</sup> <http://www.aseansec.org/6126.htm> diakses tanggal 26 September 2006

<sup>7</sup> Baogang He, “East Asian ideas of regionalism: a normative critique,” dalam William T. Tow (ed.), *Australian Journal of International Affairs*, Volume 58, Nomor 1, Maret 2004, hal. 112.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Peter Symonds, “ ASEAN makes tentative moves toward an East Asian economic bloc,” dalam [http://www.wsws.org/articles/2000/nov2000/ase-n30\\_prn.shtml](http://www.wsws.org/articles/2000/nov2000/ase-n30_prn.shtml) diakses tanggal 26 September 2006



Mahathir bahwa Asia seharusnya memiliki organisasi regional sendiri, yang memiliki kemandirian dan martabat. Dengan jelas Mahathir mengatakan “ If North American countries have succeeded in forming their own free trade area, why cannot the East Asian economies do likewise?”<sup>10</sup> Istilah *Asia for the Asians* dan *Asian-only* berada dalam konteks *Asianism* yang secara eksplisit maupun implisit menunjukkan adanya usaha untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional dan bertahan dari penetrasi budaya barat.<sup>11</sup> Ide Mahathir ini terlihat sebagai salah satu cara untuk mempersiapkan Asia dalam menghadapi era globalisasi.

Setahun berikutnya yaitu Januari tahun 1992 pemimpin ASEAN bertemu di Singapura untuk membicarakan tentang konsensus berkaitan dengan bagaimana cara untuk menjalankan rencana pembentukan EAEC<sup>12</sup>. Akan tetapi dalam pertemuan tersebut tidak tercapai suatu kesepakatan. Hal ini dikarenakan terdapat silang pendapat antara Indonesia dan Malaysia. Di satu pihak Malaysia tetap memaksa agar EAEC merupakan organisasi yang mandiri, terlepas dari APEC. Sedangkan Indonesia menginginkan tetap menjaga EAEC berada dalam kerangka APEC sebagai wadah untuk memfasilitasi kerjasama dengan Korea dan Jepang.

Kemudian pada Juli tahun 1993, dalam *ASEAN Ministers Meeting (AMM)* yang dihadiri para menteri luar negeri, akhirnya ASEAN bersepakat untuk menjadikan EAEC dalam kerangka APEC (*caucus within APEC*). Dan mengenai detail-detail implementasi kesepakatan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam

---

<sup>10</sup> Kavi Chongkittavorn, “East Asian Regionalism So Close and Yet So Far”, dalam Derek dan Chunha dan John Funston (ed.), *Southeast Asian Affairs, 1999*, hal. 47.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

*ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM)*. Berikut ini beberapa AEM yang diadakan ASEAN untuk membahas perkembangan EAEC: <sup>13</sup>

1. Pada bulan Oktober tahun 1993 bertempat di Singapura, diselenggarakan AEM. Pertemuan tersebut mencapai beberapa kesepakatan yaitu:
  - a. negara-negara yang boleh berpartisipasi terbatas pada enam negara ASEAN ditambah Korea, Cina, Jepang, Hong Kong dan Taiwan
  - b. modalitas forum artinya hal-hal apa saja yang menjadi agenda forum termasuk metode pelaksanaan organisasi akan diputuskan setelah ada pertemuan antar anggota
  - c. menetapkan sekretaris jenderal ASEAN, Mr. Dato` Ajit Singh sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap konsultasi dengan Cina, Jepang dan Korea untuk membicarakan modalitas yang dimiliki
  - d. pertemuan pertama anantara seluruh partisipan seharusnya diselenggarakan pada tahun 1994 dengan catatan bahwa kesepakatan diantara partisipan telah tercapai
  - e. program-program implementasi akan diputuskan pada pertemuan AEM berikutnya yang diselenggarakan pada April tahun 1994 di Malaysia
2. Pada tanggal 23-25 April 1994 di Genting Highlands, Malaysia diadakan pertemuan AEM. Dalam AEM kali ini di capai kesepakatan bahwa pada bulan Mei 1994, dalam acara dialog antara ASEAN dan Amerika di

---

<sup>13</sup> Youngmin Kwon, *Op.Cit.*, hal. 188-189

Washington DC, ASEAN menjelaskan dokumen tentang konsep EAEC dan ASEAN harus memperhatikan pendapat Amerika. Ternyata Presiden Bill Clinton mengekspresikan pengertiannya setelah dengan lugas PM Dr. Mahathir Muhammad menjelaskan isi dokumen tersebut pada pertemuan informal tanggal 6 Mei 1994. Beberapa hari kemudian dokumen itu diserahkan pada Sekjen ASEAN, Dr. Ajit Singh. Dokumen tersebut berisi tentang:

- a. EAEC bertujuan untuk menjadi kelompok konsultatif bukan sebagai blok yang eksklusif, memberikan kontribusi terhadap perluasan kerjasama regional dan pengembangan sistem perdagangan bebas serta kepentingan diantara negara-negara Asia Timur
- b. EAEC akan mendiskusikan isu-iu yang berhubungan dengan APEC sebagai bentuk konsekuensi bentuk *caucus* yang telah disepakati sebelumnya. Akan tetapi hal ini bukan berarti EAEC merupakan struktur dibawah APEC dan oleh karena itu bisa menjalankan fungsi-fungsinya secara mandiri
- c. Negara partisipan hanya terbatas pada negara-negara di wilayah Asia Timur, yaitu enam negara ASEAN ditambah Korea, Cina, Jepang, Hong Kong, dan Taiwan. Sedangkan negara-negara anggota APEC yang lain maupun rencana perluasan keanggotaan akan dibicarakan lebih lanjut setelah EAEC resmi berdiri

Meskipun presiden Bill Clinton pada saat bertemu dengan PM Dr. Mahathir Muhammad menyatakan pengertiannya namun tetap saja pemerintah Amerika menginformasikan respon negatifnya pada Jepang yang disampaikan pada saat pertemuan wakil menteri luar negeri, tanggal 10 Juni 1994. Hal yang sama juga dilakukan terhadap Korea. Menyadari hal ini maka PM Dr. Mahathir Muhammad segera mengadakan konferensi pers yang dilakukan pada 15 Juni 1994. Dalam konferensi tersebut Malaysia berjanji akan berusaha sebaik mungkin untuk menangani respon negatif dari Amerika dan tetap mengharap agar Jepang bersedia bergabung dalam EAEC. Untuk melancarkan keinginannya ini maka diadakan pertemuan ASEAN PMC dengan tiga negara Asia Timur Laut (Cina, Jepang dan Korea) pada bulan Juli 1994 dengan agenda utama, mendorong pembentukan EAEC melalui pertemuan menteri ekonomi.

3. Akhirnya pada bulan September 1994 diadakan lagi AEM dan berhasil menyepakati bahwa pada April tahun 1995 di Phuket, Thailand diselenggarakan pertemuan informal para menteri ekonomi.

Namun sangat disayangkan pertemuan informal tersebut gagal terlaksana karena ketidakhadiran menteri ekonomi Jepang. Ketidakhadiran Jepang disebabkan pertemuan tersebut tidak mengundang Australia dan Selandia Baru. Hal ini menandakan Jepang masih terkesan ragu-ragu untuk mengambil sikap yang bertolak belakang dengan sikap AS. Kondisi yang sangat tidak menguntungkan ini memaksa proses pembentukan EAEC mengalami masa stagnasi.

Secara tersirat proposal EAEC merefleksikan pandangan baru ASEAN terhadap Jepang. Sentimen anti-Jepang yang kuat diantara negara-negara anggota ASEAN dikarenakan kekejaman Jepang pada masa kolonialisasi telah berubah. Hal ini sebagai akibat adanya kerjasama ekonomi antara negara-negara ASEAN dengan Jepang yang dimulai pada awal tahun 1980an. Pada saat itu negara-negara ASEAN berputus asa untuk memperoleh investasi asing guna rencana pembangunan ekonomi. Kemudian mereka mengenali Jepang lebih sebagai partner kerjasama untuk pembangunan ekonomi dibawah slogan *Greater East Asia Co-Prosperity Sphere*<sup>14</sup> daripada sebagai imperialis yang akan melakukan ekspansi militer.<sup>15</sup>

Sikap Jepang yang kurang kooperatif terhadap gagasan pembentukan organisasi regional tersebut mulai menunjukkan perubahan positif. Hal ini nampak pada keikutsertaan Jepang dan negara-negara Asia Timur lainnya yaitu Cina dan Korea Selatan dalam forum *ASEAN Europe Meeting* (ASEM) pada tahun 1996 di Bangkok.<sup>16</sup> Jika hubungan Asia dengan Amerika Utara telah terwakili melalui APEC maka ASEM merupakan jembatan untuk menghubungkan Asia dengan Eropa. Keanggotaan Jepang, Cina dan Korea

---

<sup>14</sup> Slogan ini adalah slogan ciptaan Jepang yang berarti blok di Asia yang terbebas dari pengaruh barat dan Jepang sebagai pemimpin yang muncul ketika terjadi Perang Dunia II. Istilah *Greater East Asia* di utarakan oleh Jenderal Tentara Jepang, Hachiro Arita, yang pada saat itu menjabat sebagai menteri luar negeri. *East Asia* ini juga menyangkut wilayah Asia Tenggara dan wilayah disekitarnya. Sementara *Co-Prosperity Sphere* di cetuskan oleh Menteri Luar Negeri Jepang Matsuoka Yosuke pada 1 Agustus 1940, yang berarti perluasan kekuatan Jepang dan berusaha untuk membebaskan Asia dari imperialisme. Diperoleh dari [http://www.Encarta.msn/Greater\\_East\\_Asia\\_Co-Prosperity\\_Sphere](http://www.Encarta.msn/Greater_East_Asia_Co-Prosperity_Sphere) diakses tanggal 8 Oktober 2006

<sup>15</sup> Peter Symonds, *Op.Cit.*, hal. 5

<sup>16</sup> Bunn Nagara, "Asians and Europeans Huddle Behind The Headlines," dalam <http://thestar.com.my/columnists/story.asp?file=/columnists/2006/9/10/behindtheheadlines> diakses tanggal 26 September 2006

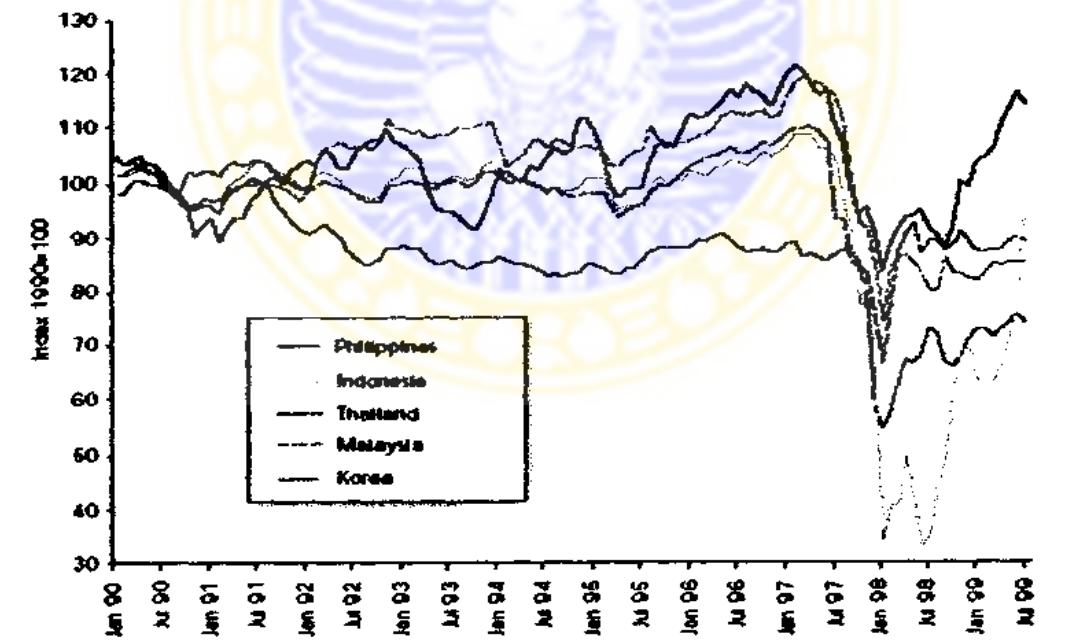


Selatan dalam ASEM memperlihatkan bahwa wilayah Asia Tenggara (ASEAN) merupakan wilayah yang penting bagi peningkatan hubungan dengan wilayah lain di dunia.

Hal ini berdampak pada semakin terlibatnya Jepang, Cina dan Korea Selatan pada dinamika Asia. Keterlibatan Jepang, Cina dan Korea Selatan juga terlihat ketika Asia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997-1998. Krisis yang melanda hampir seluruh negara di Asia dan terutama terjadi di Thailand, Malaysia, Indonesia dan Korea Selatan<sup>17</sup> mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi di wilayah Asia. Grafik berikut menyajikan kondisi tersebut:

Grafik 2.1

## Asia-5 Real Effective Exchange Rates, 1990-99



Source: JP Morgan, 1999.

<sup>17</sup> Editorial, "Asia's bright future" dalam <http://www.atimes.com/asia-crisis/AB19Dh04.html> diakses tanggal 26 September 2006

Secara keseluruhan investasi asing di ASEAN juga mengalami penurunan yaitu dari \$21.5 milyar di tahun 1997 turun hingga mencapai \$19.8 milyar tahun 1998 dan di tahun 1999 turun lagi menjadi \$13.1 milyar.<sup>18</sup> Terjadinya krisis berdampak pada semakin tingginya tingkat pengangguran. Di Thailand pengangguran meningkat 20% pertahun sejak tahun 1997 sementara di Korea dan Indonesia mencapai 7.9%.<sup>19</sup>

Terjadinya krisis tersebut menunjukkan kurangnya solidaritas antar negara-negara di Asia Timur dan kurangnya keinginan untuk kerjasama.<sup>20</sup> Akan tetapi dari krisis itu juga dapat diambil pelajaran berharga yang pada akhirnya menyadarkan ASEAN bahwa diperlukan integrasi yang lebih mendalam dengan negara-negara lain di dunia. Hal ini dengan jelas diungkapkan oleh Mahathir bahwa dengan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN akan mempercepat pemulihan kondisi ekonomi yang terpuruk akibat krisis ekonomi.<sup>21</sup> Sejalan dengan pemikiran Mahathir, sekjen ASEAN, Rodolfo Severino menambahkan, "respond with deeper integration both within, with its immediate neighbors and the world beyond".<sup>22</sup> Akan tetapi kerjasama dengan negara-di luar wilayah Asia seperti APEC kurang memberikan perhatian terhadap krisis yang dialami Asia. Sedangkan simpati dan dukungan sering ditunjukkan oleh Jepang, Cina dan Korea Selatan dengan memenuhi undangan ASEAN untuk mengikuti

<sup>18</sup> Peter Symonds, *Op.Cit.*, hal. 6

<sup>19</sup> Shigemitsu Sugisaki, "Economic Crisis and Recovery in Asia and its Implications for the International Financial System," dalam <http://www.imf.org/external/np/speeches/1999/030599.htm> diakses tanggal 26 September 2006

<sup>20</sup> Sophie Boisseau du Rocher, *Op.Cit.*, hal. 234

<sup>21</sup> Kavi Chongkittavorn, *Op.Cit.*, hal. 45.

<sup>22</sup> Inter Press Service, "After the crisis, SE Asia looks its big brothers," dalam <http://www.atimes.com/se-asia/AK30Ae02.html> diakses tanggal 26 September 2006

pertemuan *ASEAN Plus Three* (APT Summit). Bahkan APT dianggap sebagai perwujudan EAEC yang prosesnya terhenti.<sup>23</sup> Adanya APT ini mengindikasikan gagasan pembentukan organisasi regional dari PM Malaysia Dr. Mahathir Muhammad kembali muncul. Pertemuan-pertemuan APT tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Pertemuan pertama APT diselenggarakan pada Desember 1997 di Kuala Lumpur dan para pemimpin yang menghadiri pertemuan tersebut mengekspresikan harapan agar APT bisa dilaksanakan secara regular
2. Kemudian APT kedua diselenggarakan di Hanoi pada Desember 1998. Pertemuan ini dijadikan momentum terhadap “kelahiran kembali” ide pembentukan organisasi regional di wilayah Asia Timur. Dan pada saat yang sama Presiden Korea Kim Dae Jung mengajukan sebuah proposal pendirian *East Asian Vision Group* (EAVG). Menurutnya pendirian EAVG tidak hanya untuk mengatasi krisis ekonomi tapi juga untuk merangkul pembangunan ekonomi yang ditujukan pada pencapaian kemakmuran di abad 21. Proposal EAVG akan direvisi oleh Presiden Korea Selatan dan Wakil Presiden Cina Hu Jintao dan dilaporkan pada pertemuan APT berikutnya.
3. Pertemuan APT ketiga diselenggarakan di Manila pada November 1999 yang menghasilkan kesepakatan antara lain adanya keinginan untuk menjadikan kerjasama ini sebagai kerjasama jangka panjang.

<sup>23</sup> Sophie Boisseau du Rocher, *Op.Cit.*, hal. 241.

<sup>24</sup> Youngmin Kwon, *Op.Cit.*, hal. 197-200.

menguatkan dialog berkaitan dengan kebijakan ekonomi. Dan pada pertemuan ini juga APT dilembagakan.<sup>25</sup> Dan pada pertemuan ini juga di sepakati untuk menguatkan kerjasama dalam bentuk *East Asian Free Trade Area* yang akan dicapai pada tahun 2020.<sup>26</sup> Dalam hal ini Cina menghendaki hubungan *ASEAN-China FTA* dicapai pada 2010, sementara Jepang menginginkan hubungan *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership* dicapai pada 2012.<sup>27</sup> Sementara itu ASEAN juga berusaha mendirikan FTA dengan Korea Selatan yang diharapkan Korea memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.<sup>28</sup>

4. Pertemuan keempat APT diadakan di Singapura pada November 2000 Pada pertemuan ini menyepakati tentang adanya kemungkinan terhadap mekanisme kerjasama regional. Pada pertemuan ini diusulkan *Chiang Mai Initiative* yang merupakan kerjasama antara ASEAN dengan Cina, Jepang dan Korea.<sup>29</sup> Pada dasarnya *Chiang Mai Initiative* merupakan usaha membentuk pengaturan keuangan sebagai langkah preventif dalam menghadapi krisis keuangan.<sup>30</sup> Selain itu

<sup>25</sup> Young Jong Choi, "Regional Integration in East Asia" dalam Karl-Peter Schöfnich dan Bernhard Seliger (ed.), *Asean Plus Three (Cina, Japan, Korea)-Towards an Economic Union in East Asia?* (Seoul: Hans Siedel Shiftung), hal. 286.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Baogang He, *Op.Cit.*, hal. 106

<sup>28</sup> K. Kesavapany, "Integration: The Way Forward," dalam ISBN, *Regional Integration in the Asia Pacific: Issues and Prospects*, (Singapura: OECD, 2005), hal. 97.

<sup>29</sup> Seokwoo Kim, "The theoretical foundations of ASEAN + 3:Prospect Limitations," dalam Karl-Peter Schöfnich dan Bernhard Seliger (ed.), *Asean Plus Three (Cina, Japan, Korea)-Towards an Economic Union in East Asia?*, (Seoul: Hans Siedel Shiftung), hal. 199

<sup>30</sup> Young Jong Choi, *Op.Cit.* hal. 288

disepakati pembentukan *East Asia Study Group* (EASG)<sup>31</sup> yang berwenang untuk mendiskusikan langkah-langkah untuk mengembangkan APT sebagai badan kerjasama regional. Menanggapi hal ini PM Malaysia Dr. Mahathir Muhammad menyarankan agar APT ditransformasikan dalam KTT Asia Timur (*East Asia Summit*)

5. Pertemuan APT kelima diselenggarakan di Brunei pada November 2001. Pada pertemuan ini EAVG memberikan laporan mengenai pembentukan organisasi regional. Laporan tersebut berjudul "*Towards an East Asian Community*" dengan sub judul "*Region of Peace, Prosperity, and Progress*". Jadi pada pertemuan APT yang kelima inilah atau tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2001 nama *East Asian Community* (EAC) muncul sebagai evolusi organisasi regional yang akan didirikan di wilayah Asia Timur.<sup>32</sup>
6. Kemudian pada pertemuan APT ke enam di Kamboja, bulan November 2002, EASG memberikan laporannya bahwa akan dilaksanakan KTT Asia Timur sebagai langkah menuju dibentuknya EAC. Menurut EASG, kerjasama Asia Timur merupakan hal yang tidak terhindarkan dan merupakan hal yang diinginkan oleh wilayah ini.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> EASG terdiri dari tiga belas Senior Official Meeting (SOM). EASG didirikan untuk mengumpulkan dan mempelajari rekomendasi yang diajukan oleh EAVG. Berkaitan dengan usulan EAVG tentang East Asian Free Trade Area, EASG juga memberi dukungan penuh.

<sup>32</sup> Hatakeyama Noboru, "The Challenges Facing an East Asia Community", dalam *Japan Spotlight*, Januari/Februari 2005, hal. 2

<sup>33</sup> Young Jong Choi, *Loc. Cit.*



Jadi berdasarkan uraian diatas, ide pembentukan organisasi regional di Asia Timur bukan merupakan proses yang mudah. Karena ide tersebut pernah ditentang, bahkan terhenti saat terjadi krisis Asia. Terjadinya krisis Asia pada tahun 1997/1998 bisa dikatakan sebagai katalis untuk menguatkan organisasi regional di wilayah Asia Timur. Krisis Asia ini menumbuhkan semangat kerjasama diantara negara-negara di wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur Laut. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Estrada, "Our future is intertwined with that of greater East Asia. We need to intensify our dialogue with them on all issues, on all fronts. Northeast Asia's stability is extremely vital to peace in the ASEAN region".<sup>34</sup> Kerjasama kedua wilayah tersebut diawali dengan ikut bergabungnya Cina, Jepang dan Korea Selatan dalam kerangka kerjasama ASEAN pada tahun 1997.

APT menjadi wadah untuk memunculkan kembali ide Mahathir Muhammad tentang dibentuknya organisasi regional di Asia Timur. Seperti yang diungkapkan oleh Dr. Kharas, "What's going on now in East Asia is something quite new – a renaissance. The new Asia is more innovative and networked-it's characterized by a very competitive business environment that encourage new products and processes and a labor force able to absorb new ideas"<sup>35</sup>

Setelah melalui serangkaian proses pembahasan mengenai organisasi regional yang akan dibentuk di wilayah Asia Timur, maka pada pertemuan APT kelima di Brunei, EAVG mengajukan proposal mengenai organisasi regional di

<sup>34</sup> After the crisis, SE Asia looks to its big brothers dalam <http://www.atimes.com/se-asia/AK30Ae02.html> diakses tanggal 1 Oktober 2006

<sup>35</sup> An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth, dalam <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/0> diakses tanggal 1 Oktober 2006

Asia Timur, yaitu EAC. Pemilihan kata-kata Asia Timur dalam *East Asian* didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut:<sup>36</sup>

- ASEAN dianggap terlalu kecil
- Pembentukan EAC bukan penciptaan ulang (*re-invent*) APEC, oleh karena itu diperlukan nama baru
- Kemunculan ide ini datang dari kesadaran Asia Timur sendiri
- Di wilayah Asia Timur telah disepakati berbagai kerjasama baik bilateral maupun multilateral yang cukup baik dan dapat meningkatkan ketergantungan antar negara di wilayah ini

EAC tidak hanya berisi tentang perdagangan bebas tetapi juga tentang keamanan, politik, sosial, dan budaya.<sup>37</sup> Pembentukan organisasi ini diharapkan mampu merespon isu-isu global yang memerlukan penyelesaian diantara negara-negara Asia Timur sendiri. Isu-isu tersebut diantaranya stabilitas mata uang, mewujudkan pasar bersama, isu-isu lingkungan seperti sumber daya alam dan energi, penanggulangan penyakit maupun isu-isu keamanan seperti terorisme.<sup>38</sup> Berdasar hal inilah maka pembentukan EAC cukup signifikan untuk diarahkan pada pencapaian kesejahteraan di seluruh Asia Timur.<sup>39</sup>

Secara umum visi EAEC adalah untuk menciptakan masyarakat yang damai, makmur dan maju berdasar pada pembangunan masyarakat seluruh

<sup>36</sup> Tan Sri Dr. Noordin Sopiee, "The Making Of An East Asian Community: Strategic Challenges , Strategic Responses," *Institute of Strategic and International Studies* dalam [http://www.tcf.or.jp/data/20040203-04 Noordin Sopiee.pdf](http://www.tcf.or.jp/data/20040203-04%20Noordin%20Sopiee.pdf) hal. 2, diakses tanggal 8 Oktober 2006

<sup>37</sup> Hatakeyama Noboru, "The East Asian Community-Time for Exhaustive Debate," dalam <http://www.ceac.jp/e/commentary/050602.pdf> diakses tanggal 8 Oktober 2006

<sup>38</sup> Keizai Doyukai, "Recommendation Towards the Realization of an East Asian Community-Working to Build Confidence with East Asian Countries-," dalam <http://www.doyukai.or.jp/en/policyproposal/articles/pdf/060501> hal. 6 diakses tanggal 1 Oktober 2006

<sup>39</sup> *Ibid.*

kawasan sehingga dapat memberi kontribusi pada dunia internasional.<sup>40</sup>

Ditekankan pula oleh EAVG bahwa dengan pembentukan EAC akan mampu menjadi wadah kerjasama ekonomi, sosial dan politik di wilayah Asia Timur.<sup>41</sup>

Hal ini terangkum dalam tujuan pembentukan EAC yang terdiri dari:<sup>42</sup>

- Mencegah terjadinya konflik dan mempromosikan perdamaian diantara negara-negara di Asia Timur
- Mempererat kerjasama ekonomi yang meliputi perdagangan, investasi, keuangan dan pembangunan
- Meningkatkan keamanan manusia dengan melakukan usaha-usaha seperti perlindungan lingkungan dan menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*)
- Mendorong pencapaian kemakmuran bersama melalui peningkatan kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia

Dalam laporan EAVG mengenai EAC disebutkan tentang rekomendasi demi tercapainya tujuan tersebut. Rekomendasi itu meliputi bidang:

- Kerjasama Ekonomi
  - Mendirikan *East Asian Free Trade Area* (EAFTA)
  - Memperluas investasi ASEAN sampai seluruh Asia Timur

<sup>40</sup> Dr. Inkyo Cheong, "Towards an East Asian Community, Region of Peace Prosperity and Progress," dalam *EAVG Report*. Laporan EAVG terdapat dalam lampiran

<sup>41</sup> Hatakeyama Noboru, *Loc. Cit.*

<sup>42</sup> Dr. Inkyo Cheong, *Op.Cit.*, hal. 11

- Meningkatkan pembangunan dan kerjasama diantara negara-negara di wilayah Asia Timur serta memberi bantuan pada negara-negara yang belum maju
- **Kerjasama Keuangan**
  - Mengadopsi mekanisme peredaran mata uang yang lebih baik demi stabilitas keuangan maupun pembangunan ekonomi
  - Memperkuat pengawasan wilayah
- **Kerjasama Politik dan Keamanan**
  - Mempromosikan norma-norma, prosedur, dan mekanisme hubungan intra kawasan yang berdasar pada *neighborliness*, saling percaya dan solidaritas
  - Memperkuat mekanisme untuk mengenali ancaman wilayah
  - Memperluas kerjasama politik
  - Meningkatkan peran kawasan dalam lingkungan global
- **Kerjasama Lingkungan**
  - Menginstitusionalisasikan kerjasama lingkungan baik bilateral maupun multilateral dalam kawasan
  - Meningkatkan manajemen yang lebih efektif dalam menangani masalah polusi lingkungan
  - Bergabung dala usaha-usaha eksplorasi sumber daya alam baru dan untuk menggunakan sumber energi secara efisien

- **Kerjasama Sosial Budaya**
  - Menyelenggarakan program-program untuk mengurangi kemiskinan dengan cara negara-negara maju memberi bantuan pada negara-negara yang belum maju untuk memberantas kemiskinan, buta huruf dan penyakit
  - Mengadopsi program-program untuk meningkatkan pelayanan kesehatan
  - Meningkatkan peran sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan, keahlian, palatihan dan kualitas diri
  - Mendirikan *East Asia Education Fund* (EAEF) untuk mendukung peningkatan pendidikan dan pelatihan

Dari rekomendasi yang diajukan EAVG tersebut, nampak bahwa EAC diharapkan mampu menjadi organisasi regional yang memiliki peran penting dalam hubungan internasional. Selain itu EAC merupakan bukti aktualisasi diri wilayah Asia Timur sebagai bagian dari komunitas global.

## **II.2 Perkembangan East Asian Community**

### **II.2.1 Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 1 Asia Timur dan Anggota KTT 1 Asia Timur**

Pada tahun 2002, dalam pertemuan *ASEAN Plus Three* (APT) di Kamboja telah disepakati untuk melaksanakan KTT Asia Timur. KTT Asia Timur merupakan sebuah forum dialog yang membicarakan isu-isu strategis, politik, dan



ekonomi yang menjadi perhatian bersama dengan tujuan untuk memajukan perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan ekonomi wilayah Asia Timur.<sup>43</sup> KTT Asia Timur dimaksudkan untuk membangun komunitas yang berpandangan sama mengenai perdamaian, stabilitas dan kemajuan kawasan. Pertemuan KTT ini dianggap sebagai suatu langkah strategis karena dijadikan dasar bagi terwujudnya *East Asian Community*, yang akan mencapai kesepakatan bersama dalam bidang perdagangan bahkan keamanan tanpa melibatkan Amerika Serikat.<sup>44</sup>

Pada Pertemuan Puncak ke 11 ASEAN (*ASEAN Summit* atau KTT ASEAN) dengan tema *One Vision, One Identity, One Community*<sup>45</sup> yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia tanggal 12-14 Desember 2005 disepakati bahwa penyelenggaraan KTT 1 Asia Timur (Pertemuan Puncak Asia Timur atau *East Asia Summit*) pada tanggal 14 Desember 2005 di Malaysia.<sup>46</sup> Menurut Presiden Filipina, Gloria Arroyo "EAS represents half the world's population and one third of world trade, and the combined political will can do much to address issues of great interest".<sup>47</sup>

Pada pertemuan menteri APT di Laos pada bulan Juli 2005, diputuskan bahwa Australia, India dan Selandia Baru yang bukan termasuk dalam wilayah Asia Timur akan menghadiri KTT 1 Asia Timur.<sup>48</sup> Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Syed Hamid Albar bahwa "East Asian

<sup>43</sup> <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4526736.stm> diakses tanggal 8 Oktober 2006

<sup>44</sup> Bruce Vaughn, "East Asian Summit: Issues for Congress", *CRS Report for Congress* dalam <http://fpc.state.gov/documents/organization/58236.pdf> hal. 2 diakses tanggal 8 Oktober 2006

<sup>45</sup> Chairman's Statement of the 11th ASEAN Summit dalam <http://www.aseansec.org/18039.htm> diakses tanggal 8 Oktober 2006

<sup>46</sup> <http://www.11thaseansummit.org.my/AboutSummit.php?> diakses tanggal 8 Oktober 2006

<sup>47</sup> C.S Kuppuswamy, "East Asia Summit – Was it just a get-together?", dalam <http://www.saag.org/%5Cpapers17%5Cpaper1648.html> diakses tanggal 8 Oktober 2006

<sup>48</sup> <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4526736.stm> diakses tanggal 8 Oktober 2006, *Loc.Cit.*

Summit (EAS) would be held in December and that invitations would be extended to the Asean countries, as well as Cina, Japan, South Korea, India, Australia and New Zealand -- but not the U.S. <sup>49</sup>Jadi peserta KTT 1 Asia Timur terdiri dari negara-negara APT ditambah Australia, India dan Selandia Baru. Enam belas kepala negara peserta KTT 1 Asia Timur yaitu: <sup>50</sup>

1. Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono
2. Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah
3. Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra
4. Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad badawi
5. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Long
6. Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo
7. Perdana Menteri Vietnam Phan Van Khai
8. Perdana Menteri Laos Bounhang Vorachit
9. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen
10. Perdana Menteri Myanmar Soe Win
11. Perdana Menteri Cina Wen Jiabao
12. Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi
13. Presiden Korea Selatan Roh Moo-Hyun
14. Perdana Menteri Australia John Howard
15. Perdana Menteri Selandia Baru Helen Clark
16. Perdana Menteri India Manmohan Singh

---

<sup>49</sup> Dana Dillon, "Watching The East Asia Summit," dalam <http://www.heritage.org/Press/Commentary/ed081805a.cfm> diakses tanggal 8 Oktober 2006

<sup>50</sup> <http://us.rediff.com/money/2005/dec/14asean2.htm> diakses tanggal 8 Oktober 2006

Selain itu Rusia yang diwakili oleh Vladimir Putin nampak sebagai negara *observer*. Artinya Rusia telah menunjukkan sikap tertarik untuk ikut terlibat dalam pembentukan EAC yang diwujudkan dengan menjadi negara peninjau dalam KTT 1 Asia Timur tersebut.<sup>51</sup>

Keikutsertaan negara-negara di luar Asia Timur ini didasari kesepakatan yang dicapai pada pertemuan menteri APT pada April 2005 di Cebu dan pada bulan Mei di Kyoto tahun 2005. Dalam pertemuan tersebut syarat negara yang boleh mengikuti KTT Asia Timur adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

- Negara anggota harus anggota *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC) atau negara yang berkeinginan bergabung menjadi anggota TAC
- Merupakan negara rekan dialog ASEAN
- Memiliki hubungan ekonomi dengan ASEAN

Australia telah menjalin hubungan dengan ASEAN selama 30 tahun dan dari kerjasama tersebut telah dicapai hasil-hasil yang signifikan. Hubungan kerjasama Australia dengan ASEAN dimulai dengan menjadi partner dialog ASEAN yang diresmikan pada bulan April tahun 1974 di Canberra, Australia.<sup>53</sup> Kerjasama ekonomi dengan ASEAN juga telah dijalani Australia. Dicapainya FTA dengan beberapa negara anggota ASEAN menjadi salah satu buktinya. Seperti pada tahun 1 Januari 2005, Australia melaksanakan FTA dengan Thailand

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/eas/outline.html> diakses tanggal 8 Oktober 2006

<sup>53</sup> Joint Press Statement The Eleventh ASEAN- Australia Forum, dalam <http://www.aseansec.org/12989.html> diakses tanggal 29 September 2006

dalam kerangka *Thailand-Australia Free Trade Agreement* (TAFTA).<sup>54</sup> TAFTA ditandatangani pada 5 Juli 2004 di Canberra, sementara FTA dengan Singapura (SAFTA-Singapore Australia Free Trade Agreement) ditandatangani pada 17 Februari 2003 di Singapura.<sup>55</sup> Ditambahkan oleh Bob Carr "It is in Australia's interests to link ourselves with the world's most dynamic and creative economy. It's about more than trade, it's about more than investment, and it doesn't rule out Australia's growing economic relationship with East Asia".<sup>56</sup> Selain itu Australia juga telah menandatangani TAC tentang *ASEAN's non-aggression pact* pada tanggal 10 Desember 2005.<sup>57</sup>

Sementara Selandia Baru dianggap memiliki perhatian besar terhadap apa yang terjadi di wilayah Asia Timur.<sup>58</sup> Hal ini diwujudkan dengan menjadi mitra dialog ASEAN sejak tahun 1974.<sup>59</sup> Sedangkan India, meskipun tidak termasuk dalam wilayah Asia Timur namun India dianggap sebagai "tetangga dekat".<sup>60</sup> Traktat persahabatan dan kerja sama (TAC) ASEAN yang diperluas sebagai pilar bagi East Asia Summit untuk melibatkan Australia, India, dan Selandia Baru dalam corak formula ASEAN Plus 6<sup>61</sup> menjadi kunci masuknya Australia, India dan Selandia Baru dalam KTT Asia Timur. Mahathir menambahkan "engaging

<sup>54</sup> Tim Harcourt, "Love Thy Neighbour – Australia's growing trade ties with ASEAN," dalam <http://www.austrade.gov.au/corporate/layout/0.html> diakses tanggal 29 September 2006

<sup>55</sup> <http://www.dfat.gov.au/asean/> diakses tanggal 29 September 2006

<sup>56</sup> Helen Dicki, "Trade: A Great Wealth Creator," dalam [http://www.trademinister.gov.au/speeches/2003/030707\\_trade\\_a\\_great\\_wealth\\_creator\\_.html](http://www.trademinister.gov.au/speeches/2003/030707_trade_a_great_wealth_creator_.html) diakses tanggal 29 September 2006

<sup>57</sup> Bunn Nagara, *Loc. Cit.*

<sup>58</sup> Connie Levett Herald, "Malaysia delivers blow to Australia," dalam <http://www.smh.com.au/news/world/malaysia-delivers-blow-to-australia/2005/12/14/1134500916425.html> diakses tanggal 1 Oktober 2006

<sup>59</sup> Tim Harcourt, *Loc. Cit.*

<sup>60</sup> Connie Levett Herald, *Loc. Cit.*

<sup>61</sup> PLE Priatna, "Mempertahankan Identitas Regional," Senin, 28 November 2005 [online] <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0511/28/opini/2239438.htm> diakses tanggal 8 Oktober 2006



India in the East Asia process is a good move, Australia and New Zealand, too. Geographically they are not part of us but from the point of view of strategic considerations their participation is [welcomed].”<sup>62</sup> Selain Australia, India dan Selandia Baru yang diundang menghadiri KTT Asia Timur, tetapi juga Rusia. Namun kedatangan Rusia bukan sebagai peserta KTT melainkan hanya sebagai peninjau.<sup>63</sup>

Konfigurasi peserta KTT 1 Asia Timur memperlihatkan adanya perubahan lingkup anggota organisasi regional di Asia Timur. Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, anggota organisasi regional di Asia Timur pada awalnya hanya melibatkan negara-negara di wilayah tersebut. Namun kenyataannya, pada penyelenggaraan KTT 1 Asia Timur juga melibatkan negara-negara di luar wilayah. Semakin kompleks anggota KTT 1 Asia Timur secara otomatis, kepentingan yang ada juga semakin kompleks.

Di dalam wadah KTT Asia Timur, terdapat banyak ”gajah” yang juga memiliki kepentingan-kepentingan tersendiri. Negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, dan Jepang, berkepentingan untuk mengimbangi pengaruh Cina di kawasan ini.<sup>64</sup> Sebaliknya, India dan Cina yang pembangunannya melesat bagai meteor dalam beberapa tahun terakhir, jelas ingin memainkan peran dan pengaruh lebih besar di kawasan ini seiring dengan meningkatnya kemampuan mereka di

<sup>62</sup> Connie Levett Herald, *Loc. Cit.*

<sup>63</sup> Peter Lloyd, “Aust out of place at summit: Mahathir,” dalam <http://www.abc.net.au/news/newsitems/200512/s1526124.htm> diakses tanggal 8 Oktober 2006

<sup>64</sup> Rakaryan Sukarjaputra, ”EAS, Cermin ASEAN yang Semakin Diperhitungkan,” Kamis, 22 Desember 2005 [online] <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0512/22/In/2305243.htm> diakses tanggal 8 Oktober 2006



bidang ekonomi.<sup>65</sup> Bahkan ada kekhawatiran KTT Asia Timur justru akan dimanfaatkan untuk menjadi jembatan pertemuan dan hubungan antarnegara-negara lebih maju itu (Jepang, Korea Selatan, Cina, Australia, Selandia Baru, India), dan ASEAN kemudian terpinggirkan.<sup>66</sup>

Memahami adanya pertarungan kepentingan diantara negara-negara maju di dalam wadah KTT Asia Timur tersebut menyadarkan ASEAN untuk mempertahankan sentralitas ASEAN. Oleh karena itu, sangat penting bagi ASEAN untuk tetap menjadikan perimbangan kekuatan di kawasan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.<sup>67</sup> Sikap Indonesia yang memperjuangkan Australia, Selandia Baru, dan India ikut serta di EAS adalah karena pertimbangan perimbangan itu.<sup>68</sup>

Menyikapi kekhawatiran persaingan kepentingan dalam KTT Asia Timur Perdana Menteri Cina, Wen Jiabao mengatakan "The East Asian Summit should respect the desires of East Asian countries and should be led by East Asian Countries"<sup>69</sup>. Lebih lanjut lagi mekanisme kerjasama APT akan menjadi "kendaraan utama" dalam pembentukan EAC.<sup>70</sup> Kemudian mengenai sentralitas ASEAN dalam KTT Asia Timur menurut Datuk Seri Ahmad Abdullah Badawi "ASEAN clearly in the driver's seat was a success in every aspect. There is no

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Rakaryan Sukarjaputra, "ASEAN dan Pertemuan Puncak Asia Timur," Rabu, 27 September 2006 [online] <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0609/27/In/2980554.htm> diakses tanggal 8 Oktober 2006

<sup>67</sup> "EAS Jangan Diperluas Sentralitas ASEAN Harus Tetap Dipertahankan" Rabu, 13 September 2006, [online] <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0609/13/In/2951738.htm> diakses tanggal 8 Oktober 2006

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> C. S Kuppuswamy, *Loc.Cit.*

<sup>70</sup> Yamada Takio, "First East Asia Summit and the Prospect of an East Asian Community", dalam <http://www.rieti.go.jp/en/events/bb1/06011201.html> diakses tanggal 8 Oktober 2006

doubt”.<sup>71</sup> Sejalan dengan Badawi, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyebut “ASEAN the driving force of this East Asia process”.<sup>72</sup> Apa pun gagasan-gagasan yang akan muncul, posisi ASEAN sebagai pemegang peranan kunci harus benar-benar dijaga.<sup>73</sup>

## IL.2.2 Hasil Konferensi Tingkat Tinggi I Asia Timur

Dalam KTT I Asia Timur yang dihadiri oleh para pemimpin negara tersebut menghasilkan suatu Deklarasi KTT Asia Timur yang berisi:<sup>74</sup>

- Para pemimpin Asia Timur membentuk KTT Asia Timur sebagai forum dialog atas isu-isu strategis yang luas, isu-isu politik dan ekonomi yang menjadi kepentingan bersama, dengan tujuan memajukan perdamaian, stabilitas dan kemakmuran ekonomi Asia Timur
- Upaya-upaya KTT Asia Timur untuk memajukan pembangunan dengan memperkuat terwujudnya masyarakat ASEAN yang menjadi bagian integral suatu bangunan regional
- KTT Asia Timur akan menjadi forum yang terbuka, inklusif, transparan dan melihat keluar untuk memperjuangkan dan memperkuat norma-norma global dan nilai-nilai yang diakui secara universal dengan ASEAN sebagai kekuatan pendorong

<sup>71</sup> C. S Kuppuswamy, *Loc. Cit.*

<sup>72</sup> Dana Dillon, *Op. Cit.*, hal. 3

<sup>73</sup> Rakaryan Sukarjaputra, “EAS, Cermin ASEAN yang Semakin Diperhitungkan”, Kamis 22 Desember 2005 [online] <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0512/22/In/2305243.htm> diakses tanggal 8 Oktober 2006

<sup>74</sup> Faustinus Andrea, “Diplomasi Tingkat Tinggi Asia Pasifik: KTT ASEAN dan KTT APEC 2005”, *Analisis CSIS*, Desember 2005, Volume 34, Nomor 4, hal. 444-445

- **Mengembangkan dialog-dialog strategis dan memajukan kerjasama di bidang politik dan keamanan untuk memastikan bahwa negara-negara Asia Timur bisa hidup damai dalam lingkungan adil, demokratik dan harmonis satu sama lain dan dengan warga dunia lainnya**
- **Memajukan pembangunan, stabilitas keuangan, ketersediaan energi, integrasi ekonomi, penghapusan kemiskinan dan menyempitkan kesenjangan pembangunan di Asia Timur**
- **Memajukan saling pengertian budaya yang lebih dalam dan memperkuat kerjasama untuk meningkatkan taraf hidup dan martabat warga Asia Timur dan mengembangkan pengertian dan solidaritas terhadap perlindungan lingkungan, pencegahan penyakit dan bencana alam**
- **Para pemimpin Asia Timur mendukung kerjasama di bidang energi termasuk efisiensi minyak dan penemuan energi alternative**
- **Para pemimpin Asia Timur berkomitmen pada tujuan agenda Doha dan WTO**
- **Para pemimpin Asia Timur mendukung upaya ASEAN untuk merealisasikan masyarakat ASEAN**
- **Para pemimpin Asia Timur sepakat untuk mewujudkan perdagangan bebas di seluruh anggota KTT Asia Timur**

- Para pemimpin Asia Timur mengakui bahwa Masyarakat Asia Timur merupakan tujuan jangka panjang yang memiliki kontribusi pada terpeliharanya perdamaian, stabilitas, kemakmuran dan kemajuan di kawasan Asia Timur maupun di luar kawasan
- Para pemimpin Asia Timur sepakat untuk menjadikan KTT Asia Timur sebagai pertemuan tahunan yang merupakan satu rangkaian dengan KTT ASEAN
- KTT Asia Timur harus terus dipertahankan sebagai pertemuan para pemimpin untuk mendiskusikan hal-hal strategis yang mempengaruhi pembangunan kawasan
- Proses denuklirisasi di Semenanjung Korea yang dilakukan secara damai dan laik akan memberikan sumbangan besar terhadap perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan Asia Pasifik
- Dialog enam jalur yang kelima tentang krisis nuklir Korea Utara harus segera dilakukan agar pihak-pihak yang terlibat dapat meneruskan komitmennya dalam rangka perdamaian Semenanjung Korea

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa apa yang telah dihasilkan dalam KTT 1 Asia Timur masih merupakan hal-hal umum, belum tercapai kesepakatan yang signifikan tentang pembentukan EAC. Meskipun demikian bukan berarti KTT 1 Asia Timur merupakan pertemuan “biasa”, namun

merupakan suatu forum untuk menegaskan komitmen bersama untuk mendirikan EAC.





### **BAB III**

## **KEPENTINGAN AUSTRALIA DALAM *EAST ASIAN COMMUNITY (EAC)***

Arus globalisasi membawa dampak pada perubahan sistem internasional, termasuk kecenderungan regionalisme baru. Seperti telah dijelaskan pada bab II, wilayah Asia Timur sekarang ini berusaha untuk mendirikan organisasi regional yang beranggotakan negara-negara di wilayah Asia Timur. Organisasi regional yang dimaksud adalah *East Asian Community (EAC)*. EAC merupakan organisasi yang tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, melainkan juga ranah politik, keamanan, lingkungan, sosial dan budaya.

Sebagai organisasi di wilayah Asia Timur, keterlibatan Australia yang berada di luar wilayah Asia Timur menimbulkan pertanyaan yang menarik untuk dikaji. Dalam bab III berikut akan diuraikan mengenai pandangan Australia terhadap Asia Timur yang mendasari ketertarikannya pada wilayah ini. Dari ketertarikan yang ditunjukkan Australia terhadap wilayah Asia Timur, dapat ditelusuri lebih dalam mengenai alasan Australia terlibat dalam pembentukan EAC.

Selain itu, dijelaskan keikutsertaan Australia dalam dinamika Asia Timur. Keikutsertaan yang dimaksud adalah menyangkut hubungan yang terjalin antara Australia dengan negara-negara di wilayah Asia Timur serta dengan organisasi-organisasi yang telah ada di wilayah tersebut. Melalui kerjasama yang telah terjalin ini akan dicari kepentingan-kepentingan apa saja yang belum tercapai

sehingga membuat Australia tertarik untuk mendukung pembentukan EAC. Uraian ini sebagai sarana untuk menguji hipotesis yang penulis telah sebutkan pada bab sebelumnya.

### III.1 Australia di Asia Timur

Secara geografis letak Australia dekat dengan wilayah Asia Tenggara. Namun bukan berarti Australia memiliki kebudayaan yang sama dengan kebudayaan Asia. Sejarah panjang imperialis Inggris di Australia membuat budaya Australia cenderung mengikuti kebudayaan Eropa. Hal inilah yang membuat Australia sering disebut sebagai “negara barat di Asia”.

Pada 1 Januari 1901 telah resmi dibentuk *The Commonwealth of Australia* sebagai *Dominion of the British Empire* yang dipimpin oleh Barton dan memiliki enam negara bagian, yaitu *Queensland, New South Wales, Tasmania, Australia Selatan, Australia Barat* dan dua wilayah teritorial yaitu *Northern Territory* dan *Capital Territory*.<sup>1</sup> Komposisi penduduk Australia mayoritas orang kulit putih yang berasal dari Inggris, Skotlandia dan Irlandia. Posisi warga kulit putih semakin kuat dengan adanya *Immigration Restriction Act (IRA)*<sup>2</sup> yang diterapkan bersamaan dengan kebijakan *White Australia Policy (WAP)*.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> [http://www.pm.gov.au/aus\\_in\\_focus/stats/index.html](http://www.pm.gov.au/aus_in_focus/stats/index.html) diakses tanggal 26 November 2006

<sup>2</sup> *Immigration Restriction Act (IRA)* merupakan aturan yang membatasi bahkan melarang imigran dari orang kulit hitam. Pada awalnya aturan ini melarang imigran yang bukan dari Eropa, namun hal ini ditolak Inggris yang takut perannya akan berkurang di wilayah India dan Jepang. Oleh karena itu sebagai gantinya diberlakukan “dictation test”, artinya IRA hanya berlaku bagi mereka orang non kulit putih yang tidak lulus tes dikte lima puluh kata dalam bahasa Eropa. Tidak hanya Australia yang menerapkan kebijakan tentang imigran, Afrika Selatan, Selandia Baru dan Kanada juga secara ketat memberlakukan kebijakan tentang imigran. [http://www.Encarta.msn/Immigrant\\_Restriction\\_Act](http://www.Encarta.msn/Immigrant_Restriction_Act) diakses tanggal 26 November 2006

<sup>3</sup> *White Australia Policy (WAP)* merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kebijakan Australia yang berkaitan dengan ras, yaitu membatasi peran orang non kulit putih dan

Secara umum kebijakan-kebijakan Australia pada awal pemerintahannya mengikuti kebijakan dari Eropa. Akan tetapi dengan berakhirnya Perang Dunia II membuat Australia mulai membuka diri terhadap wilayah lain. Ketakutan terhadap munculnya kembali kekuatan Jepang dimasa yang akan datang, melatarbelakangi berdirinya ANZUS<sup>4</sup>, suatu aliansi militer antara Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Selain itu ancaman komunisme dari Cina dan Uni Soviet membawa militer dan politik Australia semakin erat dengan negara-negara barat terutama Amerika Serikat. Sementara itu untuk membendung ancaman komunis di wilayah Asia Tenggara, Australia bersama negara-negara lain, pada tahun 1954 mendirikan *Southeast Asia Treaty Organization* (SEATO).<sup>5</sup>

Ketakutan Australia akan tertinggal dari Asia dikarenakan Asia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat pada era 1990an, membuat Australia merubah kebijakan dan pandangannya terhadap Asia. Bisa dikatakan, dengan berakhirnya Perang Dingin memaksa Australia untuk memikirkan kembali posisi Australia di

---

memaksimalkan peran orang kulit putih. Ketika Holt memimpin Australia, pada tahun 1967 diadakan referendum untuk menentukan posisi orang kulit hitam di pemerintahan. Referendum tersebut menghasilkan keputusan bahwa orang kulit hitam dan kulit putih memiliki hak di pemerintahan. Dan akhirnya pada tahun 1972, Whitlam secara resmi menghapuskan WAP. <http://www.dfat.gov.au/aib/history.html> diakses tanggal 26 November 2006

<sup>4</sup> ANZUS merupakan perjanjian pertahanan antara Australia, Selandia Baru dan Amerika. Perjanjian ini merupakan suatu komitmen bersama jika terjadi serangan terhadap salah satu negara anggota maka diartikan sebagai serangan terhadap semua negara anggota. Sejak tahun 1951 inilah Australia secara formal menjadi sekutu militer Amerika. Jadi dalam hal militer Australia tidak bergantung pada Inggris lagi. Sejak tahun 1986 dikeluarkan Australian Act yang menandakan berakhirnya hubungan hukum dan peradilan (Privy Council) antara Australia dengan Inggris. Namun demikian Australia tetap menjadi monarki konstitusional dibawah Inggris (Ratu Elizabeth II sebagai Ratu Australia). [http://www.australianexplorer.com/australian\\_history.htm](http://www.australianexplorer.com/australian_history.htm) diakses tanggal 26 November 2006

<sup>5</sup> SEATO yang didirikan pada tanggal 8 September 1954 merupakan hasil dari Truman Doctrine dan kebijakan barat dalam rangka membendung kekuatan komunis di Asia Tenggara. Negara pendiri SEATO adalah Australia, Falkland Island, Perancis, Selandia Baru, Pakistan, Philipina, Thailand, Inggris dan Amerika, disusul Vietnam Selatan dan Korea Selatan. Perjanjian ini berakhir pada 30 Juni 1977. <http://www.Encarta.msn/SEATO> diakses tanggal 28 November 2006

dunia, mendefinisikan kembali kepentingan nasionalnya, menguji kembali identitas dan mencari celah baru untuk menjalin hubungan dengan Asia.<sup>6</sup> Ketakutan yang selama ini mewarnai pandangannya terhadap Asia berubah menjadi teman (*from fear to friendship*).<sup>7</sup>

Usaha Australia untuk menjadi “teman” Asia Timur terlihat ketika menjadi *dialogue partner* ASEAN sejak tahun 1974. Kemudian serentetan kerjasama lainnya dibentuk, baik dalam bidang politik, pertahanan, maupun ekonomi dalam kerangka bilateral maupun regional. Sikap Australia yang terkesan menginginkan menjadi bagian dari Asia Timur terlihat jelas ketika Australia di bawah pimpinan Perdana Menteri Hawke yang memerintah pada tahun 1983 sampai 1991.

Pada masa pemerintahan Hawke, Australia meletakkan *engagement with Asia* sebagai prioritas kebijakannya. Penggunaan kata *engagement* dipilih sebagai wujud dari keinginan Australia untuk lebih mendekat ke Asia. *Engagement* tidak hanya berarti komitmen, perjanjian ataupun kesepakatan akan tetapi juga sebagai bentuk usaha untuk lebih memperdalam hubungan dengan Asia.<sup>8</sup> Empat pilar yang menjadi pendekatan Australia dengan Asia untuk mencapai kemakmuran bersama, yaitu:<sup>9</sup>

- Komitmen untuk melakukan liberalisasi ekonomi
- Komitmen untuk kerjasama keamanan wilayah

<sup>6</sup> Gerarld Chan, “Australian and New Zealand Perspectives on Asia-Pacific Development,” dalam Kuang-Sheng Liao, *The New International Order in East Asia*, (Hong Kong: The Chinese University of Hong Kong, 1993), hal. 150

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 151

<sup>8</sup> “An Unshakeable Commitment To The Region,” dalam <http://www.dfat.gov.au/media/speeches/foreign/1997/eaau.html> diakses tanggal 26 November 2006

<sup>9</sup> *Ibid.*



- Komitmen untuk meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan di wilayah
- Komitmen untuk menjadikan hubungan kerjasama ini pada kerjasama jangka panjang

Bagi pemerintah Australia, bukanlah suatu prioritas untuk dapat diterima di Asia namun lebih pada tujuan untuk mencapai kepentingan nasionalnya melalui kerjasama dengan negara-negara Asia. Pemerintah Australia berkomitmen bahwa kerjasama yang dilakukan dengan negara-negara Asia Timur berdasarkan saling menguntungkan meskipun banyak perbedaan.

Kebijakan Australia untuk *engage with Asia* semakin nampak pada masa pemerintahan pengganti Hawke yaitu Paul Keating yang mulai memerintah pada 20 Desember 1991. Diungkapkan secara jelas olehnya bahwa “Asia is where our future lies”.<sup>10</sup> Ditambahkan oleh senator Evans dalam pidatonya tahun 1995 yang menyatakan Australia seharusnya memikirkan dirinya sebagai *East Asian hemisphere nation*.<sup>11</sup> Menurutnya *East Asian hemisphere* membentang dari Cina di sebelah barat sampai Australia dan Selandia baru di sebelah timur.<sup>12</sup> Peta berikut menunjukkan penggambaran dari pendapat senator Evans.

---

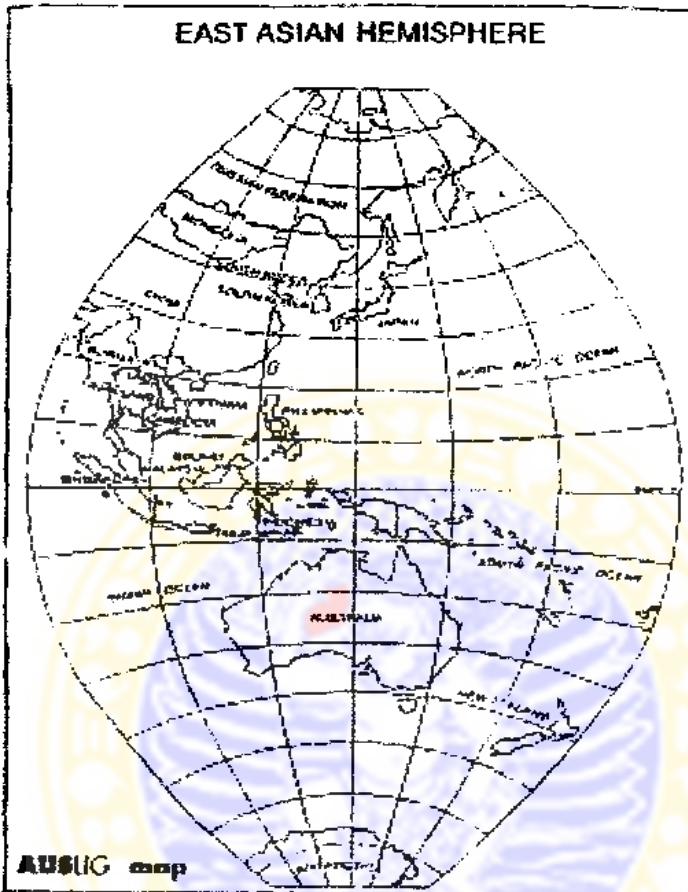
<sup>10</sup> Gerarld Chan, *Op.Cit.*, hal. 149

<sup>11</sup> Anthony Bergin, “Defining the “Asia pacific Region” “, dalam Hadi Soesastro dan Anthony Bergin (ed.), *The Role of Security and Economic Cooperation Structures in The Asia Pacific Region Indonesian and Australian Views*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1996), hal. 13

<sup>12</sup> *Ibid.*



Gambar 3.1



A map of the East Asian Hemisphere referred to by Senator Evans in his speech.  
Source: *Frugli*, 22 August 1995, p. 3.

Pada saat diperintah oleh Keating, Australia aktif dalam melakukan diplomasi dalam bidang ekonomi dengan negara-negara di wilayah Asia Timur. Australia mengajak negara-negara Asia mendirikan organisasi ekonomi yang kemudian dikenal dengan APEC pada tahun 1989. Institusi regional ini didisain untuk mempromosikan kerjasama ekonomi antar negara, menyelesaikan permasalahan bersama dan meningkatkan pembagian keuntungan yang dicapai melalui liberalisasi perdagangan. Selain itu saat terjadi unifikasi Vietnam, PM Keating berkunjung ke Vietnam pada tahun 1994. Dalam kunjungannya tersebut Australia menyatakan keinginannya untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan

ekonomi Vietnam yang ditunjukkan dengan menjadi investor terbesar di Vietnam.

<sup>13</sup> Tidak hanya itu, selama tahun 1993-1994 Australia menempati peringkat ketiga sebagai investor terbesar di Laos, setelah Thailand dan Taiwan. <sup>14</sup>

Namun pada saat Perdana Menteri John Howard memegang tampuk pemerintahan di Australia pada tahun 1996, terjadi perubahan sikap berkenaan dengan Asia. Kebijakan yang dikeluarkannya lebih diprioritaskan dalam isu-isu keamanan, lebih mengeratkan hubungan dengan Amerika dan Inggris serta memacu pada perjanjian perdagangan bilateral yang terlembaga. <sup>15</sup> Artinya dengan Asia tidak ada forum yang dapat dijadikan Australia sebagai sarana untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Ditambah lagi dalam kerangka kerja APT, Australia juga termarginalkan. Hal inilah yang menjadikan Australia terkesan menjauh dari Asia.

Meskipun antara Howard dan Keating terdapat perbedaan dalam membuat kebijakan, namun keduanya tidak melupakan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara lain, dan keduanya sepakat bahwa wilayah Asia Pasifik merupakan kepentingan yang strategis bagi Australia. <sup>16</sup> Howard menolak ide bahwa Australia harus memilih antara sejarah Australia dengan letak geografi Australia. <sup>17</sup> Artinya, meskipun letak Australia berdekatan dengan Asia bukan

---

<sup>13</sup> [http://www.dfat.gov.au/dept/annual\\_reports/93-94/1.2.html](http://www.dfat.gov.au/dept/annual_reports/93-94/1.2.html) diakses tanggal 2 Desember 2006

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Takashi Terada, "The Japan-Australia Partnership In The Era Of The East Asian Community: Can They Advance Together", dalam *Pacific Economic Papers*, No. 352, Agustus 2005, hal. 1

<sup>16</sup> Cavan Hogue, "Australia And Asia Yesterday, Today and Tomorrow," dalam Daljit Singh dan Anthony Smith (ed.), *Southeast Asian Affair*, 2001, hal. 65

<sup>17</sup> Rupert Darwall, "John Howard's Australia", dalam Tod Lindberg (ed.), *Policy Review*, Nomor 132, Agustus dan September 2005, hal. 60

berarti Australia harus menjadi bagian dari wilayah Asia dan harus memutuskan hubungan dengan wilayah lain.<sup>18</sup>

Selama masa pemerintahannya, John Howard memiliki model pemerintahan sendiri dan memiliki kebijakan luar negeri yang dikarakterisasikan sebagai *inconsistent engagement with East Asia*.<sup>19</sup> Wujud *inconsistent engagement* terlihat pada belum adanya kerjasama Australia-Asia yang terlembagakan. Australia merasa terpinggirkan ketika Mahathir mengusulkan EAEC pada tahun 1991 dan pada tahun 1999 Australia tidak diikutsertakan pada forum APT. Meskipun demikian Australia tetap terlibat di Asia melalui peran yang dijalankan dalam hubungan bilateral dengan negara-negara di Asia Timur.

Namun tatkala peran APEC menurun yang salah satu indikatornya ditunjukkan dengan ketidakmampuan APEC dalam usaha pemulihan kondisi Asia yang terkena krisis ekonomi pada tahun 1997-1998, Australia memberikan bantuannya pada Asia. Hal ini menunjukkan Australia tetap memiliki peran di Asia. Selain itu Howard mengatakan:

it was not only possible – but essential – for Australia to build and maintain links with major centers of global power and influence, whilst ensuring that key regional relationships were kept vibrant and strong. We should aggregate our advantages and our opportunities. I have found it entirely counter-productive to have seen my country go through a process of saying, well, in order to make yourself more welcome in one part of the world, you had to be ruder to the other parts of the world and you had somehow or other to cut umbilical cords.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Mark Beeson, "Australia and Asia The Years of Living Aimlessly," dalam Daljit Singh dan Anthony Smith (ed.), *Southeast Asian Affair*, 2001, hal. 54

<sup>19</sup> Takashi Terada, *Op. Cit.*, hal. 2

<sup>20</sup> Rupert Darwall, *Loc. Cit.*

Dalam ucapannya tersebut nampak bahwa Australia tidak menutup kemungkinan untuk bekerjasama dengan wilayah yang dianggap mampu memberikan keuntungan meskipun harus memotong tali hubungan dengan wilayah yang lebih kuat. Hal ini diperkuat dengan pendapat Cavan Hogue bahwa “Australia seeks economic links where money is to be made”.<sup>21</sup>

Ditambah lagi kecenderungan regionalisme baru yang berkembang pasca Perang Dingin menyatakan bahwa negara yang boleh terlibat dalam suatu organisasi regional tidak hanya dibatasi oleh wilayah tertentu, membuat Australia seakan mendapat “lampu hijau” untuk dapat terlibat dalam organisasi di wilayah Asia Timur. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, organisasi regional yang akan dibentuk di wilayah Asia Timur adalah EAC.

Untuk mewujudkan EAC, pada pertemuan APT ke enam tahun 2001, disepakati untuk diselenggarakan KTT 1 Asia Timur di Malaysia. KTT 1 Asia Timur merupakan pintu masuk Australia untuk ikut terlibat dalam pembentukan EAC. Dalam pidato yang disampaikan Downer pada 1 Desember 2005,

The East Asia Summit is only in its very first iteration and will take some time to bed down. But we can say now that we have a regional architecture that serves Australia's interests well. It is open and inclusive. It addresses security and economic issues in a practical way and Australia has a very strong voice in how it develops<sup>22</sup>

Mengetahui ada kesempatan, Australia tidak membuang begitu saja. Berbagai usaha dilakukan agar Australia dapat ikut terlibat dalam KTT 1 Asia Timur tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan Australia adalah dengan

<sup>21</sup> Cavan Hogue, *Op.Cit.*, hal. 66

<sup>22</sup> Ann Rann dan Dr. Frank Frost, “The East Asia Summit, Kuala Lumpur, 14 Desember 2005: Issues and Outcomes,” dalam [http://www.aph.gov.au/library/intguide/FAD/eastasia\\_sumit.htm](http://www.aph.gov.au/library/intguide/FAD/eastasia_sumit.htm) diakses tanggal 10 Oktober 2006



memperdalam kerjasama bilateral dengan negara-negara lain peserta KTT 1 Asia Timur. Bagi Australia, Asia Timur merupakan lokomotif dalam pembangunan ekonomi dunia. Hal ini bisa dilihat dari GDP per tahun negara-negara peserta KTT 1 Asia Timur. Berikut data statistik GDP negara-negara peserta KTT 1 Asia Timur:

Tabel 3.1

## GDP negara-negara peserta KTT 1 Asia Timur

Country	Population	Exchange Rate	GDP (US \$bn):	GDP per capita (US\$):	Real GDP growth (% change YOY):
Australia	20.2 m (2004)	A\$1=US\$0.7666 (Jun 2005)	692.4	33,629	2.6
Brunei	0.4 m (2004)	A\$1=B\$1.2815 (Jun 2005)	5.7	15,764	1.6
Burma (Myanmar)	50.2 m (2004)	A\$1=710.5280 Kyats (2004)	10.4	205	1.3
Cambodia	13.8 m (2004)	A\$1=3,131.68 Riels (Jun 2005)	4.6	317	1.9
China	1,299.8 m (2004)	A\$1=6.3450 Yuan (Jun 2005)	1,851.2	1,416	9.1
India	1,080.3 m (2004)	A\$1=33.4125 Rupees (Jun 2005)	750.8	685	7.1
Indonesia	223.8 m (2004)	A\$1=7,384.79 Rupiah (Jun 2005)	280.9	1,237	5.7
Japan	127.3 m (2004)	A\$1=83.2790 Yen (Jun 2005)	4,694.3	36,841	1.2
Republic of Korea	48.2 m (2004)	A\$1=775.9676 Won (Jun 2005)	819.2	16,897	3.1
Laos	5.8 m (2004)	A\$1=8,061.24 Kip (Feb 2005)	2.7	451	7.0
Malaysia	25.5 m(2004)	A\$1=2.9132 Ringgit (Jun 2005)	129.4	4,989	4.8
New Zealand	4.1 m (2004)	A\$1=NZ\$1.0820 (Jun 2005)	108.7	26,373	2.7
Philippines	86.2 m (2004)	A\$1=42.3019	95.6	1,088	5.1



		Pesos (Jun 2005)			
<b>Singapore</b>	4.2 m (2004)	A\$1=\$1.2815 (Jun 2005)	116.3	27,180	3.7
<b>Thailand</b>	64.6 m (2004)	A\$1=31.3293 Baht (Jun 2005)	178.1	2,736	4.5
<b>Vietnam</b>	82.6 m (2004)	A\$1=11,594.08 Dong (2004)	51.0	610	7.8

Sumber: Ann Rann dan Dr. Frank Frost, "The East Asia Summit, Kuala Lumpur, 14 Desember 2005: Issues and Outcomes," dalam [http://www.aph.gov.au/library/intguide/FAD/eastasia\\_summit.htm](http://www.aph.gov.au/library/intguide/FAD/eastasia_summit.htm) diakses tanggal 10 Oktober 2006

Dari data tersebut menunjukkan bahwa Asia Timur merupakan wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi meskipun terdapat beberapa negara yang memiliki GDP rendah. Namun demikian hal itu tidak menyurutkan keinginan Australia untuk tetap bergabung dalam EAC, karena EAC membuka peluang bagi Australia dalam pencapaian kepentingan nasionalnya.

### III.2 Ekonomi

Sejak awal keterlibatan Australia di wilayah Asia Timur, ekonomi menjadi bidang yang menarik bagi Australia. Wilayah Asia Timur merupakan wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang dinamis menjadi daya tarik tersendiri. Salah satu buktinya adalah adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah Asia Tenggara selama satu setengah dekade yang akhirnya mendorong Australia untuk memperluas dan memperdalam hubungan dengan wilayah ini.<sup>23</sup>

Hal ini ditunjukkan Australia dengan mulai mendekati ASEAN, suatu organisasi regional yang didirikan untuk memajukan perdamaian, stabilitas dan

<sup>23</sup> "Australia-ASEAN Economic Relation," dalam <http://www.aph.gov.au/HOUSE/committee/jfadi/asean/aseansec5.pdf>, hal. 41 diakses tanggal 12 September 2006

kemakmuran wilayah.<sup>24</sup> ASEAN yang didirikan pada tahun 1967 telah menjadi suatu organisasi yang penting terhadap lalu lintas perdagangan dunia.

Kerjasama Australia dengan ASEAN diawali dengan menjadi rekan dialog (*dialogue partner*).<sup>25</sup> Australia merupakan negara pertama di luar Asia Tenggara yang menjalin hubungan dengan ASEAN sebagai rekan dialog yang disahkan di Canberra pada April tahun 1974.<sup>26</sup> Dan sejak tahun 1979, Australia telah berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan menteri luar negeri yang digelar ASEAN.<sup>27</sup> Jadi sebagai negara yang menempati posisi rekan dialog, Australia hadir dalam *Post Ministerial Conferences (PMC)*.<sup>28</sup>

Kerjasama tersebut difokuskan pada bantuan ekonomi yang kemudian dikenal sebagai *Australia-ASEAN Economic Cooperation Program*. Bantuan yang diberikan Australia salah satunya adalah pada saat terjadi krisis ekonomi di Asia. Australia menjadi pemberi bantuan terbesar yang diberikan melalui *International Monetary Fund (IMF)*.<sup>29</sup> Tercatat sekitar A\$3 milyar diberikan Australia sebagai

<sup>24</sup> Australian Chamber of Commerce and Industry, "ASEAN-Australia / New Zealand Free Trade Agreement Worth Pursuing," dalam [http://www.acci.asn.au/text\\_files/issues\\_papers/Trade/ASEAN-Aust-NZ%20\\_August202004\\_.pdf](http://www.acci.asn.au/text_files/issues_papers/Trade/ASEAN-Aust-NZ%20_August202004_.pdf) diakses tanggal 12 September 2006

<sup>25</sup> Selain dengan Australia, ASEAN memiliki Dialogue Partner yang lain yaitu Kanada, Cina, Uni Eropa, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia dan Amerika Serikat serta United Nations Development Program. "Association of South East Asia Nations" dalam <http://www.dfat.gov.au/asean/index.html> diakses tanggal 9 November 2006

<sup>26</sup> "Australia And ASEAN Since 1974" dalam <http://www.aph.gov.au/LIBRARY/Pubs/rn/2004-05/05rn21.html> diakses tanggal 2 November 2006

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> <http://www.dfat.gov.au/asean/index.html>, *Loc.Cit.*

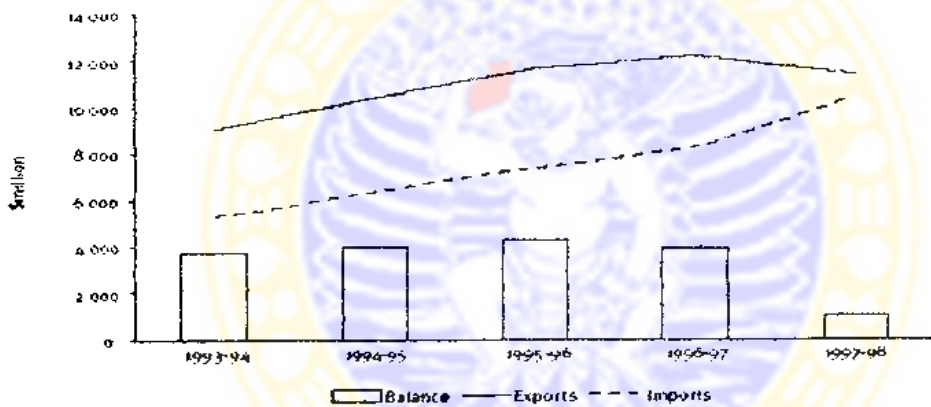
<sup>29</sup> <http://www.aph.gov.au/LIBRARY/Pubs/rn/2004-05/05rn21.html>, *Loc.Cit.*

bantuan untuk memulihkan kondisi perekonomian di Asia.<sup>30</sup> Ditambahkan oleh Downer bahwa “Australia – good neighbour in a crisis”.<sup>31</sup>

Selain menjadi negara yang membantu dalam pemulihan perekonomian selama krisis Asia terjadi, Australia juga melakukan perdagangan dengan ASEAN. Grafik berikut menunjukkan adanya kerjasama perdagangan ASEAN – Australia pada era 1990an.

Grafik 3.2

## Perdagangan Australia – ASEAN 1993-1998



Sumber: DFAT Annual Report 1997-1998 dalam [http://www.dfat.gov.au/dept/annual\\_reports/97\\_98.pdf](http://www.dfat.gov.au/dept/annual_reports/97_98.pdf) diakses tanggal 12 November 2006

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa tingkat perdagangan kedua wilayah terus mengalami peningkatan. Pada saat itu Australia dibawah pemerintahan Keating yang notabene mengarahkan kebijakannya dekat dengan Asia. Namun pada tahun 1996 ketika Howard mulai memegang pemerintahan di Australia tingkat perdagangan mulai menurun sampai terjadinya krisis Asia tahun

<sup>30</sup> Alexander Downer, "What Australia Wishes for ASEAN", dalam [http://www.dfat.gov.au/media/speeches/foreign/2001/010723\\_fa\\_asean\\_wish.html](http://www.dfat.gov.au/media/speeches/foreign/2001/010723_fa_asean_wish.html) diakses tanggal 9 November 2006. Pidato ini disampaikan oleh Downer di Singapura pada tanggal 23 Juli 2001

<sup>31</sup> *Ibid.*

1997-1998. Hal ini wajar terjadi mengingat di Australia terjadi pergantian kepemimpinan yang tentu saja berakibat pada berbedanya kebijakan yang diterapkan. Apalagi kondisi Asia saat itu mengalami krisis. Meski demikian hubungan kedua wilayah ini tidak sampai benar-benar terputus.

Sementara itu, dalam usaha meningkatkan perdagangan antar negara-negara ASEAN, maka pada Pertemuan Puncak ASEAN yang keempat di Singapura tahun 1992 Perdana Menteri Thailand mengusulkan tentang pembentukan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA).<sup>32</sup> AFTA didirikan sebagai respon terhadap pasar regional lainnya seperti *North American Free Trade Area* (NAFTA).<sup>33</sup> AFTA merupakan cara untuk menghilangkan hambatan dagang diantara negara-negara ASEAN.<sup>34</sup> Untuk mencapai hal tersebut maka dibentuk *Common Effective Preferential Tariffs* (CEPT) yang menerapkan peraturan melalui pengurangan tariff yang sesuai target AFTA yaitu 0-5 %.<sup>35</sup>

AFTA merupakan kesepakatan perdagangan regional di wilayah Asia Tenggara yang beranggotakan seluruh negara anggota ASEAN namun dengan perlakuan yang berbeda. AFTA mulai diberlakukan pada 1 Januari 2002 untuk enam anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Philipina dan Brunei Darussalam. Kemudian untuk anggota yang lain diberikan waktu yang

<sup>32</sup> Lee Davis dkk, "Economic Benefits From An AFTA – CER Free Trade Area," (Canberra: Centre For International Economic, 2000), hal. 9

<sup>33</sup> Mari Pangestu, "Regional Economic Cooperation As An Instrument For Economic Development: An Asian Perspective" dalam Hadi Soesastro (ed.), *Indonesian Perspectives On APEC and Regional Cooperation in Asia Pacific*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1994), hal. 53

<sup>34</sup> [http://www.acci.asn.au/text\\_files/issues\\_papers/Trade/ASEAN-Aust-NZ%20\\_August\\_202004\\_.pdf](http://www.acci.asn.au/text_files/issues_papers/Trade/ASEAN-Aust-NZ%20_August_202004_.pdf), Loc.Cit

<sup>35</sup> Mari Pangestu dan Sudarshan Gooptu, "New Regionalism: Options for East Asia," dalam Kathie Krum dan Homi Kharas (ed.), *East Asia Integrates, A Trade Policy Agenda For Shared Growth*, (Washington: World Bank and Oxford University Press, 2004), hal. 43-44



lebih lama, yaitu tahun 2004 untuk Vietnam, 2006 untuk Laos dan Myanmar serta tahun 2008 untuk Kamboja.<sup>36</sup>

Kemudian tahun 1993 muncul ide untuk lebih mengembangkan hubungan antara AFTA dan *Closer Economic Relations* (CER).<sup>37</sup> Hal ini tercermin dari ucapan Deputy Perdana Menteri Thailand, Dr. Supachai yang menyarankan bahwa AFTA seharusnya menjalin hubungan dengan wilayah perdagangan yang lain termasuk CER, sebagai sarana untuk mewujudkan liberalisasi perdagangan internasional.<sup>38</sup> Pembentukan AFTA-CER tidak difokuskan untuk menyatukan dua wilayah perdagangan bebas, namun untuk memperluas perdagangan dan investasi di dalam wilayah.<sup>39</sup> Dan tahun 1995 secara resmi disepakati kerjasama *AFTA-CER Linkage* yang bertujuan untuk memfasilitasi aliran perdagangan dan investasi diantara kedua wilayah.<sup>40</sup>

Perkembangan berikutnya saat penyelenggaraan *Informal Ministerial Consultations* (IMC) Oktober tahun 1999, ASEAN mengusulkan untuk membicarakan lebih lanjut mengenai pelaksanaan AFTA – CER dalam kerangka FTA tahun 2010 yang diterima tanpa ragu-ragu oleh CER.<sup>41</sup> Akan tetapi para menteri tersebut tidak mampu untuk membuat keputusan karena ada beberapa

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> CER atau Australia New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement (ANZCERTA) merupakan kerjasama antara Australia dengan Selandia Baru yang terbentuk pada tahun 1983. Kerjasama ini untuk mewujudkan pergangan bebas diantara kedua negara tersebut. Australia New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement dalam <http://www.fta.gov.au/default.aspx?FolderID=283&ArticleID=229> diakses tanggal 2 November 2006

<sup>38</sup> Australia and ASEAN: Managing Change (Melborne: The Parliament of the Commonwealth of Australia, 1998) hal. 62

<sup>39</sup> *Ibid.* 31

<sup>40</sup> [http://www.dfat.gov.au/cer\\_afta/index.html](http://www.dfat.gov.au/cer_afta/index.html) diakses tanggal 12 November 2006

<sup>41</sup> Jiro Okamoto, "The AFTA – CER Linkage Dialogue Revisited: It's Recent Development and Implications", Institute of Developing Economies APEC Study Center, *Working Paper Series 00/01 – No. 1* dalam [http://www.ide.go.jp/English/Publish/Apec/pdf/apec12\\_trade\\_01.pdf](http://www.ide.go.jp/English/Publish/Apec/pdf/apec12_trade_01.pdf) diakses tanggal 12 November 2006



negara anggota ASEAN yang menolak pembentukan AFTA – CER FTA.<sup>42</sup> Negara-negara anggota ASEAN yang paling kuat menolak keikutsertaan CER dalam kerangka FTA dengan AFTA adalah Indonesia dan Malaysia. Bagi Malaysia, Australia tidak memiliki *Asian Value* dan hal ini terlihat pada tidak diikutkannya Australia dalam pembentukan EAEC pada tahun 1990 oleh Mahathir Muhammad.<sup>43</sup> Sementara bagi Indonesia, adanya campurtangan Australia dalam usaha kemerdekaan Timor Timur pada tahun 1999 menjadikan hubungan kedua negara merenggang.<sup>44</sup>

Meskipun demikian keberadaan *AFTA-CER Linkage* tetap diperhatikan, bahkan para menteri ekonomi kedua wilayah, pada 16 September 2001 bersepakat untuk mengarahkan kerjasama tersebut pada terciptanya integrasi ekonomi melalui *Closer Economic Partnership* (CEP) yang berdiri setahun berikutnya, yaitu tahun 2002.<sup>45</sup> Hal ini merupakan perkembangan yang bagus untuk mewujudkan FTA antara AFTA dan CER.<sup>46</sup> AFTA-CER CEP memiliki tujuan, diantaranya:<sup>47</sup>

- Meningkatkan kerjasama di semua bidang perekonomian
- Memajukan pergangan yang lebih luas dan investasi pada tingkat regional maupun global
- Mengurangi hambatan dagang dan investasi

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> [http://www.dfat.gov.au/cer\\_afta/index.html](http://www.dfat.gov.au/cer_afta/index.html) diakses tanggal 10 November 2006

<sup>46</sup> Bilateral, Regional and Multilateral Trade Negotiations [http://www.dfat.gov.au/dept/annual\\_reports/03\\_04/performance/1/1.1.5.html](http://www.dfat.gov.au/dept/annual_reports/03_04/performance/1/1.1.5.html) diakses tanggal 17 November 2006

<sup>47</sup> Ministerial Declaration on the AFTA-CER Closer Economic Partnership dalam [http://www.dfat.gov.au/cer\\_afta/020914\\_aseancer\\_min\\_dec.html](http://www.dfat.gov.au/cer_afta/020914_aseancer_min_dec.html) diakses tanggal 12 November 2006

- Meningkatkan persaingan bisnis

Kalau Australia sulit bergabung dalam kerjasama FTA dengan AFTA, maka kondisi berbeda dialami oleh negara-negara di wilayah Asia Timur Laut seperti Cina, Jepang dan Korea. Cina menunjukkan ketertarikannya dengan FTA pada pertemuan puncak APT di Singapura pada tahun 2000.<sup>48</sup> Menurut Cina kerjasama antara ASEAN dengan Cina dalam bentuk FTA akan memajukan perkembangan ekonomi kedua belah pihak. Akhirnya pembentukan *China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA)* disepakati pada pertemuan puncak APT keenam yang dilaksanakan di Kamboja tahun 2002.<sup>49</sup>

Setelah Cina menyetujui pembentukan CAFTA, Jepang juga mengajukan untuk ikut bergabung dalam FTA dengan ASEAN. Pada Januari tahun 2002 Jepang menandatangani perjanjian bilateral dengan Singapura dalam kerangka FTA.<sup>50</sup> Kesepakatan ini dimaksudkan untuk mengimbangi CAFTA.<sup>51</sup> Pada tahun yang sama Jepang mengajukan kerjasama dengan ASEAN dalam bentuk *Closer Economic Partnership*.<sup>52</sup> Lebih lanjut lagi Korea juga mempelajari kerjasama dengan ASEAN dalam *Closer Economic Partnership (CEP)* pada Maret 2004.<sup>53</sup>

Selama Australia mendapat tentangan dari Indonesia dan Malaysia, Australia mendekati negara-negara lain untuk membentuk kerjasama FTA. Australia akan mengambil setiap kesempatan untuk meningkatkan peranan di pasar internasional serta memenuhi ambisi pencapaian perdagangan bebas di

---

<sup>48</sup> Yul Kwon, "East Asian Regionalism Focusing On Asean Plus Three," *The Journal Of East Asian Affairs*, 2004, hal. 99

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Mari Pangestu, *Loc.Cit.*

<sup>51</sup> Yul Kwon, *Loc.Cit.*

<sup>52</sup> Mari Pangestu, *Loc.Cit.*

<sup>53</sup> Yul Kwon, *Loc.Cit.*

tingkat bilateral dan regional.<sup>54</sup> Pada tanggal 17 Februari 2003 di Singapura, telah ditandatangani kerjasama Australia-Singapura dalam kerangka FTA yang dikenal dengan *Singapore Australia Free Trade Agreement* (SAFTA) dan mulai berlaku pada 28 Juli 2003.<sup>55</sup> Penandatanganan ini dilakukan oleh Menteri Perdagangan Australia, Mark Vaile dan dari pihak Singapura dilakukan oleh Menteri Perdagangan dan Industri, George Yeo.<sup>56</sup> Lebih lanjut lagi dalam SAFTA pengurangan tarif ditujukan untuk meningkatkan akses pasar Australia dalam hal pendidikan, lingkungan, telekomunikasi dan pariwisata.<sup>57</sup>

Usaha Australia untuk mempermudah akses pasar di wilayah Asia Tenggara dicapai melalui kerjasama dengan Thailand. Kerjasama yang dimaksud adalah *Thailand Australia Free Trade Agreement* (TAFTA). TAFTA ditandatangani oleh Perdana Menteri Australia, John Howard dan Thailand, Thaksin Sinawatra di Canberra pada 5 Juli 2004 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2005.<sup>58</sup> Kerjasama ini semakin memudahkan akses Australia dalam hal perdagangan dan investasi. Pada mulanya banyak perusahaan Australia yang tidak bisa masuk Thailand dikarenakan adanya tingginya tariff perdagangan, namun dengan adanya TAFTA akan membuka kesempatan baru terhadap lintas perdagangan, terutama dalam bidang pertanian, makanan, dan barang-barang otomotif.<sup>59</sup> TAFTA menawarkan

---

<sup>54</sup> Bilateral and Regional Trade Relationships, dalam [http://www.dfat.gov.au/facts/pdfs\\_2004/bilateral\\_trade.pdf](http://www.dfat.gov.au/facts/pdfs_2004/bilateral_trade.pdf) diakses tanggal 12 November 2006

<sup>55</sup> Australia's Relationship With ASEAN, *Loc. Cit.*

<sup>56</sup> [http://www.dfat.gov.au/trade/negotiations/australia\\_singapore\\_agreement.html](http://www.dfat.gov.au/trade/negotiations/australia_singapore_agreement.html) diakses tanggal 2 November 2006

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> "Australia's Relationship With ASEAN," dalam <http://www.dfat.gov.au/asean/> diakses tanggal 2 November 2006

<sup>59</sup> "Thailand-Australia Free Trade Agreement," dalam <http://www.fta.gov.au/default.aspx?FolderID=259&ArticleID=205> diakses tanggal 2 November 2006

kesempatan bagi Australia untuk lebih menggali pasar-pasar baru demi kelancaran ekspor dan tercapainya liberalisasi perdagangan di wilayah ini.<sup>60</sup>

Mulai bergabungnya beberapa negara anggota ASEAN dengan Australia dalam FTA membuat negara-negara anggota ASEAN yang lain harus memikirkan hal tersebut. Dan terbukti pada September 2004, ASEAN bersepakat untuk mulai membicarakan lagi pembentukan FTA antara kedua wilayah yang tentu saja disambut baik oleh Australia.<sup>61</sup> Akhirnya tanggal 30 November 2004, ketika berlangsung Pertemuan Puncak ASEAN di Vientiane, Laos, Perdana Menteri Australia, John Howard bersama dengan ASEAN dan Selandia Baru mengumumkan bahwa konsep perdagangan bebas diantara ketiga wilayah ini akan dinegosiasikan pada tahun 2005.<sup>62</sup>

Menurut perhitungan Menteri Perdagangan Australia, Mark Vaile, keuntungan yang akan dicapai Australia dalam kerangka kerjasama ini mencapai US\$19.1 miliar selama periode tahun 2000-2020.<sup>63</sup> Ditambahkan oleh Vaile "With a population of 545 million, combined GDP of almost US\$700 billion and growth rates predicted to be well above the global average in coming years, ASEAN presents exciting commercial opportunities for Australia".<sup>64</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> "ASEAN Economic Ministers Recommend Negotiations on FTA", dalam [http://www.trademinister.gov.au/releases/2004/mvt074\\_04.html](http://www.trademinister.gov.au/releases/2004/mvt074_04.html) diakses tanggal 17 November 2006

<sup>62</sup> The Australia - ASEAN - New Zealand Free Trade Agreement dalam <http://www.apf.gov.au/LIBRARY/Pubs/rn/2004-05/05rn21.htm> diakses tanggal 2 November 2006.

<sup>63</sup> Mark Vaile, "New Study Shows Big Gains From AFTA-CER Free Trade Area", dalam [http://www.dfat.gov.au/media/releases/trade/2000/mvt072a\\_00.html](http://www.dfat.gov.au/media/releases/trade/2000/mvt072a_00.html) diakses tanggal 12 November 2006

<sup>64</sup> "ASEAN-Australia-NZ Free Trade Agreement Talks Begin" dalam [http://www.trademinister.gov.au/releases/2005/mvt011\\_05.html](http://www.trademinister.gov.au/releases/2005/mvt011_05.html) diakses tanggal 17 November 2006



Seperti telah disebutkan sebelumnya dalam kerangka EAC juga melibatkan negara-negara di wilayah Asia Timur Laut, yaitu Cina, Jepang dan Korea Selatan. Negara-negara ini bagi Australia cukup penting karena Australia telah menjalin hubungan bilateral yang cukup lama. Selain itu ketiga negara tersebut merupakan partner dagang Australia yang potensial.

Dalam hal ekonomi Australia telah menjalin kerjasama dengan Jepang, yang dimulai sejak berakhirnya PD II. Kerjasama bilateral ini dilakukan berdasar pada pembagian nilai dan prinsip.<sup>65</sup> Seperti yang diungkapkan oleh John Howard “We share fundamental strategic interests, and cooperate closely on political and security issues. And of course, our trade and economic links, long a mainstay of the relationship, continue to flourish. Ours is also a relationship that is grounded in common values”<sup>66</sup>

Hubungan bilateral kedua negara berawal dari tahun 1947 yang ditandai dengan didirikannya kantor kedutaan Australia di Jepang.<sup>67</sup> Sejak itu jangkauan bidang kerjasama Australia – Jepang telah meluas meliputi bidang ekonomi, politik, budaya dan bidang-bidang lain yang diarahkan untuk mencapai kemakmuran dan stabilitas wilayah.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> Co – Chairs’ Statement, “Australia – Japan Conference for Creative Partnership,” dalam [http://www.dfat.gov.au/geo/japan/aj\\_conf/co\\_chair\\_statement\\_2002.pdf](http://www.dfat.gov.au/geo/japan/aj_conf/co_chair_statement_2002.pdf) diakses tanggal 17 November 2006

<sup>66</sup> Alexander Downer, “The Australia – Japan Partnership – Growing Stronger Together”, dalam <http://www.australia.or.jp/english/seifu/speeches/?pid=TKS03/2005> diakses tanggal 17 November 2006. Pidato ini disampaikan Menteri Luar Negeri Australia pada tanggal 22 Maret 2005

<sup>67</sup> “Japan-Australia Relations” dalam <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/australia/index.html> diakses tanggal 18 November 2006

<sup>68</sup> *Ibid.*



Australia dan Jepang bekerjasama dalam tiga kepentingan dasar.<sup>69</sup>

Pertama dalam bidang ekonomi dan keamanan dengan memandang Amerika sebagai kekuatan yang mampu menjaga stabilitas wilayah. Kedua, Australia dan Jepang memajukan liberalisasi perdagangan dan investasi melalui peran mereka di *World Trade Organisation (WTO)* dan *APEC*. Dan ketiga mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam hubungan internasional.

Perdagangan antara Australia dan Jepang meningkat dengan cepat selama tahun 1970an dan relatif stabil pada tahun 1980an sampai pertengahan tahun 1990.<sup>70</sup> Kondisi ini tetap bertahan sampai tahun 2000an. Hal ini berarti, Jepang merupakan pasar ekspor yang besar bagi Australia. Ditambahkan oleh Howard bahwa "Australia has no greater friend in Asia than Japan".<sup>71</sup> Berikut disajikan grafik perdagangan Australia – Jepang dari tahun 1993-1998 dan dari tahun 2001-2005. Dari kurun waktu sepuluh tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa perdagangan dengan Jepang meskipun terlihat naik turun akan tetapi Australia tidak pernah mengalami defisit.

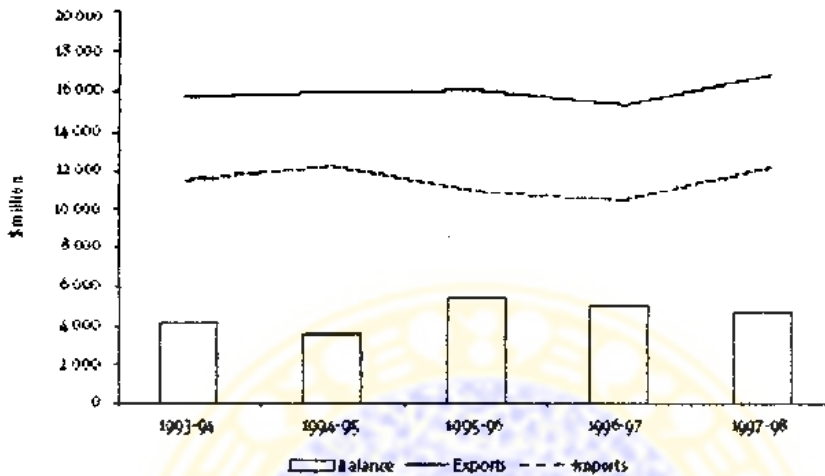
<sup>69</sup> Alexand Downer, "Australia and Japan: Cooperation in the Region," dalam [http://www.dfat.gov.au/geo/na/media/MEDIA-japan\\_downer.html](http://www.dfat.gov.au/geo/na/media/MEDIA-japan_downer.html) diakses tanggal 17 November 2006. Pernyataan ini disampaikan Downer di Tokyo dalam acara Japan's National Press Club, tanggal 6 Juni 1996

<sup>70</sup> <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/australia/index.html>, Loc. Cit.

<sup>71</sup> Mark Vaile, "Joint Business Conference," dalam [http://www.ajf.australia.or.jp/aboutajf/publications/occasionalpapers/docs/aj\\_joint\\_business\\_conference.pdf](http://www.ajf.australia.or.jp/aboutajf/publications/occasionalpapers/docs/aj_joint_business_conference.pdf) diakses tanggal 17 November 2006

Grafik 3.3

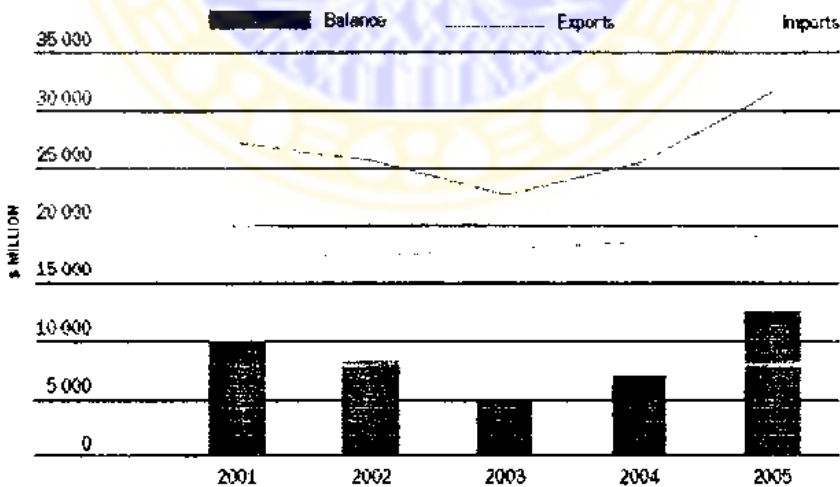
Perdagangan Australia – Jepang 1993-1998



Sumber: DFAT Annual Report 1997-1998 dalam [http://www.dfat.gov.au/dept/annual\\_reports/97\\_98.pdf](http://www.dfat.gov.au/dept/annual_reports/97_98.pdf) diakses tanggal 12 November 2006

Grafik 3.4

Perdagangan Australia – Jepang 2001-2005



(a) Goods data is on a recorded life basis.  
Source: DFAT Trade Database; ABS Regional services data 2005

Dari kedua grafik di atas menunjukkan bahwa selama melakukan kerjasama perdagangan dengan Jepang, nilai ekspor Australia lebih tinggi

disbanding nilai impor. Hal ini yang menjadikan Australia berkeinginan untuk meningkatkan perdagangan dengan Jepang melalui FTA. Pada bulan April 2005 dicapai kesepakatan tentang FTA yang bertajuk "*Agreement to conduct a joint Free Trade Agreement (FTA) feasibility study*".<sup>72</sup>

Berbeda dengan Jepang yang memiliki kemudahan dalam menjalin kerjasama dengan Australia karena keduanya memiliki beberapa kesamaan, maka hubungan Australia – Cina memerlukan waktu yang lebih lama. Hal ini dikarenakan ketika Cina dipimpin Mao Zedong, Cina merupakan negara yang terisolasi. Oleh karena itu, baru ketika terjadi perubahan domestik, Cina dapat menjalin hubungan dengan negara lain.

Kerjasama antara Australia dan Cina terbentuk pada 21 Desember 1972 yang ditandai dengan hubungan diplomatik. Kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama yang berdasar pada saling menghargai integritas wilayah dan kedaulatan, non-agresi, tidak saling melakukan intervensi dalam urusan domestik, menjunjung persamaan derajat, serta hidup berdampingan dengan damai.<sup>73</sup> Setahun setelah perjanjian diplomatik tersebut, yaitu pada 24 Juli 1973 dicapai perjanjian perdagangan antara kedua negara.<sup>74</sup> Dengan demikian Cina telah menjadi partner dagang Australia di wilayah Asia Timur.

Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, Cina masih membutuhkan bantuan dana, sumber daya alam dan teknologi yang bisa terpenuhi

<sup>72</sup> <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/australia/index.html>, *Op.Cit.*

<sup>73</sup> "Australia – China Relationship," dalam [http://www.petra.ac.id/asc/int\\_relations/australia\\_asia/australia\\_china](http://www.petra.ac.id/asc/int_relations/australia_asia/australia_china) diakses tanggal 18 November 2006

<sup>74</sup> [http://www.petra.ac.id/asc/int\\_relations/australia\\_asia/australia\\_china/economic.html](http://www.petra.ac.id/asc/int_relations/australia_asia/australia_china/economic.html) diakses tanggal 18 November 2006

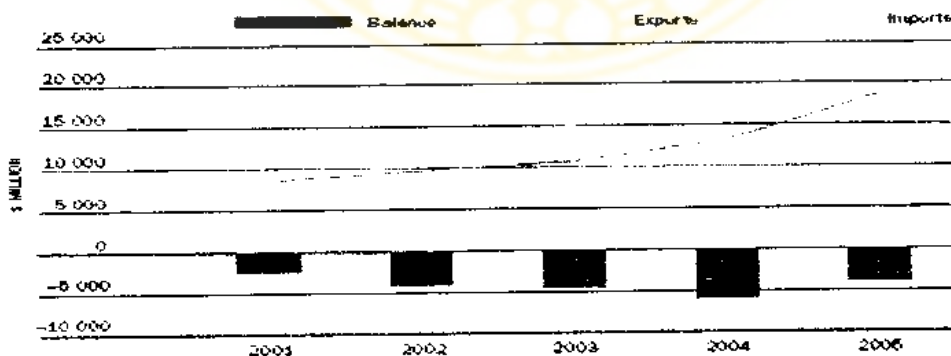
dengan tetap menjalin kerjasama dengan negara lain, termasuk Australia. Australia mendukung Cina sebagai motor perdagangan regional dan global, memiliki kontribusi dalam keamanan dan pencapaian kemakmuran regional serta sebagai partner untuk mencapai kepentingan nasional.<sup>75</sup> Selain itu terdapat beberapa alasan yang menjadikan kerjasama Australia – Cina semakin kuat, yaitu:

76

- Memperluas perdagangan dan investasi
- Memperluas kerjasama dalam bidang politik dan keamanan
- Adanya hubungan personal yaitu antar masyarakat

Dalam bidang perdagangan ekspor impor antara kedua negara belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan perdagangan dari tahun 2001-2005. Dari grafik yang disajikan terlihat bahwa Australia masih mengalami defisit. Berikut grafik perdagangan Australia dengan Cina tahun 2001-2005.

Grafik 3.5  
Perdagangan Australia – Cina 2001-2005



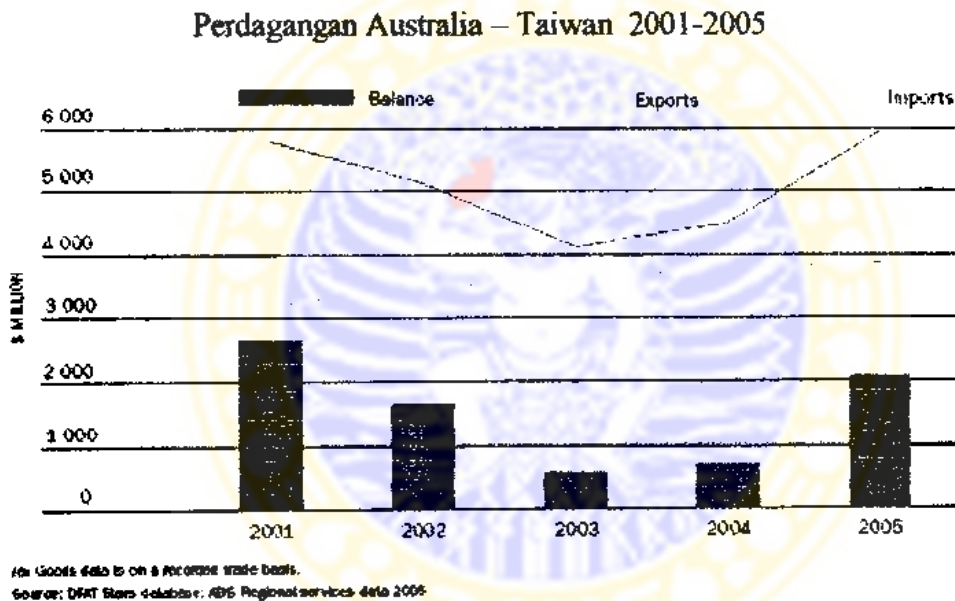
(a) 2005 data is on a recorded trade basis.  
Source: DFAT Trade database; IHS Regional Services data 2005

<sup>75</sup> "Australia and China's Shared Interests – Security and Strategic Dimensions," dalam [http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2004-040813\\_australia\\_china\\_fta.html](http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2004-040813_australia_china_fta.html) diakses tanggal 18 November 2006. Pidato ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri pada tanggal 13 Agustus 2004 di Sydney

<sup>76</sup> *Ibid.*

Tingkat perdagangan yang belum menguntungkan bagi Australia tidak membuat Australia menghentikan kerjasama perdagangan tersebut. Australia tetap melihat Cina sebagai pasar yang potensial bagi Australia. Selain itu Australia menjalin hubungan dagang dengan Taiwan. Sejak Cina memberlakukan *One China Policy*, Australia juga bisa bekerjasama dengan Taiwan. Berikut disajikan grafik pertumbuhan perdagangan Australia-Taiwan tahun 2001-2005.

Grafik 3.6



Dari tabel di atas, dari tahun 2001-2005 dapat diketahui bahwa selama melakukan perdagangan dengan Taiwan, Australia tidak pernah defisit, meskipun pada tahun 2003-2004 tingkat perdagangannya mengalami penurunan. Dengan optimisme tinggi, Australia tetap melanjutkan perdagangan ini demi mencapai kemakmuran regional. Untuk itulah membicarakan kelangsungan kerjasama perdagangan yang mengarah pada FTA penting dilakukan karena juga dapat meningkatkan investasi kedua negara. Jika benar-benar terjadi FTA antara



Australia dan Cina maka akan menjadi FTA pertama Cina dengan negara maju.<sup>77</sup>

Dan pada tahun 2003 didirikan *China FTA Study Taskforce* yang akan mempelajari kerangka kerja FTA.<sup>78</sup>

Sementara itu, mengutip pernyataan Downer, bahwa di masa pemerintahannya yang masih baru, pemerintah Australia melihat penguatan kedekatan dengan Asia merupakan kebijakan luar negeri yang paling penting dan dengan menjalin kerjasama dengan Korea Selatan menjadi elemen dasar untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut.<sup>79</sup> Korea Selatan juga menjadi sekutu Amerika, jadi kerjasama dengan Korea Selatan bukan merupakan hal baru bagi Australia.<sup>80</sup> Sehingga pada tahun 1965, antara kedua pemerintah ini menandatangani perjanjian perdagangan bilateral.<sup>81</sup>

Perdagangan kedua negara mengalami peningkatan selama awal tahun 1990 dan pada tahun 1997-1998 mengalami penurunan yang disebabkan Korea Selatan mengalami krisis ekonomi. Setelah krisis, pertumbuhan ekspor Australia ke Korea Selatan cukup tinggi yang dapat diketahui dari pertumbuhan grafik perdagangan mulai tahun 2001-2005 berikut.

---

<sup>77</sup> "Australia China and East Asia into The Future," dalam [http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2006/061003\\_au\\_cn\\_ea\\_future.html](http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2006/061003_au_cn_ea_future.html) diakses tanggal 18 November 2006

<sup>78</sup> *Ibid.*

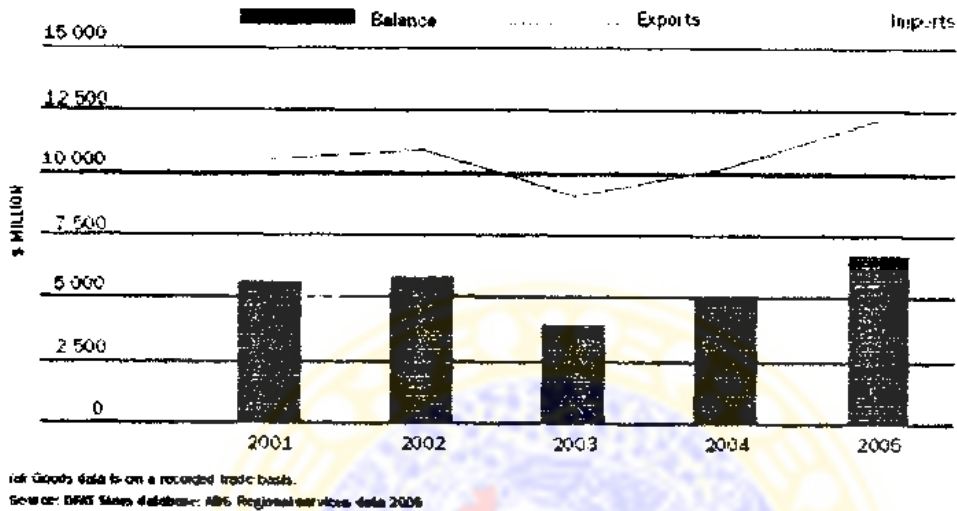
<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> "Australia, Korea and the Region: Building our Relationship," [http://www.dfat.gov.au/media/speeches/foreign/2001/010208\\_fa\\_korea.html](http://www.dfat.gov.au/media/speeches/foreign/2001/010208_fa_korea.html) diakses tanggal 20 November 2006

<sup>81</sup> *Ibid.*

Grafik 3.7

## Perdagangan Australia-Korea Selatan 2001-2005



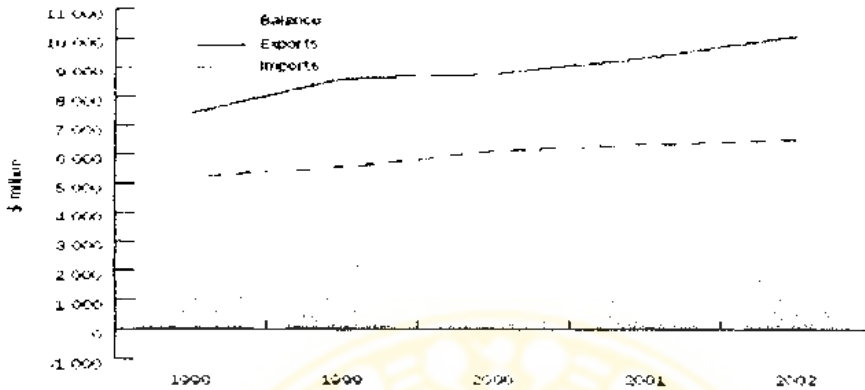
Dari grafik tersebut, selama kurun waktu 2001-2005 perdagangan dengan Korea Selatan menunjukkan surplus yang terus meningkat.

Dengan anggota EAC yang lain, yaitu Selandia Baru dan India, Australia telah mengenal dekat. Terhadap Selandia Baru, Australia merupakan negara tetangga terdekatnya dan telah terjadi ikatan melalui aturan yang menyatakan warga Selandia Baru diperbolehkan mengunjungi, menetap dan bekerja di Australia, dan hal yang sama juga berlaku bagi Australia. Kesepakatan ini terangkum dalam *trans-Tasman Travel Arrangement* tahun 1973.<sup>82</sup> Keduanya juga berperan dalam organisasi di wilayah Asia Pasifik, APEC. Dalam bidang perdagangan Selandia Baru merupakan partner dagang yang menguntungkan bagi Australia. Hal ini terlihat pada grafik berikut.

<sup>82</sup> [http://www.dfat.gov.au/geo/new\\_zealand/](http://www.dfat.gov.au/geo/new_zealand/) diakses tanggal 2 Desember 2006

Grafik 3.8

## Perdagangan Australia-Selandia Baru 1996-2002



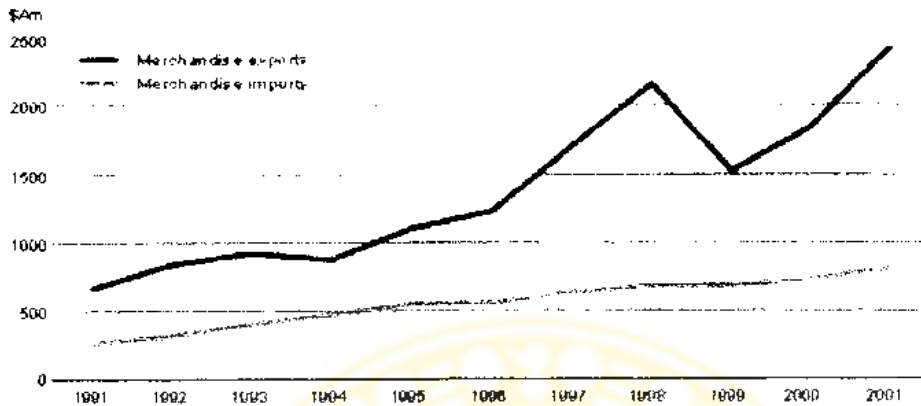
Sumber: [http://www.dfat.gov.au/s2/01/AR/DFAT 2002-03.pdf](http://www.dfat.gov.au/s2/01/AR/DFAT%2002-03.pdf) diakses tanggal 18 November 2006

Sementara dengan India, Australia telah menjalin hubungan bilateral yang cukup lama. India yang sekarang ini telah menunjukkan potensinya sebagai negara kuat melalui peningkatan perekonomiannya merupakan partner dagang yang cukup berarti bagi Australia. Menurut perkiraan *World Bank* pertumbuhan GDP India per tahun mencapai 6.1% selama kurun waktu 2004-2008.<sup>83</sup> Dalam hal perdagangan Australia-India menunjukkan grafik peningkatan yang menguntungkan Australia. Grafik berikut menunjukkan tingkat perdagangan kedua negara.

<sup>83</sup> [http://www.dfat.gov.au/geo/india/india\\_brief.html](http://www.dfat.gov.au/geo/india/india_brief.html) diakses tanggal 2 Desember 2006

Grafik 3.9

## Perdagangan Australia-India 1991-2001

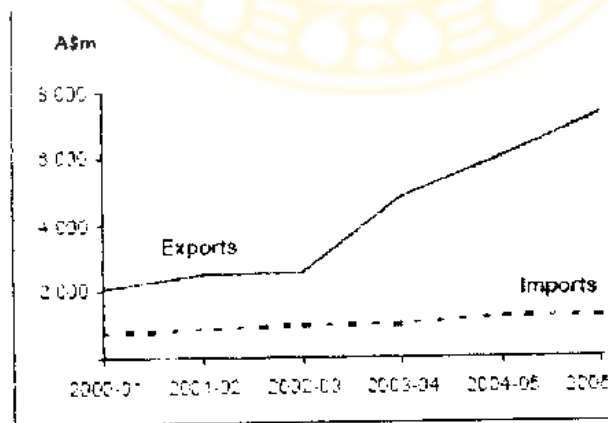


Sumber: <http://www.dfat.gov.au/toos/archive/2002ch6.html> diakses tanggal 28 November 2006

Kondisi ini terus mengalami peningkatan sampai tahun 2005. Hal ini membuat India sebagai pasar yang menjanjikan bagi Australia. Grafik berikut menunjukkan pertumbuhan perdagangan Australia - India tahun 2000-2005

Grafik 3.10

## Perdagangan Australia - India 2000-2005



Sumber: <http://www.dfat.gov.au/geo/fs/india.pdf> diakses tanggal 2 Desember 2006

Adanya hubungan bilateral yang telah dijalin Australia dengan negara-negara anggota EAC, memberi kesan bahwa Australia “bukan orang lain” di

wilayah Asia Timur. Sehingga untuk lebih jauh terlibat dengan wilayah ini Australia telah melakukan awalan yang cukup “mengesankan”. Hal ini dimaksudkan sebagai cara untuk terlibat dalam pembentukan EAC.

Dengan mengikuti organisasi EAC, Australia dapat mempermudah tercapainya kesepakatan liberalisasi perdagangan dengan wilayah Asia Timur. Ini tercermin dari tujuan dan konsep pendirian EAC yang secara lengkap tersaji pada bab II, yaitu mempererat kerjasama ekonomi yang meliputi perdagangan dan investasi yang dicapai melalui penciptaan *East Asian Free Trade Area* (EAFTA) dan memperluas investasi seluruh negara-negara di wilayah Asia Timur. Keinginan ini sebagai kelanjutan usaha Australia untuk menciptakan FTA dengan negara-negara di wilayah Asia Timur. Telah dijelaskan di atas bahwa Australia memaksimalkan kerjasama perdagangan dalam kerangka FTA hanya melalui forum bilateral. Itupun belum semua negara di kawasan Asia Timur bersedia menandatangani. Hal ini terlihat pada masih berlangsungnya proses negosiasi dengan Jepang, Cina, Korea Selatan maupun dengan negara-negara anggota ASEAN. Dengan negara-negara anggota ASEAN, Australia baru mencapai kerjasama FTA dengan Thailand dan Singapura.

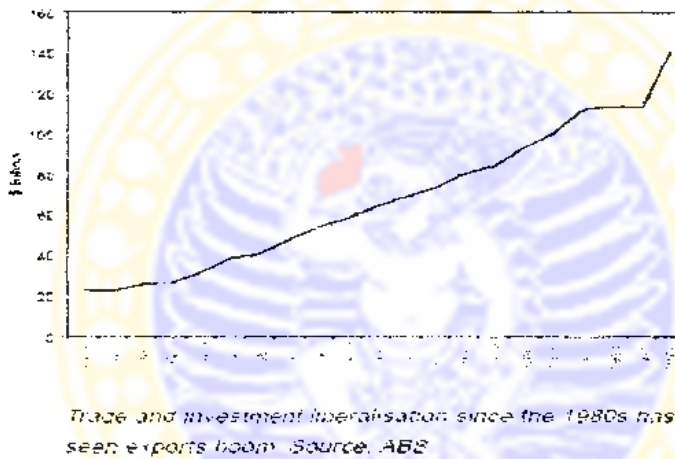
Oleh karena itu, dengan mendukung EAC yang terlihat dari keikutsertaannya dalam forum KTT 1 Asia Timur, Australia berusaha untuk tergabung dalam FTA dengan wilayah Asia Timur. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kemakmuran warga Australia seperti yang telah tertulis dalam *White Paper Policy - Advancing National Interest 2003* “building



*prosperity through market liberalization*".<sup>84</sup> Berdasar data yang penulis peroleh, selama 10 tahun terakhir rata-rata nilai ekspor Australia meningkat sebesar 8.5 % per tahun.<sup>85</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa Australia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Grafik berikut menunjukkan pertumbuhan ekspor Australia mulai tahun 1980-2000.

Grafik 3.11

## Ekspor Australia 1980-2000



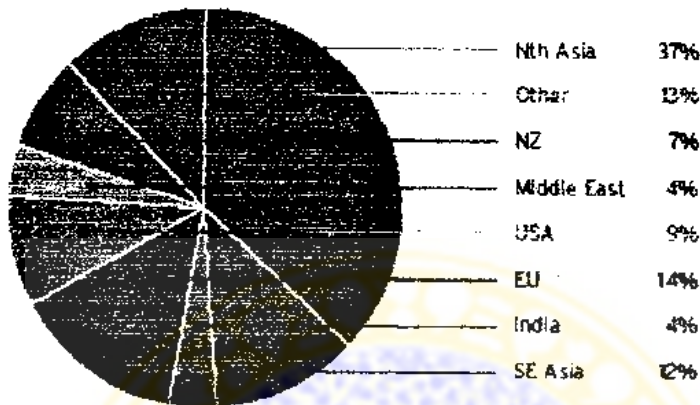
Sementara itu wilayah tujuan ekspor Australia terbagi dalam delapan wilayah dan Asia Timur mendapat porsi yang paling besar. Hal ini dapat dilihat dari bagan berikut ini: Wilayah tujuan ekspor Australia terbagi dalam delapan wilayah dan Asia Timur mendapat porsi yang paling besar. Hal ini dapat dilihat dari diagram berikut ini:

<sup>84</sup> [http://www.dfat.gov.au/ami/dfat\\_white\\_paper.pdf](http://www.dfat.gov.au/ami/dfat_white_paper.pdf) diakses tanggal 26 November 2006

<sup>85</sup> Exploding The Myths: Facts About Trade and International Investment dalam [http://www.dfat.gov.au/publications/exploding\\_myths](http://www.dfat.gov.au/publications/exploding_myths) diakses tanggal 2 Desember 2006

Diagram 3.1

## Wilayah tujuan ekspor Australia tahun 2004



Source: ABS trade data on DFAT STARS database and ABS preliminary regional services data

Dari tabel tersebut wilayah yang terlibat dalam EAC meliputi, Asia Timur Laut, Asia Tenggara, India, dan Selandia Baru yang total jumlahnya mencapai 60% dari total ekspor yang dilakukan Australia di dunia. Oleh karena itu wilayah Asia Timur merupakan wilayah yang sangat potensial bagi pasar Australia.

### III.3 Politik Keamanan

Dalam *White Paper Policy (WPP)* tahun 2003 secara jelas tertulis bahwa kebijakan Australia akan meneruskan WPP tahun 1997 yang berusaha untuk mencapai kepentingan nasional yaitu kesejahteraan dan keamanan warga Australia. Kepentingan nasional Australia ini tidak terbatas pada aspek geografi. Artinya, wilayah Australia yang berada di Asia Pasifik memiliki hubungan dengan wilayah Amerika dan Eropa serta akan tetap meneruskan *engagement* dengan Asia.

Kebijakan luar negeri Australia diarahkan pada komitmen untuk bilateralisme, multilateralisme dan regionalisme. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Australia memiliki hubungan bilateral maupun regional baik di wilayah Amerika, Eropa maupun di Asia Timur. Dengan Asia, Australia telah menjadi anggota *ASEAN Regional Forum (ARF)*. Keterlibatan Australia salah satunya terlihat pada peran yang dijalankan Australia di *ASEAN Regional Forum (ARF)* untuk memajukan kerjasama keamanan regional.<sup>86</sup> ARF merupakan organisasi keamanan regional di kawasan Asia Pasifik yang didirikan pada tahun 1994.<sup>87</sup>

Pada pertemuan ARF yang pertama yaitu tahun 1994 anggota ARF berjumlah delapan belas yang terdiri dari Australia, Brunei, Kanada, Cina, Indonesia, Uni Eropa, Jepang, Laos, Malaysia, Selandia Baru, Papua New Guinea, Korea Selatan, Rusia, Philipina, Singapura, Thailand, Amerika Serikat dan Vietnam. Kemudian pada pertemuan-pertemuan-pertemuan ARF selanjutnya terdapat penambahan jumlah anggota. Pada pertemuan ARF yang ke 2 yaitu tahun 1995, Kamboja ikut bergabung dalam organisasi keamanan ini, kemudian India dan Burma yang masuk menjadi anggota pada tahun 1996. Tahun 1999 Mongolia menjadi anggota ARF ke 22 disusul Pakistan pada tahun 2004 dan Timor Timur (Timor Leste) pada tahun 2005. Jadi total anggota ARF 25 negara.<sup>88</sup>

<sup>86</sup> Foreign Relations of Australia dalam [http://www.dfat.gov.au/Foreign\\_relations\\_of\\_Australia](http://www.dfat.gov.au/Foreign_relations_of_Australia) diakses tanggal 2 November 2006

<sup>87</sup> <http://www.dfat.gov.au/arf/background.html> diakses tanggal 9 November 2006

<sup>88</sup> [http://www.dfat.gov.au/arf/arf\\_members.html](http://www.dfat.gov.au/arf/arf_members.html) diakses tanggal 9 November 2006

ARF dibentuk dengan harapan akan menjadi sebuah forum dialog terbuka dalam bidang politik dan keamanan di kawasan Asia Pasifik.<sup>89</sup> ARF dikembangkan melalui tiga tahap, yaitu:<sup>90</sup>

1. Tahap 1: *Promotion Of Confidence Building Measures*

Dalam tahap pertama ini ditanamkan nilai-nilai musyawarah mufakat dalam membuat keputusan serta pemahaman *good neighborliness*

2. Tahap 2: *Development of Preventive Diplomacy Mechanisms*

Pengembangan *Preventive Diplomacy* sebagai tindak lanjut tahap pertama

3. Tahap 3: *Development of Conflict-Resolution Mechanisms*

ARF akan menciptakan mekanisme resolusi konflik di masa akan datang

Australia memandang ARF sebagai forum multilateral dalam hal keamanan di Asia yang berguna sebagai pelengkap kerjasama bilateral yang sudah ada.<sup>91</sup> Australia aktif melakukan usaha-usaha untuk memberantas terorisme baik dalam lingkup regional maupun internasional. Australia mendukung pembentukan

---

<sup>89</sup> Centre for Nonproliferation Studies, "Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) / ASEAN Regional Forum (ARF)," dalam <http://www.dfat.gov.au/trade/fta/asean.pdf> diakses tanggal 12 November 2006

<sup>90</sup> A Concept Paper, dalam <http://www.dfat.gov.au/arf/statements/arf2conc.html> diakses tanggal 12 November 2006

<sup>91</sup> Department of Foreign Affairs and Trade, "ARF Annual Security Outlook 2003: Australia, Overview of Australia's Security Outlook," dalam [http://www.dfat.gov.au/arf/documents/security\\_outlook\\_2003.html](http://www.dfat.gov.au/arf/documents/security_outlook_2003.html) diakses tanggal 9 November 2006

*ARF Security Policy Conference* sebagai bentuk komitmennya untuk menjaga perdamaian wilayah.<sup>92</sup>

Sejak terjadi tragedi 11 November 2001 yang menimpa gedung *World Trade Centre* (WTC) di Amerika, Australia dengan gigih berjuang untuk menjadikan ARF sebagai kekuatan regional yang melawan terorisme.<sup>93</sup> Ditambah lagi peristiwa pengeboman yang terjadi di Bali pada Oktober 2002 yang merenggut banyak korban dengan kewarganegaraan Australia. Akibat adanya peristiwa-peristiwa seperti inilah yang membuat Amerika melontarkan slogan *War on Terrorism*<sup>94</sup> yang memicu Australia untuk lebih memperhatikan isu global ini.

Australia juga telah menandatangani *Memoranda Of Understanding* (MOU) dengan enam negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Philipina, Brunei, dan Kamboja.<sup>95</sup> Dengan India Australia telah menandatangani MOU pada tahun 2003 yang dilakukan oleh Menlu Australia Alexander Downer dan Menlu India Mr. Yashwant Sinha.<sup>96</sup> Kemudian pada Juli 2004 Downer menandatangani *Joint Australia-ASEAN Declaration for Cooperation to combat International Terrorism*.<sup>97</sup>

<sup>92</sup> "ARF Annual Security Outlook 2004: Australia" dalam [http://www.dfat.gov.au/arf/documents/security\\_outlook\\_2004.html](http://www.dfat.gov.au/arf/documents/security_outlook_2004.html) diakses tanggal 20 November 2006

<sup>93</sup> <http://www.dfat.gov.au/arf/background.html> diakses tanggal 10 November 2006

<sup>94</sup> Akuila Yabaki, "Australia's New Foreign Policy In The Pacific Region," dalam [http://www.ccf.org.fj/artman/publish/article\\_233.shtml](http://www.ccf.org.fj/artman/publish/article_233.shtml) diakses tanggal 26 November 2006

<sup>95</sup> Dr. Frank Frost, "Foreign Affairs, Defence and Trade Section" dalam <http://www.dfat.gov.au/asean/> diakses tanggal 9 November 2006

<sup>96</sup> [http://www.dfat.gov.au/geo/india/india\\_brief.html](http://www.dfat.gov.au/geo/india/india_brief.html) diakses tanggal 2 Desember 2006

<sup>97</sup> Ian Kemish, "South East Asia & Australia: New opportunities and challenges," dalam [http://www.dfat.gov.au/media/speeches/department/041130\\_aiaa\\_kemish.html](http://www.dfat.gov.au/media/speeches/department/041130_aiaa_kemish.html) diakses tanggal 26 November 2006. Pidato ini disampaikan di Australian Institute of International Affairs (AIIA),



Selain penandatanganan MOU Australia memiliki hubungan bilateral dalam hal keamanan dengan Thailand, Philipina, Indonesia dan Vietnam.<sup>98</sup>

Selain masalah terorisme, keamanan menurut kacamata Australia juga menyangkut pengembangan senjata pemusnah massal (*Weapons of Mass Destruction*). Hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam Australia Security Outlook 2003 yang menyatakan:

the strategic environment is being shaped by new and more immediate threats of terrorism and WMD proliferation, as well as continued instability in Australia's immediate neighbourhood. These changed strategic circumstances have implications for the Australian Defence Force, requiring some rebalancing of capabilities to ensure a more flexible and mobile force. This rebalancing will not fundamentally alter the size, structure and roles of the ADF, but will increase the emphasis on readiness, mobility, interoperability and some new capabilities<sup>99</sup>

Salah satu bentuk usaha Australia dalam memerangi WMD adalah dukungan yang diberikan pada Amerika ketika Amerika melakukan invasi atas Iraq tahun 2003. Australia mengirimkan 2.200 pasukan, termasuk pasukan khusus, dan pesawat tempur.<sup>100</sup> Sementara di wilayah Asia Timur, Australia sangat peduli dengan keinginan Korea Utara untuk mengadakan uji coba nuklir yang dimilikinya. Oleh karena itu, melalui kerjasama bilateral yang telah ada, Australia bersama negara-negara di Asia Timur Laut, melakukan usaha-usaha untuk mengatasi krisis di

---

Sydney pada tanggal 30 November 2004. Ian Kemish adalah seorang First Assistant Secretary, South and Southeast Asia Division, DFAT

<sup>98</sup> "ARF (ASEAN Regional Forum) Annual Security Outlook 2002 - Australia" dalam [http://www.dfat.gov.au/arf/document/security\\_outlook\\_2002.html](http://www.dfat.gov.au/arf/document/security_outlook_2002.html) diakses tanggal 9 November 2006

<sup>99</sup> [http://www.dfat.gov.au/arf.documents/security\\_outlook\\_2003.html](http://www.dfat.gov.au/arf.documents/security_outlook_2003.html) diakses tanggal 26 November 2006

<sup>100</sup> Paul Dibb, "U.S.-Australia Alliance Relations: An Australian View" dalam *Strategic Forum*, Nomor 216, Agustus, (Institute for National Strategic Studies National Defense University, 2005), hal. 2

wilayah semenanjung Korea ini. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab sebagai anggota PBB yang berperan dalam perdamaian dunia.

Upaya-upaya Australia dalam rangka menemukan solusi terhadap konflik nuklir Korea Utara tersebut salah satunya dengan mempromosikan *Nuclear Non Proliferation Treaty* (NPT). NPT merupakan perjanjian internasional yang mulai disahkan pada tanggal 1 Juli 1968 untuk mengurangi persebaran senjata nuklir.<sup>101</sup>

Australia menyadari bahwa ancaman dan tantangan ini mengharuskan adanya kerjasama antar negara baik secara bilateral, regional maupun global. Australia menyambut baik usul PM Hashimoto untuk menyelenggarakan pertemuan *Asian Nuclear Safety and Security* tahun 1996.<sup>102</sup> Menurut Australia hubungan bilateral yang kuat akan menjadi pondasi bagi berlangsungnya kepercayaan dan keamanan regional, inilah yang menjadi alasan kedekatan Australia dengan Jepang.<sup>103</sup>

Menghadapi sikap Korea Utara yang tetap bersikeras melakukan uji coba senjata nuklir, PM Korea Selatan, Hyan Moo-hyun dan Presiden Korea Selatan Roh Moo-hyun sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral dengan Australia untuk menemukan resolusi damai terhadap kepemilikan senjata nuklir di Korea

<sup>101</sup> [http://www.Encarata.msn/dictionary/Non\\_Proliferation Treaty](http://www.Encarata.msn/dictionary/Non_Proliferation_Treaty) diakses tanggal 2 Desember 2006. NPT memiliki tiga pilar yaitu pertama non proliferasi yang membolehkan negara-negara tertentu memiliki senjata nuklir, dengan syarat tidak akan menyebarkan senjata tersebut ke negara lain dan tidak akan mengembangkan nuklir yang telah mereka miliki. Negara-negara yang dimaksud adalah Amerika (1968), Inggris (1968), Rusia (1968), Perancis (1992), dan Cina (1992) yang dikenal sebagai Nuclear Weapons States (NWP). Kedua, perlucutan senjata, artinya NWP diwajibkan untuk mengurangi persediaan nuklir. Namun hal ini masih sering dilanggar. Hal ini juga yang melatarbelakangi Korea Utara dan Iran menarik diri dari NPT. Dan ketiga, hak untuk menggunakan teknologi senjata nuklir dengan damai. Hal ini juga yang membuat negara-negara lain berbuat sama. Artinya mereka menggunakan alasan perdamaian atau digunakan sebagai energi untuk memiliki atau menciptakan nuklir.

<sup>102</sup> [http://www.dfat.gov.au/media/speeches/foreign/1996/aust\\_japan.html](http://www.dfat.gov.au/media/speeches/foreign/1996/aust_japan.html) diakses tanggal 18 November 2006

<sup>103</sup> *Ibid.*

Utara.<sup>104</sup> Ditambah lagi kedua negara telah berkomitmen untuk menjaga kestabilan di wilayah Asia Pasifik, jadi masalah yang ada di Korea Utara juga menjadi perhatian pokok. Oleh karena itu Australia akan tetap menjaga hubungan baik dengan Korea Selatan guna mencari penyelesaian yang konstruktif, termasuk bersama-sama secara aktif terlibat dalam ARF.<sup>105</sup>

Hal yang sama juga dilakukan Australia – Cina untuk melawan terorisme dan terhadap pemilikan senjata pemusnah massal (Weapon Mass Destruction).<sup>106</sup> Australia menyambut baik keanggotaan Cina dalam *Nuclear Suppliers Group* serta komitmen Cina dalam non-proliferasi. Terdapat beberapa alasan yang menjadikan kerjasama Australia-Cina semakin kuat, yaitu:<sup>107</sup>

- Memperluas perdagangan dan investasi
- Memperluas kerjasama dalam bidang politik dan keamanan
- Adanya hubungan personal yaitu antar masyarakat

Selain itu bersama dengan Korea Selatan, Jepang, Cina, Indonesia, Vietnam, India dan Thailand, Australia menyelenggarakan dialog keamanan wilayah pada tahun 2002-2003. Australia juga memiliki kerjasama trilateral dengan Amerika dan Jepang. Kerjasama ini semakin meperjelas niat Australia untuk mengatasi masalah keamanan secara bersama-sama.

---

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> "Australia and The Republic of Korea: Strong and Reliable Partners in the Region," dalam [http://www.dfat.gov.au/media/speeches/foreign/2001/010530\\_fa\\_rokeditors.html](http://www.dfat.gov.au/media/speeches/foreign/2001/010530_fa_rokeditors.html) diakses tanggal 20 November 2006

<sup>106</sup> "Australia and China's Shared Interest – Security and Strategic Dimensions," dalam [http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2004/040813\\_au\\_china\\_fta.html](http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2004/040813_au_china_fta.html) diakses tanggal 18 November 2006. Pernyataan ini terangkum dalam pidato Menlu Australia dalam Australia-China Free Trade Agreement Conference di Sydney tanggal 13 Agustus 2004

<sup>107</sup> *Ibid.*

Telah disebutkan sebelumnya, Australia juga bekerjasama dengan wilayah-wilayah lain, seperti *Australia New Zealand United States* (ANZUS). Bahkan setelah Australia menandatangani kesepakatan dalam ANZUS memperlihatkan bahwa untuk urusan keamanan, Australia akan menjadi aliansi Amerika. Menurut perspektif Australia melanjutkan kerjasama dengan Amerika dapat dijadikan sebagai penyokong stabilitas keamanan regional.<sup>108</sup> Hal ini sesuai dengan pernyataan yang terdapat dalam *White Paper on Australia's foreign and trade policy* yang berjudul "Advancing the National Interest on 12 February 2003". Dalam *White Paper* tertulis bahwa:

Australia will continue to use its strong defence capabilities, its alliance with the United States, its extensive network of defence relationships with Asian countries, and its counter-terrorism cooperation and capacity building in the Asia Pacific region to contribute to regional security and stability<sup>109</sup>

Masih adanya keterikatan Australia dengan Amerika inilah yang membuat anggapan setiap kebijakan Australia mengikuti kebijakan Amerika. Hal ini terlihat pada lamanya waktu yang dibutuhkan Australia untuk menandatangani ASEAN *Treaty Of Amity Cooperation* (TAC) yang ditetapkan di Bali pada 24 Februari 1976.<sup>110</sup> ASEAN TAC merupakan seperangkat aturan yang mengikat bagi para anggotanya, bahwa untuk menyelesaikan suatu masalah harus secara damai.<sup>111</sup> Prinsip-prinsip TAC terdiri dari:<sup>112</sup>

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> ARF Annual Security Outlook 2003: Australia Overview of Australia's Security Outlook dalam [http://www.dfat.gov.au/arf/documents/security\\_outlook\\_2003.html](http://www.dfat.gov.au/arf/documents/security_outlook_2003.html) diakses tanggal 9 November 2006

<sup>110</sup> "Instrument Of Extension Of The Treaty Of Amity And Cooperation In Southeast Asia," dalam <http://www.aseansec.org/15280.htm> diakses tanggal 12 November 2006

<sup>111</sup> Robyn Lim, "Australia: Contributing to Regional Equilibrium", dalam *Southeast Asian Affairs*, (Singapura: Institutes of Southeast Asian Studies, 2005), hal. 94

<sup>112</sup> Centre for Nonproliferation Studies, *Loc.Cit.*



- Saling menghargai terhadap kemerdekaan, kedaulatan, integritas wilayah, persamaan dan identitas nasional tiap negara
- Hak setiap negara untuk bebas dari pengaruh dan paksaan asing
- Adanya prinsip tidak mencampuri urusan negara dalam menjalin hubungan antar negara
- Penyelesaian konflik secara damai
- Menolak penggunaan kekerasan dan ancaman
- Meningkatkan kerjasama yang efektif diantara anggota

Negara-negara diluar ASEAN yang bersedia menandatangani TAC adalah Cina, India pada tahun 2003 serta Jepang, Pakistan pada tahun 2004, dan Selandia Baru juga menunjukkan keinginannya untuk menandatangani TAC.<sup>113</sup> Namun Australia yang secara geografi berdekatan dengan wilayah Asia Tenggara belum menandatangani TAC.

Australia merasa ragu untuk menandatangani TAC yang menjunjung tinggi prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, yang menjadi landasan kerjasama ASEAN.<sup>114</sup> Keraguan ini dikarenakan adanya ketakutan Australia akan terbatasnya hubungan diplomasinya dengan negara lain jika tidak membantu Amerika mempromosikan demokrasi dan hak-hak asasi manusia di wilayah Asia Tenggara.<sup>115</sup>

Berlawanan dengan pertimbangan Australia, Marty Natalegawa, juru bicara Departemen Luar Negeri RI mengatakan bahwa TAC merupakan akses

---

<sup>113</sup> Robyn Lim, *Loc.Cit.*

<sup>114</sup> Takashi Terada, *Loc.Cit.*

<sup>115</sup> *Ibid.*



penting bagi Australia untuk lebih mengeratkan hubungan dengan Asia dan merupakan sumbangsih Australia terhadap keamanan kawasan.<sup>116</sup>

Akhirnya pada bulan Juli 2005 Australia menyampaikan dukungan terhadap TAC dan bersedia untuk menandatangani.<sup>117</sup> Pada 10 Desember 2005 Australia menandatangani TAC setelah lima belas tahun bersikukuh untuk menolak TAC.<sup>118</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Australia dalam bidang keamanan mulai mengurangi unilateralisme dengan Amerika. Pernyataan ini terlihat pada *White Paper Policy 2003* yang menyatakan: "Even when U.S. actions do not suit our interest, our strong ties mean that we are better placed to put our views to Washington and that United States will listen to them".<sup>119</sup> Namun demikian Australia akan tetap melanjutkan aliansinya dengan Amerika serta meningkatkan kerjasama pertahanan dengan Asia sebagai wujud kontribusi Australia terhadap keamanan wilayah.<sup>120</sup> Seperti yang diungkapkan Alexander Downer dalam pidatonya tanggal 7 Mei 2002 di Canberra:

In pursuing relations with Asia, we must continue to find the right balance and interplay between Australia's engagement with Asia and our broader international relations. This is not about choosing between regions... it is about maximising our strengths<sup>121</sup>

Dari pernyataan tersebut, tersirat bahwa Australia akan memaksimalkan kekuatannya untuk bekerjasama baik dengan wilayah Amerika, Eropa maupun

<sup>116</sup> PLE Priatna, "Australia, Indonesia dan ASEAN", dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0411/19/opini/1372103.htm> diakses tanggal 9 November 2006

<sup>117</sup> <http://abc.net.au/ra/news/stories/s1499777.htm> diakses tanggal 12 November 2006

<sup>118</sup> After 15 years, Australia is in, dalam *The Star*, 11 Desember 2005 [online] <http://www.orientexpat.com/forum/index.php?showtopic=5484> diakses tanggal 12 November 2006

<sup>119</sup> Dibb, *Loc. Cit*

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> Alexander Downer, "Advancing the National Interest: Australia's Foreign Policy Challenge," dalam [http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2002/020207\\_fa\\_whitepaper.html](http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2002/020207_fa_whitepaper.html) diakses tanggal 26 November 2006

Asia. Tidak seperti dalam kebijakan Australia tahun 1997 yang menyebutkan bahwa Australia akan bekerjasama hanya dengan Asian, namun Asia menjadi perhatian yang pertama. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Menlu Australia dalam pidatonya tanggal 7 Mei 2002, "The fact is that since 1997 we have sought to restore some of the balance in our foreign policy and to get away from an Asia-only focus to an Asia-first focus."<sup>122</sup>

Australia akan menyesuaikan diri dengan wilayah mana Australia bekerjasama. Seperti ketika Australia ingin terlibat dalam KTT 1 Asia Timur maka Australia bersedia menandatangani TAC dengan ASEAN sebagai syarat menjadi anggota KTT tersebut.

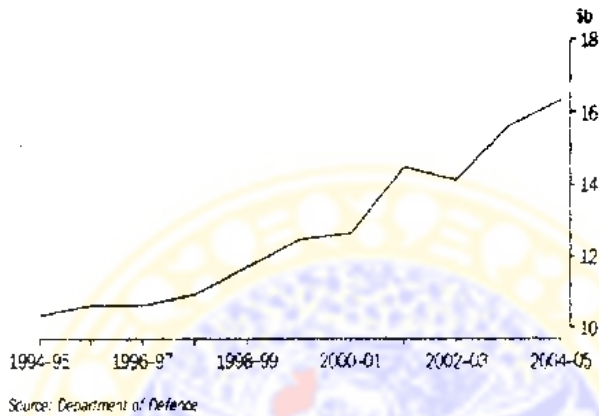
Dengan ikut menjadi bagian dari EAC, maka Australia juga terlibat dalam peningkatan peran wilayah di lingkungan global dalam menciptakan keamanan bersama. Keuntungan ini didasari dari tujuan EAC yaitu mencegah terjadinya konflik dan mempromosikan perdamaian diantara negara-negara di wilayah Asia Timur. Hal ini di capai melalui cara-cara seperti mempromosikan norma-norma, prosedur, dan mekanisme hubungan intra kawasan yang berdasar pada *neighborliness*, saling percaya dan solidaritas yang tinggi serta memperkuat mekanisme untuk mengenali ancaman wilayah. Tujuan dan konsep EAC dalam bidang keamanan ini telah di uraikan pada bab II. Australia sangat peduli dengan keamanan, karena dengan lingkungan yang aman dapat menjaga dan meningkatkan pertumbuhan perdagangan dengan negara maupun wilayah lain. Kepedulian yang besar terhadap keamanan bisa dilihat salah satunya dari

<sup>122</sup> [http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2002/020507\\_fa\\_whitepaper.html](http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2002/020507_fa_whitepaper.html) diakses tanggal 26 November 2006

anggaran dana yang dikeluarkan Australia. Grafik berikut merupakan grafik pengeluaran Australia dalam hal pertahanan dari tahun 1994-2005.

Grafik 3.12

## Anggaran Pertahanan Australia 1994-2005



Dari grafik diatas terlihat jelas, bahwa anggaran dana untuk pertahanan Australia dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini berarti dalam hal keamanan Australia juga menaruh perhatian yang tinggi.

Dengan keterlibatannya dalam EAC semakin menguatkan keinginan Australia untuk menggunakan sistem multilateral dalam hal keamanan. Hal ini seperti yang tertulis dalam *White Paper Policy 2003*, yang menyatakan bahwa “Australia will use the multilateral system to advance our national interest in key areas such as global and regional security...”<sup>123</sup> Dengan demikian Australia tidak hanya mempercayakan keamanan dengan Amerika melainkan dengan wilayah lain.

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas maka dapat diketahui bahwa kepentingan ekonomi dan politik keamanan bagi Australia merupakan

<sup>123</sup> [http://www.dfat.gov.au/au/dfat/white\\_paper.pdf](http://www.dfat.gov.au/au/dfat/white_paper.pdf) diakses tanggal 26 November 2006

kepentingan nasional yang penting. Hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam *White Paper 2003* yang merupakan landasan bagi kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh Australia sebagai upaya pencapaian kepentingan nasional. *White Paper Policy 2003* mencantumkan “The purpose of Australian foreign and trade policy is to advance the national interest – the security and prosperity of Australia and Australians.”<sup>124</sup>

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam upaya mewujudkan dua kepentingan tersebut Australia menggunakan pendekatan sistem multilateral. Dalam hal keamanan Australia fokus pada usaha-usaha melawan terorisme dan segala yang mengancam keamanan Australia. Menurut Australia untuk mencapai keamanan diperlukan tidak hanya usaha-usaha domestik akan tetapi diperlukan penanganan secara kolektif. Oleh karena itu Australia secara aktif bekerjasama dengan negara-negara lain demi mencapai keamanan bersama. Demikian juga dalam hal kemakmuran. Melalui liberalisasi pasar diharapkan mampu menunjang usaha pencapaian kemakmuran tersebut. Jadi pada dasarnya setiap kebijakan yang dibuat Australia diarahkan untuk mencapai keamanan dan kemakmuran.

Sementara itu keterlibatan Australia dalam KTT 1 Asia Timur, berdasar kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini maka bisa dikatakan sebagai usaha untuk membentuk wilayah. Jika disesuaikan dengan langkah-langkah membentuk wilayah maka KTT 1 Asia Timur masih berada dalam tahap pertama yaitu *epistemic communities*. Hal ini dikarenakan dalam KTT 1 Asia Timur hanya menghasilkan keputusan berkaitan dengan bagaimana KTT Asia

---

<sup>124</sup> *Ibid.*

Timur di masa depan. Selain itu dalam KTT 1 Asia Timur hanya menunjukkan negara-negara yang terlibat berasal dari wilayah, kondisi perekonomian dan factor sejarah yang berbeda. Semua hal ini merupakan hal-hal yang terangkum dalam langkah pertama menuju terbentuknya suatu wilayah baru.

Telah disebutkan bahwa yang menghadiri KTT 1 Asia Timur tersebut merupakan para pembuat kebijakan di masing-masing negara, yang berarti keikutsertannya merupakan salah satu cara untuk saling mempengaruhi. Jadi keikutsertaan Australia tersebut merupakan cara Australia untuk dapat memberi pengaruh bagi terbentuknya EAC.





## BAB IV

### KESIMPULAN

Regionalisme baru yang mulai berkembang pasca Perang Dingin membawa perubahan pada organisasi-organisasi regional yang ada. Berbeda dengan regionalisme lama yang kaku dalam penentuan batas wilayah anggota organisasi regional dan hanya bergerak pada satu bidang tertentu, misalnya *North Atlantic Treaty Organisation* (NATO) yang bergerak dalam hal keamanan, penerapan regionalisme baru lebih fleksibel. Hal ini berakibat pada munculnya organisasi-organisasi regional yang multidimensi, artinya tidak hanya bergerak pada satu bidang.

Salah satu wilayah di dunia yang aktif dalam penciptaan organisasi regional adalah Asia Timur, suatu wilayah yang terdiri dari Asia Tenggara dan Asia Timur Laut. Berawal tahun 1990, Perdana Menteri Malaysia Dr. Mahathir Muhammad mencetuskan ide tentang pembentukan organisasi regional yang hanya beranggotakan negara-negara di wilayah Asia Timur. Organisasi regional tersebut dikenal dengan *East Asian Economic Group* (EAEG). Sampai pada akhirnya ada tahun 2001 tercetus untuk mendirikan *East Asian Community* (EAC) yang merupakan evolusi EAEG.

Pembentukan organisasi ini, didasari oleh pandangan Mahathir Muhammad, bahwa wilayah Asia Timur memerlukan organisasi yang mandiri, lepas dari pengaruh barat. Keterlibatan negara-negara di wilayah Asia Timur dalam *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) merupakan salah satu contoh

organisasi regional yang menurut Mahathir Muhammad mendapat pengaruh kuat dari barat. Sementara keberadaan ASEAN sebagai organisasi regional di wilayah Asia Tenggara dirasa belum mampu “berbicara” dalam forum internasional yang lebih besar karena cakupan wilayah yang terlalu sempit. Oleh karena itu pembentukan organisasi yang melibatkan negara-negara di wilayah Asia Timur, sangat dibutuhkan.

Usulan untuk mendirikan organisasi regional di wilayah Asia Timur ternyata tidak berjalan lancar. Hal ini dikarenakan adanya negara-negara besar seperti Amerika dan Australia yang menentang. Selain itu belum tercapainya kesatuan pendapat diantara negara-negara di wilayah Asia Timur yang semakin memperlambat proses terbentuknya organisasi regional.

Namun situasi berubah tatkala terjadi krisis ekonomi di Asia tahun 1997-1998. Peristiwa ini seakan membuka peluang bagi munculnya kembali ide Mahathir Muhammad yang “membeku”. Tahun 1997 juga merupakan awal bagi keterlibatan lebih dalam negara-negara di wilayah Asia Timur Laut dengan Asia Tenggara yang ditunjukkan dengan pemberian bantuan pemulihan kondisi perekonomian Asia melalui *International Monetary Fund* (IMF). Dan pada tahun 1999 secara resmi terbentuk *ASEAN Plus Three* (APT). Terbentuknya APT membuat usaha untuk mewujudkan organisasi regional di wilayah Asia Timur semakin jelas.

Pada akhirnya, berdasarkan laporan dari *East Asian Study Group* (EASG), suatu kelompok kerja yang mendiskusikan langkah-langkah pembentukan EAC, menyatakan bahwa penyelenggaraan KTT Asia Timur sebagai proses untuk

mewujudkan EAC. KTT 1 Asia Timur dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2005.

Akan tetapi muncul keanehan dalam penyelenggaraan KTT 1 Asia Timur tersebut. Peserta KTT tidak hanya dari wilayah Asia Timur, namun terlihat India, Australia dan Selandia Baru sebagai peserta KTT. Ketiga negara tersebut secara geografis tidak terletak di wilayah Asia Timur. Terlebih Australia, negara yang dari awal menolak ide pembentukan organisasi regional di Asia Timur, terlihat ikut serta dalam pembentukan EAC yang diwujudkan sebagai peserta KTT 1 Asia Timur. Australia melakukan usaha-usaha agar dapat ikut serta dalam KTT tersebut.

Seperti telah disebutkan dalam bab II, untuk menjadi peserta KTT Asia Timur setiap negara peserta harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh ASEAN sebagai *driver seat* dalam organisasi ini. Australia mengikuti persyaratan tersebut. Hal ini semakin memperlihatkan bahwa Australia sangat tertarik dengan EAC sehingga bersedia memenuhi persyaratan yang diajukan. Syarat yang paling berat bagi Australia yang pada akhirnya juga dipenuhi adalah penandatanganan *Treaty of Amity Cooperation* (TAC). Setelah selama lima belas tahun menolak menandatangani TAC karena Amerika menunjukkan sikap yang sama, akhirnya pada tanggal 10 Desember 2005 Australia menyatakan kesediannya menandatangani TAC demi mengikuti KTT 1 Asia Timur.

Apa yang melandasi Australia sehingga menunjukkan perubahan sikap dari yang semula menolak menjadi ikut serta dalam pembentukan organisasi regional di wilayah Asia Timur merupakan inti dari penelitian ini. Untuk

membantu penulis mengetahui alasan Australia tersebut, maka sesuai kerangka pemikiran yang telah dijelaskan pada bab I, maka penulis menjadikan Konsep Kepentingan Nasional sebagai acuan dalam penelitian ini.

Melalui pembahasan pada bab III dapat disimpulkan bahwa terdapat kecenderungan yang mendukung hipotesis penelitian ini yang menyatakan alasan keikutsertaan Australia pada EAC adalah untuk mencapai kepentingan nasional dalam hal ekonomi dan politik keamanan. Data-data yang penulis sajikan dalam bab III telah menunjukkan kesesuaian dengan hipotesis.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa EAC merupakan sarana untuk mencapai kepentingan nasional dalam bidang ekonomi. Hal ini nampak pada usaha-usaha yang dilakukan Australia untuk menciptakan kerjasama *Free Trade Area* (FTA). Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya Australia telah memiliki kerjasama bilateral, maupun regional yang strategis di wilayah Asia Timur. Namun dari kerjasama-kerjasama tersebut Australia belum mencapai FTA yang maksimal.

Di wilayah Asia Timur, Australia baru mencapai kerjasama FTA dengan Singapura dan Thailand. Sementara dengan negara-negara lain masih berada dalam tahap negosiasi, seperti dengan Jepang, Cina dan ASEAN. Oleh karena itu keberadaan EAC merupakan wadah yang strategis guna mencapai FTA secara keseluruhan. Jadi pembentukan FTA di wilayah Asia Timur merupakan salah satu konsep EAC yang menguntungkan bagi Australia.

Selain itu, dengan menjadi bagian dalam EAC, Australia telah menjalankan apa yang tertulis dalam *White Paper Policy 2003*, yang menyebutkan

bahwa kepentingan nasional Australia adalah mewujudkan kemakmuran yang dicapai melalui liberalisasi pasar.

Sebagai negara dengan nilai ekspor tinggi, FTA merupakan akses untuk semakin memperbesar keuntungan melalui peningkatan produksi dalam negeri. Ditambah lagi dalam kerjasama EAC yang cakupan negara anggotanya besar yaitu meliputi negara-negara di wilayah Asia Timur, merupakan pasar potensial bagi produk-produk Australia. Adanya pasar yang potensial bagi ekspor Australia, serta kebebasan dalam melakukan interaksi dagang dengan negara lain, maka usaha Australia untuk mewujudkan kemakmuran warga Australia semakin jelas terlihat.

Konsep EAC juga menyebutkan akan memberi perhatian yang tinggi dalam hal keamanan. Australia merasa menciptakan keamanan wilayah tidak hanya memerlukan usaha-usaha dari dalam negeri namun juga kerjasama dengan negara lain. Artinya dalam menangani berbagai ancaman juga diperlukan penanganan secara kolektif.

Australia sebagai negara besar telah memiliki kerjasama dalam hal keamanan dengan wilayah lain. Kerjasama tersebut diantaranya dengan ARF, ANZUS dan kerjasama-kerjasama keamanan bilateral lainnya. Dan sekarang untuk lebih meningkatkan perhatian terhadap keamanan, EAC memberikan sarana tersebut. Dengan ikut menjadi bagian dalam EAC maka Australia semakin menunjukkan kepeduliannya sebagai bagian dari komunitas internasional untuk menciptakan keamanan bersama. Selain itu dengan ikut menjadi bagian dalam



EAC, maka Australia dengan negara-negara di wilayah Asia Timur, secara bersama-sama menciptakan keamanan wilayah.

Dalam bidang keamanan ini, Australia menyesuaikan diri dengan wilayah mana Australia bekerjasama. Misalnya dalam ANZUS yang bekerja dalam pola aliansi maka Australia menerima konsekuensi bahwa serangan terhadap salah satu negara anggota merupakan serangan terhadap semua anggota. Hal ini nampak pada dukungan yang diberikan Australia terhadap Amerika sebagai bentuk aliansi Amerika.

Sementara dengan EAC Australia juga akan menyesuaikan diri. Hal ini terlihat ketika Australia bersedia menandatangani TAC, sebagai syarat untuk dapat terlibat dalam pembentukan EAC. Hal ini dilakukan agar di wilayah manapun, Australia memiliki kelompok kerjasama keamanan sehingga Australia dapat berperan dalam menghadapi isu-isu internasional.

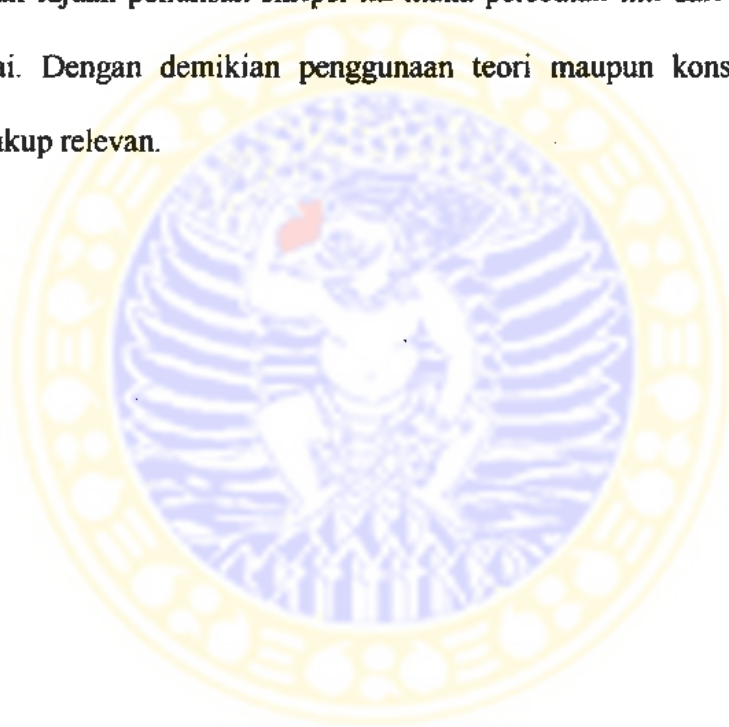
Selain itu terciptanya keamanan wilayah tentu akan mendukung peningkatan perdagangan. Jadi bisa dikatakan dua kepentingan ini merupakan kepentingan yang saling melengkapi dan mendukung guna mencapai kemakmuran dan keamanan warga Australia.

Keikutsertaan Australia dalam organisasi regional di wilayah Asia Timur merupakan fenomena regionalisme baru. Sementara keikutsertaan Australia dalam KTT 1 Asia Timur merupakan salah satu usaha pembentukan wilayah (*region building*). Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya penyebutan suatu wilayah merupakan konstruksi sosial. Jadi ketika Australia, India dan Selandia Baru ikut terlibat dalam KTT 1 Asia Timur, maka hal ini bisa dikatakan sebagai usaha

pembentukan wilayah karena ketiga negara tersebut tidak berada dalam wilayah Asia Timur.

Jika ketiga negara tersebut tetap terlibat dalam organisasi regional Asia Timur, maka menurut penulis perlu diadakan suatu perombakan terhadap istilah Asia Timur. Akan tetapi hal ini tentu bukan suatu pekerjaan mudah.

Terlepas dari apakah akan terjadi pembentukan wilayah baru, dalam kaitannya dengan tujuan penulisan skripsi ini maka persoalan inti dari penelitian ini telah selesai. Dengan demikian penggunaan teori maupun konsep dalam penelitian ini cukup relevan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Buzan, Barry dan Richard Little. 2000. *International Systems In World History, Remaking The Study Of International Relations*. New York: Oxford University Press
- Davis, Lee dkk. 2000. *Economic Benefits From An AFTA - CER Free Trade Area*. Canberra: Centre For International Economic
- Keraf, Gorys. 2001. *Komposisi*. Ende: Nusa Indah
- Kwon, Youngmin. *Regional Community-Building in East Asia*. 2002. Yonsei: Yonsei University Press
- Masoed, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Edisi Revisi. Jakarta: LP3ES
- Morgenthau, Hans J., 1978. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, Edisi Revisi / Edisi ke 4. New York: Alfred A. Knopf
- Roueke, John T. dan Mark A. Bayer. 1998. *World Politics, International Politic On The World Stage Brief*, Edisi Kedua. USA: Dushkin/McGraw-Hill
- Russet, Bruce dan Harvey Starr. 1985. *World Politics The Menu For Choice*, Edisi Kedua. New York: W.H. Freeman and Company.
- Subagyo, P. Joko., 1997. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta
1998. *Australia and ASEAN: Managing Change*. Melbourne: The Parliament of the Commonwealth of Australia

### ARTIKEL DALAM BUKU

- Bergin, Anthony. "Defining the Asia Pacific Region," Soesastro, Hadi dan Anthony Bergin (ed.). 1996. *The Role Of Security And Aconomic Cooperation Structures In The Asia Pacific Region, Indonesian and Australian Views*. Jakarta: CSIS.

- Buzan, Barry. "The Asia-Pacific: what sort of region in what sort of world?," McGrew, Anthony dan Christopher Brook (ed.). 2000. *Asia-Pacific in the New World Order* London: Routledge
- Chan, Gerarld. "Australian and New Zealand Perspectives on Asia-Pacific Development," Liao, Kuang-Sheng (ed.). 1993. *The New International Order in East Asia*. Hong Kong: The Chinese University of Hong Kong.
- Couloumbis, Theodore A. dan James H. Wolfe, "National Interest and Other Interest," Couloumbis, Theodore A. *et al* (ed.). 1981. *Introduction to International Relations Power and Justice*. New Delhi: Prentice Hall of India Private Limited.
- Pangestu, Mari dan Sudarshan Gooptu. "New Regionalism: Options for East Asia," Krum, Kathie dan Homi Kharas (ed.). 2004. *East Asia Integrates, A Trade Policy Agenda For Shared Growth*. Washington: World Bank and Oxford University Press.
- Pangestu, Mari. "Regional Economic Cooperation As An Instrument For Economic Development: An Asian Perspective," Soesastro, Hadi (ed.). 1994. *Indonesian Perspectives On APEC and Regional Cooperation in Asia Pacific*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Robinson, Thomas W., "National Interest," Rosenau, James N. (ed.). 1969. *International Politics And Foreign Policy a reader in research and theory*. Edisi Revisi. New York: The Free Press
- Singarimbun, Masri. "Metode dalam Proses Penelitian," Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ed.). 1989. *Metode Penelitian Survei*. Edisi Revisi. Jakarta: LP3ES
- Soesastro, Hadi. "APEC Mau Dibawa Kemana," Bey, M. Estella Anwar dan Herry Sudradjat (ed.). 2006. *APEC 2010/2020*. Jakarta: CSIS.

## JURNAL DAN MAJALAH

- Beeson, Mark. "Australia and Asia The Years of Living Aimlessly," Daljit Singh dan Anthony Smith (ed.), *Southeast Asian Affair*, 2001
- Beyer, Cornelia, "A Presentation of Emanuel Adler's Concepts of Integration", *Alternatives: Turkish Journal of International Relation*, Volume 4, Nomor 3, Musim Gugur 2005

- Darwall, Rupert. "John Howard's Australia," Tod Lindberg (ed.), *Policy Review*, Nomor 132, Agustus dan September 2005
- Dibb, Paul. "U.S.-Australia Alliance Relations: An Australian View," *Strategic Forum*, Nomor 216, Agustus 2005
- Harvie, Charles dan Hyun-Hoon Lee, "New Regionalism In East Asia How does It Relate To the East Asian Model?," *ASEAN Economic Bulletin*, Volume 19, Nomor 2, Maret 2002
- Hogue, Cavan. "Australia And Asia Yesterday, Today and Tomorrow," Daljit Singh dan Anthony Smith (ed.). *Southeast Asian Affair*. 2001
- Kwon, Yul. "East Asian Regionalism Focusing On Asean Plus Three," *The Journal Of East Asian Affais*, 2002
- Lim, Robyn. "Australia: Contributing to Regional Equilibrium", *Southeast Asian Affairs*, April 2005
- Nuechterlein, Donald E. "The Concept of National Interest: A Time for New Approaches," *Orbis: A Journal of World Affairs*, Volume 23, Nomor 1, Musim Semi 1979
- Stubbs, Richard. "ASEAN Plus Three, Emerging East Asian Regionalism?," *Asian Survey*, Volume 42, Nomor 3, Juni 2002
- Terada, Takashi. "The Japan-Australia Partnership In The Era Of The East Asian Community: Can They Advance Together", *Pacific Economic Papers*, Nomor 352, 2005
- Yu, Hyun-Seok. "Explaining The Emergences Of The New East Asian Regionalism: Beyond Power And Interest Based Approaches," *Asian Perspective*, Volume 27, Nomor 1, Agustus 2003

## **KAMUS DAN DOKUMEN RESMI**

- Evans, Graham dan Jeffrey Newnham. 1998. *The Penguin Dictionary of International Relations*. London: Penguin Group
- Griffiths, Martin dan Terry O'Callaghan. 2002. *International Relations: The Key Concepts*. London: Routledge



## SKRIPSI YANG BELUM DITERBITKAN

Sanjaya, I Made Dwi Putra. "Kebijakan Luar Negeri Malaysia 1990: Tentang Usulan Pembentukan East Asian Economic Grouping (EAEG)," Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Surabaya, 1995

## SITUS INTERNET

Abdullah, "Tujuh Perkara Bagi Pembentukan Masyarakat Asia Timur", [www.pmo.gov.my/website/webdb.nsf/040612](http://www.pmo.gov.my/website/webdb.nsf/040612), 23 April 2006

Acharya, Amitav. "After The Global Crises: What Next For Regionalism?" [www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/activitiesnews/conferences/1999\\_conferences/3rdannualconference/papers/Acharya.pdf](http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/activitiesnews/conferences/1999_conferences/3rdannualconference/papers/Acharya.pdf), 28 Agustus 2006

"An Unshakeable Commitment To The Region", [www.dfat.gov.au/media/speeches/foreign/1997/eaau.html](http://www.dfat.gov.au/media/speeches/foreign/1997/eaau.html), 26 November 2006

"An East asia community and The United States", [www.sitiaonline.org/an\\_east\\_asia\\_comunity\\_and\\_the\\_united\\_states](http://www.sitiaonline.org/an_east_asia_comunity_and_the_united_states), 23 April 2006

"ASEAN-Australia / New Zealand Free Trade Agreement Worth Pursuing," [www.acci.asn.au/text\\_files/issues\\_papers/Trade/ASEAN-Aust-NZ%20August202004\\_.pdf](http://www.acci.asn.au/text_files/issues_papers/Trade/ASEAN-Aust-NZ%20August202004_.pdf), 12 September 2006

"Association of South East Asia Nations," [www.dfat.gov.au/asean/index.html](http://www.dfat.gov.au/asean/index.html), 9 November 2006

"Australia-ASEAN Economic Relation," [www.aph.gov.au/HOUSE/committee/jfadt/asean/aseansech5.pdf](http://www.aph.gov.au/HOUSE/committee/jfadt/asean/aseansech5.pdf), 12 September 2006

"Australia And ASEAN Since 1974," [www.aph.gov.au/LIBRARY/Pubs/rn/2004-05/05rn21.html](http://www.aph.gov.au/LIBRARY/Pubs/rn/2004-05/05rn21.html), 2 November 2006

"Australia New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement", [www.fta.gov.au/default.aspx?FolderID=283&ArticleID=229](http://www.fta.gov.au/default.aspx?FolderID=283&ArticleID=229), 2 November 2006

"Australia's Relationship With ASEAN," [www.dfat.gov.au/asean/](http://www.dfat.gov.au/asean/), 2 November 2006

- “ASEAN Economic Ministers Recommend Negotiations on FTA”,  
[www.trademinister.gov.au/releases/2004/mvt074\\_04.html](http://www.trademinister.gov.au/releases/2004/mvt074_04.html), 17 November 2006
- “ASEAN-Australia-NZ Free Trade Agreement Talks Begin”  
[www.trademinister.gov.au/releases/2005/mvt011\\_05.html](http://www.trademinister.gov.au/releases/2005/mvt011_05.html), 17 November 2006
- “Australia – Japan Conference for Creative Partnership,”  
[www.dfat.gov.au/geo/japan/aj\\_conf/co\\_chair\\_statement\\_2002.pdf](http://www.dfat.gov.au/geo/japan/aj_conf/co_chair_statement_2002.pdf), 17  
November 2006
- “Australia – China Relationship,” [www.petra.ac.id/asc/int\\_\\_relations/australia\\_asia/australia\\_china](http://www.petra.ac.id/asc/int__relations/australia_asia/australia_china), 18 November 2006
- “Australia and China’s Shared Interests – Security and Strategic Dimensions,”  
[www.foreignminister.gov.au/speeches/2004/040813\\_au\\_china\\_fta.html](http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2004/040813_au_china_fta.html), 18  
November 2006
- “Australia China and East Asia into The Future,” [www.foreignminister.gov.au/speeches/2006/061003\\_au\\_cn\\_ea\\_future.html](http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2006/061003_au_cn_ea_future.html), 18 November 2006
- “Australia, Korea and the Region: Building our Relationship,”  
[www.dfat.gov.au/media/speeches/foreign/2001/010208\\_fa\\_korea.html](http://www.dfat.gov.au/media/speeches/foreign/2001/010208_fa_korea.html), 20  
November 2006
- “Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) / ASEAN Regional Forum (ARF),” [www.dfat.gov.au/trade/fta/asean.pdf](http://www.dfat.gov.au/trade/fta/asean.pdf), 12 November 2006
- “A Concept Paper,” [www.dfat.gov.au/arf/statements/arf2conc.html](http://www.dfat.gov.au/arf/statements/arf2conc.html), 5 November 2006
- “ARF Annual Security Outlook 2003: Australia, Overview of Australia’s Security Outlook,”  
[www.dfat.gov.au/arf/documents/security\\_outlook\\_2003.html](http://www.dfat.gov.au/arf/documents/security_outlook_2003.html), 9  
November 2006
- “ARF Annual Security Outlook 2004: Australia”  
[www.dfat.gov.au/arf/documents/security\\_outlook\\_2004.html](http://www.dfat.gov.au/arf/documents/security_outlook_2004.html), 20 November 2006
- “ARF (ASEAN Regional Forum) Annual Security Outlook 2002 – Australia”  
[www.dfat.gov.au/arf/document/security\\_outlook\\_2002.html](http://www.dfat.gov.au/arf/document/security_outlook_2002.html), 9 November 2006
- “Australia and The Republic of Korea: Strong and Reliable Partners in the Region,”  
[www.dfat.gov.au/media/speeches/foreign/2001/010530\\_fa\\_rokeditors.html](http://www.dfat.gov.au/media/speeches/foreign/2001/010530_fa_rokeditors.html), 20  
November 2006

“Australia and China’s Shared Interest – Security and Strategic Dimensions,”  
[www.foreignminister.gov.au/speeches/2004/040813\\_aus\\_china\\_fta.html](http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2004/040813_aus_china_fta.html), 18  
November 2006

ARF Annual Security Outlook 2003: Australia Overview of Australia’s Security  
Outlook, [www.dfat.gov.au/arf/documents/security\\_outlook\\_2003.html](http://www.dfat.gov.au/arf/documents/security_outlook_2003.html), 9  
November 2006

“After 15 years, Australia is in,” [www.orientexpat.com/forum/index.php?  
Showtopic=5484](http://www.orientexpat.com/forum/index.php?Showtopic=5484), 12 November 2006

Beng, Phar Kim. “Divining East Asian Integration: From Divide to Divident,”  
[www.waseda-coe-cas.jpg/symposium/pdf0412/phar0412.pdf](http://www.waseda-coe-cas.jpg/symposium/pdf0412/phar0412.pdf), 28 April 2006

Bowring, Philip. “Australia Knocks On The Door And Southeast Asia Hears,”  
[www.iht.com/articles/1996/01/16/edbow.t\\_0.php](http://www.iht.com/articles/1996/01/16/edbow.t_0.php), 16 Juni 2006

Berkofsky, Axel. “Regional Integration in Asia and the East Asian Community –  
A European Perspective,” [www.soc.nii.ac.jp/eusa-  
japan/download/eusa\\_ap/paper\\_AxelBerkofsky.pdf](http://www.soc.nii.ac.jp/eusa-japan/download/eusa_ap/paper_AxelBerkofsky.pdf), 17 mei 2006

Badawi, Abdullah Ahmad. “Challenges On The Way To An East Asian  
Community,” [www.nni.nikkei.co.jp/FR/NIKKEI/inasia/future/2006/2006\\_spee  
chabdullah.html](http://www.nni.nikkei.co.jp/FR/NIKKEI/inasia/future/2006/2006_speechabdullah.html), 16 Juni 2006

Breslin, Shaun, Richard Higgot, Ben Rosamond, “Region In Comparative  
Perspective”, [www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/research/workingpapers/2002/  
wp10702.pdf](http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/research/workingpapers/2002/wp10702.pdf), 28 Agustus 2006

“Bilateral, Regional and Multilateral Trade Negotiations”, [www.dfat.gov.au/dept/  
annual\\_reports/03\\_04/performance/1/1.1.5.html](http://www.dfat.gov.au/dept/annual_reports/03_04/performance/1/1.1.5.html), 17 November 2006

“Bilateral and Regional Trade Relationships,” [www.dfat.gov.au/facts/pdfs\\_2004/  
bilateral\\_trade.pdf](http://www.dfat.gov.au/facts/pdfs_2004/bilateral_trade.pdf), 12 November 2006

“China And The Idea Of An East Asia Community,”  
[www.csis.or.id/events\\_upcoming\\_view.asp](http://www.csis.or.id/events_upcoming_view.asp), 23 April 2006

Chalermphanupap, Termsak, “Towards An East Asian Community: The Journey  
Has Begun,” [www.aseansec.org/13202.htm](http://www.aseansec.org/13202.htm), 23 April 2006

Dillon, Dana. “Watching the east Asia Summit”,  
[www.heritage.org/Press/Commentary/ed081080a.cfm](http://www.heritage.org/Press/Commentary/ed081080a.cfm), 23 April 2006

Downer, Alexander. "What Australia Wishes for ASEAN", [www.dfat.gov.au/media/speeches/foreign/2001/010723\\_fa\\_asean\\_wish.html](http://www.dfat.gov.au/media/speeches/foreign/2001/010723_fa_asean_wish.html), 9 November 2006.

Downer, Alexander. "The Australia – Japan Partnership – Growing Stronger Together", [www.australia.or.jp/english/seifu/speeches/?pid=TKS03/2005](http://www.australia.or.jp/english/seifu/speeches/?pid=TKS03/2005), 17 November 2006

Downer, Alexander. "Australia and Japan: Cooperation in the Region", [www.dfat.gov.au/geo/na/media/MEDIA-japan\\_downer.html](http://www.dfat.gov.au/geo/na/media/MEDIA-japan_downer.html), 17 November 2006

Downer, Alexander. "Advancing the National Interest: Australia's Foreign Policy Challenge", [www.foreignminister.gov.au/speeches/2002/020207\\_fa\\_whitepaper.html](http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2002/020207_fa_whitepaper.html), 26 November 2006

Engelen, Hilde Dominique. "The Construction of Region in The Baltic Sea", [www.sgir.org/conference2004/papers/Engelen](http://www.sgir.org/conference2004/papers/Engelen), 16 Agustus 2006

"Exploding The Myths: Facts About Trade and International Investment", [www.dfat.gov.au/publications/exploding\\_myths](http://www.dfat.gov.au/publications/exploding_myths), 2 Desember 2006

Frost, Dr. Frank. "Foreign Affairs, Defence and Trade Section" [www.dfat.gov.au/asean/](http://www.dfat.gov.au/asean/), 9 November 2006

Hadi, Kristanto. "KTT XI ASEAN dan Integrasi Masyarakat Asia Timur", [www.balipost.com](http://www.balipost.com), 5 April 2006

"Instrument Of Extension Of The Treaty Of Amity And Cooperation In Southeast Asia," [www.aseansec.org/15280.htm](http://www.aseansec.org/15280.htm), 12 November 2006

"Japan-Australia Relations," [www.mofa.go.jp/region/asia-paci/australia/inde.html](http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/australia/inde.html) 18 November 2006

Katzenstein, Peter J. "Regionalism in Comparative Perspective", [www.arena.uio.no/publications/wp96.1.htm](http://www.arena.uio.no/publications/wp96.1.htm), 14 Agustus 2006

Kemish, Ian. "South East Asia & Australia: New opportunities and challenges," [www.dfat.gov.au/media/speeches/department/041130\\_aiaa\\_kemish.html](http://www.dfat.gov.au/media/speeches/department/041130_aiaa_kemish.html), 26 November 2006

"Komunitas Asia Timur," [www.csis.or.id/scholars\\_opinion\\_view.asp?op\\_id=346&id=41&tab=1](http://www.csis.or.id/scholars_opinion_view.asp?op_id=346&id=41&tab=1), 16 Juni 2006

"Mengapa ASEAN+3 dan bukan ASEAN+5," [www.kompas.com/kompas-cetak/0405/24/sorotan/1038955.htm](http://www.kompas.com/kompas-cetak/0405/24/sorotan/1038955.htm), 16 Juni 2006



- Mingqi, Xu. "East Asian Economic Integration: China Perspective And Policy," [www.apseg.amu.au/pdf](http://www.apseg.amu.au/pdf), 28 April 2006
- Osamu Watanabe, Osamu. "Integration of East Asian Economies: A Role For The United States and Japan," [www.jetro.go.jp/en/jetro/profile/speeches/2005/dec14.pdf](http://www.jetro.go.jp/en/jetro/profile/speeches/2005/dec14.pdf), 17 mei 2006
- Okamoto, Jiro. "The AFTA – CER Linkage Dialogue Revisited: It's Recent Development and Implications", [www.ide.go.jp/English/Publish/Apec?pdf/apec12\\_trade\\_01.pdf](http://www.ide.go.jp/English/Publish/Apec?pdf/apec12_trade_01.pdf), 12 November 2006
- Parnini, Syeda Naushin. "New Dynamics of Regionalization in East Asia: Evolving ASEAN Plus Three and The Challenges for Bangladesh", [www.hri.ca/tribune/onlineissue/25\\_05\\_2005/Erik%20Friberg%20%20-article.html](http://www.hri.ca/tribune/onlineissue/25_05_2005/Erik%20Friberg%20%20-article.html), 23 April 2006
- Priatna, P.L.E. "Australia, Indonesia dan ASEAN", [www.kompas.com/kompas-cetak/0411/19/opini/1372103.htm](http://www.kompas.com/kompas-cetak/0411/19/opini/1372103.htm), 9 November 2006
- Robert W. Radtke, "China's 'Peaceful Rise' Overshadowing US Influence In Asia?", [www.csmonitor.com/2003/1208/p09s01/-coop.html](http://www.csmonitor.com/2003/1208/p09s01/-coop.html), 5 Mei 2006
- "Regionalism in International Relations Theory" [www.publications.fabriziotassinari.net/downloads/ChapterOne.pdf](http://www.publications.fabriziotassinari.net/downloads/ChapterOne.pdf), 6 Agustus 2006
- Roskin, Michael G. "National Interest: From Abstraction to Strategy", [www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdf/files/pub356.pdf](http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdf/files/pub356.pdf), 11 September 2006
- Rann, Ann dan Dr. Frank Frost, "The East Asia Summit, Kuala Lumpur, 14 Desember 2005: Issues and Outcomes," [www.aph.gov.au/library/intguide/FAD/eastasia\\_summit.htm](http://www.aph.gov.au/library/intguide/FAD/eastasia_summit.htm), 10 Oktober 2006
- Sieg, Linda. "East Asian Community: An Idea Whose Come?," [www.asianews.yahoo.com/051214/kyodo/html](http://www.asianews.yahoo.com/051214/kyodo/html), 23 Aril 2006
- Suryanarayana, P.S. "A Vision For Asia," [www.hinduonnet.com/fline/fl2201/stories/htm](http://www.hinduonnet.com/fline/fl2201/stories/htm), 23 April 2006
- Sulaiman, Abdul Rahman. "Meniti Arus: Hala Tuju EAS makin jelas, mantap," [www.neac.gov.my/index.php?ch=62&pg=145&ac=1610](http://www.neac.gov.my/index.php?ch=62&pg=145&ac=1610) diakses tanggal 16 Juni 2006



- “Soal KTT Asia Timur, ASEAN Belum Capai Konsensus”, *www.kompas.news*, 10 April 2006
- Takio, Yamada. “First East Asia Summit and the Prospect of an East Asian Community”, *www.rieti.go.jp/en/events/bb/06011201.html*, 23 April 2006.
- “ Towards An Integrated East Asia Community,” *www.pmo.gov.my/WebNotes/App/PMMain.nsf*, 17 Mei 2006
- Takeshi, Shiraishi. “The East Asian Community and Japan-U.S Relations,” *www.rieti.go.jp/en/events/bb1/05111501.html*, 23 April 2006
- Tavares, Rodrigo. ” The State of The Art of Regionalism, The Past, Present and Future of Discipline”, *www.cris.unu.edu/admin/documents/WProdigo%20tavares.pdf*, 6 Agustus 2006
- “Thailand-Australia Free Trade Agreement,” *www.fta.gov.au/default.aspx?FolderID= 259&ArticleID=205*, 2 November 2006
- “The Republic of Korea: An Emerging Economic and Strategic Power,” *www.dfat.gov.au/geo/na/media/korea\_downer.html*, diakses tanggal 18 November 2006
- “Tantangan KTT Asia Timur”, *www.riaupos.com/web/content/view/3898/7* , 28 April 2006
- Vaile, Mark. “New Study Shows Big Gains From AFTA-CER Free Trade Area”, *www.dfat.gov.au/media/releases/trade/2000/mvt072a\_00.html* , 12 November 2006
- Vaile, Mark. “Joint Business Conference,” *www.ajf.australia.or.jp/aboutajf/publications/occasionalpapers/docs/aj\_joint\_business\_conference.pdf*, 17 November 2006
- Wanandi, Jusuf. ”Perkembangan Strategis di kawasan Asia Timur,” *www.csis.or.id/scholars\_opinion\_view.asp*, 23 april 2006.
- Wallis, Allan. “ The New Regionalism”, *www.munimall.net/eos/2002/wallis\_regionalism.nclk*, 26 Agustus 2006
- Yabaki, Akuila. “ Australia`s New Foreign Policy In The Pacific Region, “ *www.ccf.org.fj/artman/publish/article\_233.shtml* 26 November 2006

Kitchen, Veronica M.,” Identity Change in the Atlantic Security Community,” dalam [www.iir.ubc.ca/Papers/Kitchen%20CIR%2030%20Nov.pdf](http://www.iir.ubc.ca/Papers/Kitchen%20CIR%2030%20Nov.pdf), 22 Januari 2007

[www.wto.org/english/tratop\\_e/region\\_e/region\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm), 24 Juli 2006

[www.ucalgary.ca/~bakardji/community/definition.html](http://www.ucalgary.ca/~bakardji/community/definition.html), 25 Agustus 2006

[www.answer.com/community](http://www.answer.com/community), 25 Agustus 2006

[www.Encarta.msn.com/encnet/feature/dictionary/DictionaryResult](http://www.Encarta.msn.com/encnet/feature/dictionary/DictionaryResult), 25 Agustus 2006

[www.thefreedictionary.com/summit](http://www.thefreedictionary.com/summit), 26 Agustus 2006

[www.pm.gov.au/aus\\_in\\_focus/stats/index.html](http://www.pm.gov.au/aus_in_focus/stats/index.html), 26 November 2006

[www.dfat.gov.au/aib/history.html](http://www.dfat.gov.au/aib/history.html), 26 November 2006

[www.australianexplorer.com/australian\\_history.htm](http://www.australianexplorer.com/australian_history.htm), 26 November 2006

[www.en.wikipedia.org/wiki/SEATO](http://www.en.wikipedia.org/wiki/SEATO), 28 November 2006

[www.dfat.gov.au/dept/annual\\_reports/93-94/1.2.html](http://www.dfat.gov.au/dept/annual_reports/93-94/1.2.html), 2 Desember 2006

[www.dfat.gov.au/cer\\_afta/index.html](http://www.dfat.gov.au/cer_afta/index.html), 12 November 2006

[www.dfat.gov.au/cer\\_afta/index.html](http://www.dfat.gov.au/cer_afta/index.html), 10 November 2006

[www.dfat.gov.au/cer\\_afta/020914\\_aseancer\\_min\\_dec.html](http://www.dfat.gov.au/cer_afta/020914_aseancer_min_dec.html), 12 November 2006

[www.dfat.gov.au/trade/negotiations/australia\\_singapore\\_agreement.html](http://www.dfat.gov.au/trade/negotiations/australia_singapore_agreement.html), 2 November 2006

[www.aph.gov.au/LIBRARY/Pubs/rn/2004-05/05rn21.html](http://www.aph.gov.au/LIBRARY/Pubs/rn/2004-05/05rn21.html), 2 November 2006

[www.petra.ac.id/asc/int\\_relations/australia\\_asia/australia\\_china/economic.html](http://www.petra.ac.id/asc/int_relations/australia_asia/australia_china/economic.html), 18 November 2006

[www.dfat.gov.au/geo/new\\_zealand/](http://www.dfat.gov.au/geo/new_zealand/), 2 Desember 2006

[www.dfat.gov.au/geo/india/india\\_brief.html](http://www.dfat.gov.au/geo/india/india_brief.html), 2 Desember 2006

[www.dfat.gov.au/ani/dfat\\_white\\_paper.pdf](http://www.dfat.gov.au/ani/dfat_white_paper.pdf), 26 November 2006

[www.dfat.gov.au/arf/background.html](http://www.dfat.gov.au/arf/background.html), 9 November 2006

- [www.dfat.gov.au/arf/arf\\_members.html](http://www.dfat.gov.au/arf/arf_members.html), 9 November 2006
- [www.dfat.gov.au/arf/background.html](http://www.dfat.gov.au/arf/background.html), 10 November 2006
- [www.dfat.gov.au/geo/india/india\\_brief.html](http://www.dfat.gov.au/geo/india/india_brief.html), 2 Desember 2006
- [www.dfat.gov.au/arf.documents/security\\_outlook\\_2003.html](http://www.dfat.gov.au/arf.documents/security_outlook_2003.html), 26 November 2006
- [www.dfat.gov.au/media/speeches/foreign/1996/aust\\_japan.html](http://www.dfat.gov.au/media/speeches/foreign/1996/aust_japan.html), 18 November 2006
- [www.abc.net.au/ra/news/stories/s1499777.htm](http://www.abc.net.au/ra/news/stories/s1499777.htm), 12 November 2006
- [www.foreignminister.gov.au/speeches/2002/020507\\_fa\\_whitepaper.html](http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2002/020507_fa_whitepaper.html), 26 November 2006
- [www.dfat.gov.au/ani/dfat\\_white\\_paper.pdf](http://www.dfat.gov.au/ani/dfat_white_paper.pdf), 26 November 2006
- [www.fao.org/participation/english\\_web\\_new/content\\_en/definition.html](http://www.fao.org/participation/english_web_new/content_en/definition.html), 18 Desember 2006
- [www.alternativesjournal.net/volume4/number3/beyer.pdf](http://www.alternativesjournal.net/volume4/number3/beyer.pdf), 22 Januari 2006

Lampiran I.

Laporan EAVG mengenai *East Asian Community* (EAC) yang disampaikan pada pertemuan *ASEAN Plus Three* (APT) ke lima di Brunei pada bulan November 2001.



# **TOWARDS AN EAST ASIAN COMMUNITY**

**Region of Peace, Prosperity and Progress**



**EAST ASIA VISION GROUP REPORT 2001**



## EXECUTIVE SUMMARY

East Asia is quickly becoming a distinctive and crucial region in the world. In the new millennium, irrevocable trends including globalization, the information revolution, and growing interdependence among regions present East Asia with new challenges and opportunities for regional collaboration.

In particular, the Asian financial crisis of the recent past provided a strong impetus to strengthen regional cooperation. It has spurred the recognition that East Asia needs to institutionalize its cooperation to pre-empt or solve similar problems that may arise.

The East Asian Vision Group thus wishes to create a vision that would inspire East Asian peoples and governments to work towards building an 'East Asian community' that will address the region's future challenges and advance mutual understanding and trust.

The Vision Group envisions East Asia moving from a region of nations to a bona fide regional community where collective efforts are made for peace, prosperity and progress. The economic field, including trade, investment, and finance, is expected to serve as the catalyst in this community-building process.

The East Asian community will be based on cooperation and openness. It will be pursued with the purpose of contributing to what is good not only for the region but also for the world.

In proposing the formation of an East Asian community, we seek the following goals:

- Preventing conflict and promoting peace among the nations of East Asia;
- Achieving closer economic cooperation in such areas as trade, investment, finance, and development;
- Advancing human security in particular by facilitating regional efforts for environmental protection and good governance;
- Bolstering common prosperity by enhancing cooperation in education and human resources development; and
- Fostering the identity of an East Asian community.

## **KEY RECOMMENDATIONS**

The Vision Group makes the following key recommendations for the realization of the East Asian community:

### **Economic Cooperation**

- Establishment of the East Asian Free Trade Area (EAFTA) and liberalization of trade well ahead of the APEC Bogor Goal.
- Expansion of the Framework Agreement on an ASEAN Investment Area to all of East Asia.
- Promotion of developmental and technological cooperation among regional countries, particularly to provide assistance to less developed countries.
- Realization of a knowledge-based economy and the establishment of a future-oriented economic structure.

### **Financial Cooperation**

- Establishment of a self-help regional facility for financial cooperation.
- Adoption of a better exchange rate coordination mechanism consistent with both financial stability and economic development.
- Strengthening of the regional monitoring and surveillance process within East Asia to supplement IMF global surveillance and Article VI consultation measures.

### **Political and Security Cooperation**

- Promotion of norms, procedures and mechanisms for good management of intra-regional relations on the basis of neighborliness, mutual trust and solidarity.
- Establishing and strengthening of mechanisms for addressing threats to peace in the region.
- Broadening of political cooperation with respect to national governance issues.

- Amplification of the East Asian voice in international affairs and expansion of the region's contribution to the process of creating and evolving a new global order.

### **Environmental Cooperation**

- Institutionalizing bilateral and multilateral environmental cooperation within the region, as well as at the global level.
- Enhancement of public information and education in environment issues, and involvement of NGOs in the process.
- Ensuring more effective management of water and fisheries and combating of marine pollution.
- Joint development and exploration of new sources and supplies of energy within the region and embarking on efficient use of energy.

### **Social and Cultural Cooperation**

- Establishment of poverty alleviation programs, where richer countries help the less-developed fight poverty, illiteracy and disease.
- Adoption of programs to provide greater access to basic healthcare services.
- Implementation of a comprehensive human resource development program, focusing on the improvement of basic education, skills training and capacity building.
- Promotion of regional identity and consciousness, and cooperation on projects in the conservation and promotion of East Asian arts and culture.
- Establishment of an East Asia Education Fund to promote basic education, literacy programs, and skills training in the region.

### **Institutional Cooperation**

- Evolution of the annual summit meetings of ASEAN+3 into the East Asian Summit.

- Establishment of an East Asia Forum, consisting of the region's governmental and non-governmental representatives from various sectors, with the aim to serve as an institutional mechanism for broad-based social exchanges and, ultimately, regional cooperation.



## INTRODUCTION

### What is the Vision?

1. **We, the people of East Asia, aspire to create an East Asian community of peace, prosperity and progress based on the full development of all peoples in the region. Concurrent with this vision is the goal that the future East Asian community will make a positive contribution to the rest of the world.**
2. For *regional peace*, we must cooperate to promote a stable and cooperative security environment based on mutual trust and respect. In the interest of *common prosperity*, we must promote trade, investments and financial cooperation. We should also be mindful of disparities in socio-economic development, educational attainment and technological advancement within the region. For *human progress*, we must improve governance, strengthen basic rights and advance quality of life.
3. The Vision Group envisions East Asia moving from a region of nations to a bona fide regional community with shared challenges, common aspirations, and a parallel destiny. The economic field, including trade, investment, and finance, is expected to serve as the catalyst in the comprehensive community-building process.

### Why an East Asian Community?

4. East Asia is quickly becoming a distinctive and crucial region of the world. In the new millennium, irrevocable trends such as globalization, the information revolution, and growing interdependence among nations will present East Asia with new challenges and opportunities for regional collaboration.
5. In the past, political rivalries, historical animosities, cultural differences and ideological confrontation posed barriers to cooperation among East Asian nations. Disparities in stages of development, trade and economic policies, and financial and legal frameworks have also impeded closer economic cooperation. In the social and cultural realms, significant poverty and illiteracy still plague the lives of millions in the region.



6. However, East Asian nations share geographical proximity, many common historical experiences, and similar cultural norms and values. The region has nations that are endowed with abundant skilled labor, entrepreneurs, natural resources, capital, and advanced technology. Our many common challenges and complementary resources call for mutually beneficial cooperation and exchanges, not only in the economic realm, but also in the political, security, environmental, social, cultural, and educational arenas.
7. Globalization of the world economy, together with the trend towards regional trading blocs, brings new challenges such as the need to define global standards, harmonize regulations, and engage in multilateral trade negotiations. These issues call for more deliberate regional cooperation and coordination as well as a united voice to advance the region's common interests.
8. In particular, the Asian financial crisis of the recent past has provided a strong impetus to strengthen regional cooperation. This has given rise to the recognition that East Asia needs to institutionalize its cooperation to solve similar problems and prevent new ones.
9. Given the historical legacy and future potential for rivalries and competition among East Asian nations, it is important to avoid the risk of future war in the region. We need to devise and institute mechanisms and practices to prevent conflicts, and manage them effectively when they arise.
10. East Asia lacks an institutional framework for region-wide dialogue and cooperation. There is a growing awareness among East Asian countries of the need for a framework at the regional level to manage the dynamic changes ahead.
11. The Vision Group thus seeks to promote a vision that would inspire East Asian peoples and governments to work towards building an East Asian community with a view to addressing the region's future challenges and to advancing mutual understanding and trust.
12. In proposing the formation of an East Asian community, we have the following goals in mind:
  - To prevent conflict and promote peace among the nations of East Asia;
  - To promote trade, investment, finance, and development in the region;
  - To advance human security and well-being, in particular by facilitating regional efforts for environmental protection and good governance;

- To bolster common prosperity by enhancing cooperation in education and human resources development; and
- To foster the identity of an East Asian community by encouraging active exchanges and regular dialogues at both the governmental and non-governmental levels.

## Guiding Principles

13. ***Shared Identity*** – Together we shall develop a shared regional identity by working to galvanize the aspirations of our peoples, promote greater trust and confidence, and advance common interests so as to foster a new sense of regional community.
14. ***Economic Cooperation as the Catalyst*** – We expect cooperation in the economic field, in particular, trade, investment, and finance, to serve as the catalyst in the comprehensive community-building process.
15. ***People Focus*** – We recognize that human resources are our strongest assets: hardworking, education-minded, thrifty, and enterprising peoples are the backbone of our economic success. Their security, welfare and happiness are our ultimate goal. We shall develop our human resources with a particular focus on the young of East Asia.
16. ***Inclusiveness*** – Our efforts must involve the active participation of and partnership across the different sectors and strata of society. We need the commitment of not only the governments, but also the civil society sectors.
17. ***International Norms*** – Our efforts must be guided by respect for internationally accepted principles and norms of inter-state relations, including mutual respect for international law, good neighborliness, and equality among countries.
18. ***Regional Thinking*** – While respecting the principle of national sovereignty, the overall mechanism for regional cooperation should be based on regional thinking and the welfare of all East Asians.
19. ***Progressive Institutionalization*** – Our vision can best be realized with the support of suitable institutions; organizational capacity is crucial for effective formulation and implementation of programs. We must, however, avoid duplication of the work of other related organizations and regional frameworks

and instead complement their contributions.

20. ***Harmony with the Global System*** - Our regional community shall be outward-looking and open to the rest of the world. While we propose programs for regional cooperation, we must be active in pursuing our global linkages and making contributions to international peace and development efforts. Regional cooperation should be consistent with the broader global frameworks.



## AGENDA FOR COOPERATION

### I. ECONOMIC COOPERATION

21. **The Vision Group envisions the progressive integration of the East Asian economy, ultimately leading to an East Asian economic community. The Vision Group thus recommends that East Asia pursue the objective of economic integration through the liberalization of trade and investment, developmental and technological cooperation, and information technology (IT) development.**
22. Globalization of the world economy is an irreversible trend that characterizes the economic environment of today and tomorrow. Open international trade and investment will be a key force for sustaining economic growth in East Asia and the global economy as a whole.
23. Growing regionalism elsewhere has created the need for East Asia to pay more attention to securing regional common interests in the multilateral trading arena. Economic integration in East Asia should lead to the reaping of the fruits of liberalization while promoting a cohesive response to new challenges in the global economy.
24. Economic integration in East Asia is already under way. With intra-regional trade and investment increasing at unprecedented levels, economic interdependence within the region has become the foundation for future growth. In addition, there are signs of further institutional economic integration in the region.
25. The political commitment to economic cooperation is already in place. The leaders of ASEAN+3 at the Manila summit in November 1999 agreed on broad economic cooperation and mandated their economic ministers to oversee the implementation of the cooperation process on a regular basis.
26. **The Vision Group envisages that the private sector would contribute significantly to the region's economic prosperity and integration process. The Vision Group therefore recommends the formation of an East Asia Business Council representing small and medium enterprises and multi-national**

**corporations in the region.**

## **Trade**

27. Regional integration leads to more intra-regional trade, greater welfare gains and more resources to member economies. Once East Asia is represented as a single entity in international society, the member countries can secure their interests more effectively and contribute more actively to the global economy.
28. The Vision Group **recommends the formation of an East Asia Free Trade Area (EAFTA) and liberalization of trade well ahead of the Bogor Goal set by APEC.** In order to facilitate the formation of a region-wide FTA, East Asia needs to consolidate all existing bilateral and sub-regional FTAs within the region. **We recommend the establishment of a ministerial committee to oversee the development of an EAFTA.**
29. The Vision Group also emphasizes that the regional integration arrangement should be consistent with World Trade Organization (WTO) agreements so as to reinforce the multilateral trading system.
30. The Vision Group calls for the EAFTA to be designed in such a way that will benefit all member economies. **We also recommend the establishment of GSP status and preferential treatment for the least developed countries in the region.**

## **Investment**

31. Acknowledging that the free flow of investment facilitates trade and helps sustain economic growth, the Vision Group urges East Asian countries to foster an attractive investment environment that ensures increased FDI flows within and into the region. This investment environment includes sound macroeconomic fundamentals, transparent and nondiscriminatory legal systems, sensible policy regulations, as well as skilled human resources.
32. The Vision Group **calls for the establishment of an East Asian Investment Information Network to stimulate intra-regional investment and to**



**improve the transparency of investment-related regulations.** Furthermore, the Vision Group recommends promoting investment by SMEs and establishing an appropriate administrative and financial support system.

33. **The Vision Group recommends the establishment of an East Asia Investment Area (EAIA) by expanding the Framework Agreement on ASEAN Investment Area (AIA) to cover East Asia as a whole.**

## **Developmental and Technological Cooperation**

34. Developmental and technological cooperation is vital for sharing prosperity among all nations in the region. The Vision Group believes that East Asian countries can benefit from this type of cooperation in a short period of time.
35. **The Vision Group calls for the joint development of resources and infrastructure for growth areas in the region and the expansion of financial resources for development.** Active participation of the private sector should be encouraged.
36. The Vision Group recommends that concerted efforts be made to narrow development gaps among East Asian countries for the region's common prosperity and dynamic and sustained growth. In this regard, the Vision Group **urges that greater cooperation and assistance be extended to countries at lower levels of development in three priority areas: infrastructure, information technology and human resources development.**
37. The Vision Group recognizes the need for increased official development assistance (ODA) to less developed economies in the region to help narrow the economic gap.
38. **The Vision Group recommends that technological cooperation be pursued through technology transfers and joint technology development.** The Vision Group also urges East Asian governments to promote more active FDI and stronger strategic alliances in the region, starting with identifying feasible areas of technological cooperation.
39. **The Vision Group encourages private companies to exchange technology on**

a commercial basis. We also recognize the need to promote free transfer of government-owned technology in support of less developed areas in the region.

## New Economy

40. The development of new technologies such as information technology (IT), biotechnology, genetically modified organisms (GMO), and nano-technology creates new industries and enhances the efficiency of traditional industries by creating new trade opportunities and increasing productivity. The Vision Group recommends common efforts for the realization of a knowledge-based economy and the establishment of a future-oriented economic structure through cooperation in these new technologies. The Vision Group recommends the creation of a large pool of well-educated, adaptable and innovative human resources in the New Economy.
41. The Vision Group recommends the joint development of information technology to build telecommunications infrastructure and to provide greater access to the Internet at reduced costs to users.
42. Priority should be given to narrowing the digital divide among and within nations. The Vision Group recommends developing dialogues among East Asian countries on information technology and jointly creating an 'East Asian Internet Project,' with the help of the private sector, to provide technical assistance for the development of information technology in less-developed East Asian countries.
43. To further improve the IT infrastructure in East Asia, the Vision Group recommends the following:
  - i) **Trans-East Asian Information Superhighway** with high-speed data transmission over fiber optic cables and regional telecommunications connections with essential regional network management and end-to-end coordination.
  - ii) **Regional Software Technology Development and Multimedia Content Centers** with joint research and joint ventures in developing new solutions as well as new software applications for East Asian Internet and e-commerce.
  - iii) **East Asian Venture Capital Network** to create a financial environment that

would nourish Internet startups as well as strengthen East Asian capacity in IT skill development.

- iv) **Harmonization of Internet and e-commerce issues** such as protection of intellectual property, privacy, curbs on Internet pornography, a tax framework and other legal infrastructure in order to build the foundations of the Internet economy.

## **II. FINANCIAL COOPERATION**

- 44. **To enhance financial stability and economic efficiency in East Asia, the Vision Group proposes that East Asian governments adopt a staged, two-track approach towards greater financial integration: one track for establishing a self-help financing arrangement and the other for coordinating a suitable exchange rate mechanism among countries in the region.**
- 45. **The Asian financial crisis of the recent past revealed the vulnerability of East Asian countries to shocks arising from the globalization of financial markets and massive capital flows. It has demonstrated that East Asian countries urgently need to establish sound and stable domestic financial systems, good corporate governance and prudent macroeconomic policies. At the regional level, the financial crisis further highlighted the need for some form of institutional arrangement to prevent such crises, and to manage those that occur more effectively.**
- 46. **The Vision Group noted the progress made by ASEAN and the Manila Framework countries by having officials meet regularly to exchange views on macroeconomic development in member countries. The Vision Group also welcomes the achievements made so far by ASEAN+3 on the financial and monetary issues of regional interest, including the 'Joint Statement on East Asian Cooperation' adopted in November 1999, the 'Chiang Mai Initiative' of May 2000, and the finance ministers' meeting in Honolulu in May 2001.**

### **Regional Financing Arrangements**

- 47. **Looking ahead from what has been achieved in regional financing**

arrangements, the Vision Group **proposes that steps be taken toward the establishment of a full-fledged regional financing facility such as the East Asian Arrangement to Borrow or an East Asian Monetary Fund.** Such a facility should have conditionality that best fits the nature of a crisis, would be supplementary to the IMF, and would serve as a kind of safety net, acting as a regional lender of last resort working in collaboration with the IMF and other international facilities.

48. The monitoring and surveillance process is the bedrock on which the regional financing facility should rest. Such a process, properly developed and implemented, would provide early warning to prevent a financial crisis. It would also provide prompt and relevant information for assessing the financing needs of members requesting assistance and the potential contagion to other member countries. The Vision Group therefore **recommends strengthening the regional monitoring and surveillance process within East Asia, which would supplement the IMF's global surveillance and Article IV consultation.**

## **Regional Exchange Rate Coordination**

49. The Vision Group **recommends that East Asian countries work out in stages an appropriate exchange rate regime consistent with not only financial stability but also economic development.** Flexible but stable exchange rates are more compatible with long-term steady economic development than a pure float.
50. An anchor for such a flexible but more stable exchange rate regime would be **real effective exchange rates consistent with economic fundamentals.** Such a regime will help prevent exchange rate fluctuations from getting too large but at the same time **accommodate some volatility of international capital movements.** The use by individual countries of an effective exchange rate as an anchor suggests that a multiple currency basket will be more appropriate than a single currency dominant basket.
51. Greater regional integration of both international trade and finance will require increasingly closer cooperation in both macroeconomic policies and exchange rate alignment. In view of the large diversity among the East Asian economies today, the region could launch an official forum to exchange views on macroeconomic and financial sector policies through strengthening the



aforementioned surveillance process.

52. As intra-regional trade continues to grow rapidly, the exchange rates of East Asian countries are likely to move more closely with one another. The Vision Group, therefore, **calls for a more closely coordinated regional exchange rate mechanism**. Such a mechanism will require much closer macroeconomic policy coordination on the monetary and fiscal policy fronts.
53. In the long run, the Vision Group envisages the possibility of East Asia evolving into a common currency area, if and when economic, political, social and other linkages develop to a point where tighter forms of monetary integration become feasible and desirable.

### **III. POLITICAL & SECURITY COOPERATION**

54. **The Vision Group envisions a peaceful, stable and cooperative East Asian community free from armed conflict, violence and hostilities, whether internal or external. Promoting political and security cooperation is vital to deal with threats to peace and other regional security problems.**
55. The global security environment and the institutions for global governance have undergone drastic changes since the end of the Cold War. East Asian countries must be more effectively engaged in and make their own significant contribution to the process of creating and evolving a new global order.
56. We need to address traditional as well as new challenges to peace and security. Territorial and maritime disputes, border problems, competition for resources, transnational crimes and international terrorism are **common challenges** that require joint or cooperative responses.

### **Overall Management of Intra-regional Relations**

57. The principal goal of political cooperation in East Asia is to promote neighborliness, mutual trust, and solidarity among countries in the region. Disputes shall be addressed through peaceful means and on the basis of mutual



respect.

58. **East Asian countries should adopt and actively implement a code of conduct to help govern relations among them, including universally accepted principles of international law, respect for sovereignty, peaceful coexistence, renunciation of the use of force, and equality.** The UN Charter and the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia can serve as a basis for regional cooperation in East Asian peace and security.
59. **East Asian countries should develop and observe effective rules and procedures to guide cooperation, including the principle of reaching agreement through consultation, voluntary implementation, non-confrontation, sensitivity to concerns of affected states, and the creation of dispute settlement mechanisms.**
60. **The Vision Group calls for the evolution of the annual summit meetings of ASEAN+3 into the East Asian Summit. We also recommend institutionalization of regional dialogues including regular meetings of foreign ministers and leaders of other sectors on the range of political and security-related subjects.**

## **Cooperation for Regional Peace and Security**

61. **East Asian governments should work together to enhance mutual trust and assurance. The Vision Group urges a continuous process of confidence-building among countries of the region, especially exchanges, consultations, and other cooperative activities (e.g. cross training of military personnel, joint training, and information tours) among military and defense officials.**
62. **East Asian governments should cooperate to establish and implement effective measures for the prevention and avoidance of conflict, as well as for management of tensions within the region. Communications channels should be in place to enable governments to acknowledge and prevent the emergence of new security problems.**
63. **The Vision Group urges governments in the region to strengthen the ASEAN Regional Forum so that it can serve as a more effective mechanism**

**for cooperative security.**

64. **With the aim of increasing the East Asian role in global peacekeeping, governments in the region should cooperate towards agreement on the region's peacekeeping objectives.**
65. **East Asian nations should intensify consultations and strengthen mechanisms for cooperation on combating piracy, drug trafficking, illegal migration, smuggling of small arms, money laundering, cyber crime, international terrorism and other issues affecting human security. In particular, mechanisms to stem the tide of piracy, and drug and human trafficking should be urgently set up.**
66. **Sub-regional security dialogues shall be encouraged where appropriate. Such dialogues involving smaller groups of countries may lead to agreements among them with respect to their common security concerns.**

## **Regional Political Cooperation**

67. **The Vision Group envisions that East Asian countries shall promote peace, stability, social justice, social harmony, respect for the rule of law, accountability and democratic progress as desirable common goals in their respective national polities. Creating a new Asia and amplifying the Asian voice in international affairs require a far-sighted vision and the combined commitment of East Asian governments to bring it to reality.**
68. **The Vision Group recommends that East Asian nations cooperate and exchange best practices in addressing common problems in governance such as reducing corruption, undertaking legal reform, and achieving transparency, responsiveness and efficiency in the bureaucracy.**
69. **East Asian governments shall promote bilateral as well as multilateral exchanges among political and legislative leaders and various social groups such as business, labor unions, the media, academics, youths, non-governmental organizations, and other civil society groups. The Vision Group also recommends that a network of East Asian think tanks be established to explore long-term policy issues of strategic importance to the region.**

#### **IV. ENVIRONMENT AND ENERGY COOPERATION**

70. **The Vision Group proposes an environmentally friendly and sustainable East Asia. It calls upon leaders to strengthen and increase efforts towards institutionalizing environmental and energy cooperation in the region.** This requires the acceptance by governments, individuals, businesses, and organizations in various fields of the responsibility to exert common efforts for the protection and improvement of the environment for present and future generations.
71. Environmental issues have led to regional disputes from time to time. On the other hand, transnational ecological problems, including global warming, depletion of bio-diversity, and issues associated with genetically modified organisms (GMO), provide strong incentives for collective environmental cooperation within the East Asian region.
72. The Vision Group underlines the need to preserve the rich and diversified natural resources in East Asia. At the same time, it calls for closer collaboration in research and development in East Asia to utilize wisely these resources for the well being of all our peoples.

#### **Regional Environmental Cooperation**

73. **The Vision Group urges governments in the region to engage actively in the establishment of a comprehensive East Asian environmental cooperative body, which includes a dispute settlement mechanism and a regional environmental database.** The Vision Group believes that such efforts will address transnational environmental problems by strengthening regional institutional and legislative frameworks, developing regional environmental networks, and enhancing policy-making capacities.
74. **To increase synergy among the various bodies for environmental cooperation, the Vision Group proposes that an East Asian Environment Ministers' Meeting be organized periodically for the coordination of regional environmental projects.**

75. The Vision Group **proposes that East Asian nations cooperate to install air pollution control equipment in order to reduce greenhouse gas emission.** Measures should also be taken to prevent trans-boundary pollution such as a 'brown problem' (e.g. forest fires in Southeast Asia), 'yellow problem' (e.g. yellow dust and acid rain in Northeast Asia), and 'blue problem' (e.g. the Mekong river).
76. The Vision Group recognizes the importance of sustainable agricultural practices that will help minimize land erosion, land encroachment, and deforestation. Food security and efficient land use management should also be promoted. The Vision Group recommends that the East Asian governments pursue greater coordination and cooperation in food, agriculture and forestry and, in particular, the establishment of regional agricultural information networking.
77. **East Asian governments should pursue joint programs for the conservation of forests and reforestation in the region. They should also try to enhance regional capabilities to prevent and manage natural disasters, especially floods, droughts, and forest fires.**
78. The Vision Group calls on leaders of East Asian nations to formulate a joint action plan for sustainable environmental management in the entire region. Furthermore, the Vision Group **urges the industrialized countries in the region to provide both financial and technical assistance to other member countries to facilitate the effective implementation of the action plan.**
79. The Vision Group **urges that East Asian governments facilitate exchanges to address urban development concerns,** particularly in relation to the environmental hazards and deteriorating quality of life resulting from overcrowding and pollution.
80. Educating the public about the significance of environmental issues is crucial for advancing environmental policies and promoting environmentally friendly economic and industrial development. The Vision Group thus **proposes that governments in the region introduce environmental education at the early stages of school curriculum.**



81. Empowering local communities to seek and find their own solutions and resources is a key element to sustainable environment. The Vision Group thus **urges East Asian governments to encourage the development of regional environmental networks, particularly through the creation and expansion of community programs at the grassroots level.**
82. The Vision Group urges that governments in the region work together towards bilateral and multilateral environmental cooperation within the region, as well as at the global level, by institutionalizing their collaborative efforts. The Vision Group also **emphasizes the need for East Asia to take concerted actions in international forums to ensure effective implementation of all multilateral agreements on environmental cooperation and protection, including the Kyoto Protocol on global warming.**

### **Water Resource Management**

83. Demographic change along with improved economic conditions in East Asia has put pressures on both the limited and renewable resources, especially water and fisheries. The Vision Group thus **calls for joint endeavors to ensure more effective water resources management throughout the East Asian Region.**
84. Marine pollution is a serious trans-boundary environmental problem facing the region. The Vision Group welcomes the Steering Committee for the Yellow Sea Large Marine Ecosystem (YSLME) project and the Northwest Pacific Action Program (NOWPAP) in Northeast Asia, and **calls for closer regional marine environmental cooperation for the entire region.**

### **Energy Cooperation**

85. Regional energy security, both in terms of supply and price, needs to be maintained. The region's over-reliance on external sources for oil can have serious implications on the security of its energy supply. The region must jointly develop and explore new sources and supplies of energy within the region, and promote the efficient use of energy. Similarly, comprehensive and systematic efforts must be made in order to ensure stable oil prices that are acceptable to both the exporting and importing countries.



86. Research and development should be stimulated for the exploration of alternative sources of cleaner energy, including renewable energy generation. Given the drawbacks of fossil fuels, East Asian countries **should cooperate for the development of solar, wind, hydroelectric and nuclear fusion energy.** There should be more cooperative regional efforts to establish renewable energy generation systems.
87. The Vision Group **recommends that East Asian governments establish regional nuclear cooperation arrangements that promote the peaceful and safe use of nuclear energy.**
88. The Vision Group **calls for a framework to help the region develop a broad regional consensus for energy policies and strategies both for the short and long term.** In addition, the Group **urges that common action plans, such as the proposed trans-ASEAN energy network project, be formulated by the countries in the region for the implementation of the agreed policies and strategies.** The electrification and energy needs of the rural population deserve special attention as an area of regional cooperation.

## **V. SOCIAL, CULTURAL AND EDUCATIONAL COOPERATION**

89. The Vision Group **envisions a socially connected, educationally advanced, and culturally vibrant East Asian community which can effectively deal with the problems of poverty, illiteracy, and disease.** The Vision Group **proposes that East Asian nations espouse the values of social justice and human security and take region-wide initiatives to improve the lives of all East Asians.**
90. The Vision Group **recommends that region-wide poverty alleviation programs, healthcare programs, and literacy and educational advancement campaigns be instituted.**
91. The Vision Group **proposes a three-pronged approach: social programs, cultural exchanges, and educational cooperation.** These programs will promote equity

among and empowerment of the East Asian peoples and equip the countries in the region to build more peaceful, stable, and prosperous societies and communities.

## Social Programs

92. East Asia has experienced rapid economic growth and transformation during the past decades. However, there are costs of rapid growth – widening income disparity, urban congestion, social dislocations, and eroding cultural traditions. Poverty, illiteracy, and disease still plague the lives of millions in the region. Programs to attack these social ills will improve the lives and livelihoods of many in this region.
93. Common prosperity in East Asia must be built on more equitable and fair societies and on enlightened and empowered citizenries. The Vision Group therefore **recommends that East Asian countries review and address different forms of inequality and prejudice that may affect their respective societies**, including those between the rich and poor, between the educated and illiterate, between genders, between different ethnic and religious communities, and between different generations of their citizens.
94. The Vision Group **urges the richer countries to make significant contributions to help less-developed nations fight poverty, illiteracy, and disease**. It also advocates that national governments do more for their poor, illiterate, and citizens stricken or threatened with disease. The Hanoi Plan of Action on social safety nets can serve as a model for East Asia to protect the most vulnerable sectors.
95. Disease degrades human capital, an important resource to support future national development. Healthcare programs are a powerful tool for enriching lives and uplifting communities. The Vision Group **urges East Asian nations to take concerted steps to expand and improve access to basic healthcare, particularly for at-risk groups**. The spread of HIV/AIDS, malaria, and other communicable diseases must be brought swiftly under control.
96. The Vision Group **recommends the establishment of an East Asia Forum, consisting of the region's governmental and non-governmental**

**representatives from various sectors, with the aim to serve as an institutional mechanism for broad-based social exchanges and, ultimately, regional cooperation.**

97. **The role of unofficial actors in social programs, including NGOs, has in many societies become as important as that of official actors such as governments and international organizations. The Vision Group calls for East Asian governments to work closely with NGOs in policy consultation and coordination to encourage civic participation and responsibility and to promote state-civil society partnerships in tackling social problems.**

### **Cultural and Educational Programs**

98. **The Vision Group urges governments of the region to work together with their respective cultural and educational institutions to promote a strong sense of regional identity and an East Asian consciousness. Such work may be done through active social and cultural exchanges involving different sectors of society. Scholars and historians are especially encouraged to engage in collaborative projects that will help broaden appreciation of East Asian history, civilization and culture.**
99. **The East Asia Vision Group recommends the promotion of networking and exchanges of experts in the conservation of the arts, artifacts and cultural heritage. Youth participation in such programs is important in order to foster appreciation, respect and understanding of the rich and diverse heritage of East Asian cultures and traditions.**
100. **The promotion of East Asian studies in the region is necessary in order to achieve mutual trust and understanding lasting many generations. To this end, we recommend that: i) key universities in the region be encouraged to set up East Asian studies programs focusing on the study of history, languages, cultures and contemporary society of the region; ii) these East Asian studies programs be organized into an East Asian Studies Network that will undertake research, exchanges and other projects on subjects relevant to contemporary East Asian development; and iii) one university be designated and supported as the Network Secretariat, tasked to serve as an information resource center as well as to coordinate projects.**

101. A comprehensive 'Human Resource Development Program for East Asia' may be drawn up on the basis of existing programs, focusing on the improvement of basic education, skills training and capacity building to help the workforce adapt to a changing environment. To promote educational advancement and scholarship, the Vision Group recommends that **an East Asia Education Fund be established to support basic education, literacy programs and skills training**. This Fund will also provide scholarships for students to pursue higher education in East Asian universities.

## CONCLUSION

102. At the dawn of the new millennium, we recognize both the need and opportunity to build a regional community—an East Asian community of *peace, prosperity and progress*.

103. Cooperation through community-building will enable East Asian nations to cope with the economic, social and political challenges the region faces today, while preparing the peoples of East Asia for a safer, richer and more secure life in the future.

104. The time for building an East Asian community is opportune. With strong geographical, historical, and cultural bonds, the nations in East Asia have been actively seeking common ground for regional cooperation. New global trends such as globalization and regional interdependence also facilitate East Asian cooperative efforts.

105. Much time and effort will be required to bring this vision of a full-fledged East Asian community to reality. While the pace of building an East Asian community is uncertain, the direction is clear and the trend currently underway is irreversible. We shall develop our regional identity, apply our talents and resources to common goals, and build new institutions for peace, prosperity, and progress.

106. Ultimately, a vision for East Asia should be based on cooperation and

**openness. It should seek to expand understanding, agreement and coordination among regional countries on important international issues, with a view to enhancing our ability to contribute to what is good not only for the region but also for the world.**

**107. The East Asian community, we submit, is our best hope for the future as a region. As our mission and contribution to the rest of humanity, we must begin to take concrete steps to realize this vision. We must spare no effort to co-create this common future for the benefit of this generation of East Asians and the ones to follow.**

